

*Epistemologi*

# **EKONOMI ISLAM**

*Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si*



*Epistemologi*  
**EKONOMI ISLAM**

**Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si**

Penerbit : Cv. Elsi Pro

# *Epistemologi* EKONOMI ISLAM

Penulis : Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si

Diterbitkan oleh :  
CV. ELSI PRO  
Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 081320380713

Penyunting : Siti Yulia, S.Hum. I  
Desain cover & layout : Amir Hamzah  
Percetakan : PUSTAKA ELSI  
Cetakan Pertama : Februari 2015  
156 Halaman  
ISBN : 978-602-1091-173

Hak Cipta dilindungi Undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

# Pengantar Penulis

Perkembangan peradaban dunia telah sampai kepada apa yang sering disebut sebagai era globalisasi. Dimensi ruang dunia seakan menjadi semakin kecil dan perubahan yang terjadi, menurut berbagai kalangan, sangat cepat dan kadang-kadang tidak terduga. Dengan media informasi dan telekomunikasi yang semakin canggih mulai dari radio, televisi, satelit, telepon seluler, internet dan berbagai macam perangkat elektronik dengan teknologi digital telah membuat jarak dan waktu menjadi kehilangan pembatasnya. Dan pada akhirnya memang kehidupan manusia semakin dipermudah oleh penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin bertambah maju.

Seperti ungkapan ilmuwan dalam meramalkan masa depan bahwa teknologi akan menguasai dunia. Sebuah ungkapan sangat populer pada masa-masa awal kebangkitan teknologi, dan seakan menjadi ilham yang mendatangkan motivasi bagi para ahli untuk saling berlomba menemukan teknologi baru. Hal ini telah menjadikan manusia begitu terpesona oleh perubahan yang luar biasa dengan kelahiran dan perkembangannya yang sangat pesat. Namun Albert Einstein - ilmuwan fisika abad ke-20 - lebih menekankan suatu titik pandang bahwa yang menguasai dunia bukan teknologi, tetapi imajinasi. Mencoba mengerti apa yang ada dalam benak Albert Einstein tersebut, kita boleh mengartikan bahwa bukan hanya teknologi yang akan mempertinggi peradaban manusia di masa depan, tetapi ada kekuatan lain yang lebih luas daya jangkauannya.

Walaupun demikian kita harus menyadari bahwa terbentuknya peradaban sekarang, di mana kita menjadi satu generasi yang menghuni dunia

saat ini dan menjadi bagian dari padanya, tidak terbentuk begitu saja. Banyak hal telah terlewati yang diwarnai oleh berbagai nuansa warna pikir, budaya, ideologi dan bermacam-macam pemikiran termasuk sejarah benturan-benturan dahsyat diantara mereka. Sehingga umat manusia yang berasal dari berbagai belahan dunia dengan membawa pola berpikir dan cara hidup masing-masing, lambat laun saling mengenal satu sama lain menuju titik keseimbangan.

Dunia memang terus berputar seiring dengan berputarnya waktu dan berjalannya kehidupan itu sendiri. Berbagai pemikiran, ideologi dan kebudayaan silih berganti memberikan warnanya mengisi perjalanan peradaban manusia. Setiap peradaban mengalami kejayaan pada jamannya sendiri dan tidak satupun peradaban yang dapat berdiri tegak sepanjang masa. Perubahan demi perubahan terus menerus hadir mengisi kekosongan dan kekurangan manusia menuju satu perbaikan yang terus menerus. Tidak ada yang mampu melawan kekuatan hukum alam, tidak ada yang kuasa menghindar dari *Sunatullah*.

Dunia bagaikan menuju satu babak baru yang universal, menuju satu kesatuan, tidak saja dalam bidang ekonomi dan keuangan yang semakin terintegrasi, namun juga merambah ke berbagai bidang kehidupan. Slogan-slogan seperti demokratisasi, hak asasi manusia, dan pengakuan berbagai standart internasional semakin mengukuhkan proses tersebut, seakan tak ada satu kekuatanpun yang mampu membendunginya.

Meskipun begitu jauh kemajuan yang telah dicapai manusia, namun banyak celah dan sisi yang perlu dicermati sehingga tidak menjadikan manusia begitu saja larut dalam pesona perkembangan teknologi dan kehidupan masyarakat modern. Hal inilah barangkali yang mendasari para pengkritik kehidupan manusia di jaman modern. Banyak pihak yang justru dengan secara kritis menelaah pengaruh kemajuan tersebut terhadap hakikat kehidupan manusia itu sendiri. Suatu realitas yang perlu dipahami, karena bagaimanapun

kemajuan yang telah dicapai selama ini ternyata juga membawa banyak pengaruh negatif yang secara perlahan tetapi pasti telah mendorong manusia menuju titik kemunduran dalam sendi-sendi kemanusiaan itu sendiri. Telah banyak dilakukan suatu studi kritis yang mencoba menggugat paham yang telah menghegemoni kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia ini, baik yang berupa kajian filosofis, teoretis maupun dalam tataran praktis dengan sistem dan praktek yang lebih “manusiawi”.

Krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi yang dimulai dari kawasan Asia Tenggara di penghujung abad ke-20 mulai dari Thailand, Malaysia, Korea, Indonesia dan hampir semua negara di kawasan ini, dengan didahului beberapa krisis keuangan di beberapa negara dalam dua dekade terakhir, telah memberikan banyak pelajaran berharga. Kejadian tersebut sekaligus menyadarkan banyak orang dan dalam lingkup yang lebih makro menyadarkan banyak negara, terutama bagi negara-negara yang mengalaminya, bahwa ternyata ekonomi liberal Kapitalis yang berbasis tingkat bunga masih menyimpan potensi terjadinya krisis dan banyak kelemahan.<sup>1</sup> Seperti Apa yang dicatat oleh Bank for International Settlements (BIS) :

*The international financial system has experienced a number of crises over the last two decades. There is not a single geographical area or major country that has been spared the effect of the crises. In general the early warning indicators such as*

---

<sup>1</sup> Beberapa rentetan krisis selama dua dekade terakhir diantaranya yang penting adalah krisis pasar saham USA pada bulan Oktober 1987, ledakan pasar saham dan properti di tahun 1990-an, kejatuhan EERM (*European Exchange Rate Mechanism*) dalam tahun 1992-1993, krisis Meksiko tahun 1995, Krisis Asia Timur dan Tenggara tahun 1997, Krisis di Rusia tahun 1998, terjadinya *breakdown of the US hedge funds* tahun 1998 serta krisis nilai tukar di Brasil tahun 1999. Lihat M Umer Chapra, 2000, *Alternative Visions of International Monetary Reform*, paper presented at The fourth International Conference On Islamic Economics and Banking, Loughborough University, UK. 13-15 Agustus 2000. hlm. 433.

*interest rate spreads and credit ratings have proved to be in effective in predicting the crises.* (BIS,1999a, 56) dalam Chapra (2000, 433)

Islam, sebagai sebuah peradaban besar yang selama beberapa abad belum mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam percaturan dunia, seperti mendapat momen yang tepat untuk bangkit dari tidurnya, ditandai dengan munculnya berbagai gerakan pembaharuan di mana-mana dan dalam berbagai bidang di penghujung abad kedua puluh. Berbagai kajian mulai dilakukan secara intensif dan mendalam dalam konteks dan metodologi yang modern.

Islam selain sebagai agama, ternyata memiliki paradigma dan konsepsi tersendiri dalam memandang dunia ini. Tidak seperti dalam masyarakat barat yang kebanyakan sekuler, Islam tidak memisahkan agama sebagai urusan individu dengan urusan publik karena pandangannya yang holistik dan integral sebagai *the way of life*. Hal ini juga mencakup corak Islam dalam aktivitas ekonominya, yang secara mendasar berbeda dengan ekonomi liberal dan secara perlahan mencoba menggali dasar-dasar filosofis dari Al Qur'an dan Hadits serta sumber hukum lain yang diperbolehkan dalam hukum (*fiqh*) ke dalam suatu bentuk teori praktis.

Permasalahan ekonomi, sebagaimana kita ketahui, sangat penting dan seringkali menjadi perhatian utama dalam setiap peradaban. Sejarah menunjukkan bahwa tidak jarang pertikaian yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia bermula dari masalah ekonomi. Dalam perkembangannya, dimensi ekonomi memiliki dinamika sendiri sampai menjadi sebuah disiplin ilmu, dan bahkan telah terbagi lagi menjadi bermacam-macam spesialisasi mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dimulai dari masyarakat yang paling sederhana, dengan menggunakan sistem barter sampai pada masyarakat yang menggunakan uang. Penggunaan uang sebagai alat tukar ini juga mengalami perkembangan seiring kemajuan perekonomian hingga sampai pada suatu pembentukan sistem yang mengatur penggunaan dan kebutuhan

uang oleh masyarakat serta transaksi ekonomi pada umumnya yang sekarang kita sebut sebagai sistem moneter.

Tulisan ini mencoba menggambarkan sekaligus membandingkan beberapa bentuk dan konsepsi dalam kerangka pembentukan teori praktis dalam masyarakat Kapitalis di satu sisi dan masyarakat Islam di sisi lain. Mengingat apa yang akan dibahas berkaitan dengan sistem moneter maka tulisan inipun difokuskan pada konsep sistem moneter. Diharapkan dari hasil perbandingan teori meskipun dalam tataran epistemologi, baik dari Kapitalisme maupun Islam yang berdasarkan syariah, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan masing-masing. Mengingat sistem moneter Islam masih relatif baru dan belum digunakan secara universal, namun konsepsi ini dapat diuji secara teoretis dengan metode ilmiah yang ada sebagai suatu sistem alternatif. Di sini tidak akan dibahas bagaimana hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar sistem moneter sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam akan menjadi sistem yang tentatif.

Cirebon, Februari 2015

**Ayus Ahmad Yusuf**



# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I Epistemologi Kapitalis.....</b>	<b>1</b>
1.1 Definisi Epistemologi.....	2
1.2 Pengetahuan.....	4
1.3 Kapitalisme dalam tinjauan Epistemologi.....	6
<b>BABII Epistemologi Islam.....</b>	<b>19</b>
<b>BABIII Sistem Ekonomi Kapitalis.....</b>	<b>25</b>
3.1 Kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi.....	25
3.2 Pilar-pilar ekonomi kapitalisme.....	31
<b>BABIV Sistem Moneter Kapitalis.....</b>	<b>39</b>
4.1 Konsep dasar uang.....	40
4.2 Teori Bunga.....	45
4.3 Peranan Perbankan.....	49
4.4 Bank Sentral.....	53
4.5 Kebijakan Moneter.....	55
<b>BAB V Sistem Ekonomi Islam.....</b>	<b>61</b>
5.1 Ekonomi Islam.....	61
5.2 Sumber Ekonomi Islam.....	65
5.3 Penerapan Syariah Islam di bidang ekonomi.....	67
5.4 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	69
5.5 Transaksi dalam Islam.....	73
5.6 Pemikiran ekonomi islam kontemprer.....	78
<b>BAB VI Sistem Moneter Islam.....</b>	<b>83</b>
6.1 Peranan uang dalam ekonomi islam.....	83
6.2 Konsep dasar keuangan dalam islam.....	87
6.3 Teori uang dalam islam.....	90
6.4 Perbankan Islam.....	97

6.5	Bank Sentral Islam.....	100
6.6	Kebijakan moneter dalam perekonomian islam.....	105
 <b>BAB VII Beberapa Pandangan &amp; Kritik.....</b>		<b>111</b>
7.1	Kritik terhadap kapitalisme.....	111
7.2	Kritik terhadap Modernisme.....	114
7.3	Kritik kaum posmodernisme.....	117
7.4	Kritik terhadap landasan ekonomi kapitalis.....	127
7.5	Kritik terhadap sistem ekonomi & moneter Islam.....	130
 <b>BAB VIII Tinjauan Komparatif Sistem Moneter.....</b>		<b>135</b>
8.1	Konsep permintaan & penawaran uang.....	136
8.2	Bunga & Riba.....	139
8.3	Masalah Perbankan.....	142
8.4	Bank Sentral.....	147
8.5	Kebijakan Moneter.....	148
 Daftar Pustaka		 151
Tentang Penulis		155

# BAB 1

## Epistemologi Kapitalis

\*

Sebagaimana fungsinya, epistemologi Kapitalis dan Islam akan membentuk teori-teori berdasarkan sudut pandang masing-masing, tidak terkecuali sistem ekonomi dan moneter yang akan kita bahas dalam bab-bab berikut. Oleh karena itu sebelum melangkah jauh ke sistem moneter, ada baiknya kita memahami dahulu apa yang menjadi basis paradigma terbentuknya sistem tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena untuk mendekati suatu permasalahan yang dilihat dengan kaca mata yang berbeda, kita harus mengerti terlebih dahulu apa warna kaca mata yang digunakan, agar obyek yang kita lihat menjadi lebih jelas dan mudah diidentifikasi. Demikian halnya dengan sistem moneter yang merupakan bagian dari sistem ekonomi dan dalam perspektif yang lebih luas merupakan salah satu aspek ideologi.

Menelusuri pendapat Van Peursen (1990) dalam Djoko Suharjanto (2000), dijelaskan bahwa semua pengetahuan kita merupakan suatu “coba-coba”, sehingga kita harus belajar dari kesalahan. Karena itu ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang relatif dan tentatif, bukan absolut, dimana masih terbuka jalan untuk diperdebatkan dan membuka kemungkinan pendekatan yang lain. Atas dasar inilah Archis J Bahm (1982) dalam Djoko Suharjanto (2000) berpendapat bahwa seorang ilmuwan haruslah mempunyai watak spekulatif, dengan pengertian bahwa seorang ilmuwan harus selalu mencoba menyelesaikan masalahnya dengan berbagai pendekatan. Karena itu harus dipenuhi tiga landasan ilmu pengetahuan untuk menjawab hakekat ilmu. Ketiga landasan tersebut adalah ontologi (*how to see the world*), epistemologi (*how to get knowledge*), dan aksiologis (*usefull*).

Menurut Gaffikin (1998) ada beberapa asumsi ontologis yaitu realisme, nominalisme, konseptualisme, idealisme/spiritualisme dan materialisme. Dalam pandangan realisme, dunia merupakan suatu hal yang kongkrit dan obyektif. Nominalisme berpandangan bahwa dunia tidak universal, tetapi meliputi entitas-entitas seperti ide-ide dan label-label yang secara nyata tidak tampak. Konseptualisme berpandangan bahwa dunia itu universal, tetapi universalitas tersebut berada dalam masing-masing individu. Sedangkan idealisme berasumsi bahwa sesuatu itu ada secara spirit. Materialisme memiliki pandangan yang berlawanan dengan idealisme, dimana menurut paham ini segala sesuatu atau dunia ini kalau dirinci terdiri dari materi dan bukannya spirit. Pandangan ontologis mempengaruhi seseorang dalam memandang dunia sehingga akan mempengaruhi pula cara mendapatkan ilmu atau pengetahuannya. Jadi ontologis merupakan suatu paradigma atau masalah keyakinan seseorang (Djoko Suharjanto,2000,hal.102).

Landasan aksiologis memfokuskan diri pada kegunaan, manfaat atau kemaslahatan dari ilmu pengetahuan. Aksiologis membahas tentang nilai kegunaan suatu ilmu pengetahuan bagi masyarakat, termasuk arti makna bagi kehidupan manusia jika ilmu atau pengetahuan tersebut diterapkan atau digunakan dalam kehidupan. Sedangkan landasan yang ketiga adalah landasan epistemologi, dan pengertian inilah yang akan kita bahas berikut. Dari landasan epistemologi ini kita akan melangkah pada tataran sistem ekonomi dan moneter yang digunakan dalam masyarakat Kapitalis dan Islam.

### **1.1. Definisi Epistemologis**

Ditinjau dari etimologinya, epistemologis berasal dari kata Yunani *epistem* dan *logos*. *Epistem* berarti pengetahuan, sedangkan *logos* berarti teori, uraian, atau alasan, dan dalam pengertian filsafat pengetahuan, *logos* lebih tepat

diartikan sebagai teori. Jadi epistemologis dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan, atau *theory of knowledge*. Dagobert D. Runes dalam Amin (1983) menulis asal kata *epistem* ditambah *logos*, dan menarik rumusan epistemologis sebagai berikut :

“ Epistemologis sebagai cabang filsafat yang menyelidiki tentang keaslian pengertian, struktur, metoda dan validitas ilmu pengetahuan”.

Sedangkan Prof. Dr. Harun Nasution dalam Amin (1983) dengan bukunya “Filsafat Agama” memberi pengertian yang berbeda tentang istilah epistemologis. Epistem berarti pengetahuan sedangkan epistemologis adalah ilmu yang membahas tentang :

- a) apa itu pengetahuan
- b) bagaimana cara memperoleh pengetahuan.

Ditinjau dari terminologinya, ada beberapa definisi dari epistemologi seperti yang diuraikan oleh Amin (1983). Dalam diktat kuliah karangan R.B.S. Fudyartanto, dirumuskan : Epistemologi berarti ilmu filsafat tentang pengetahuan, atau, dengan pendek kata, filsafat pengetahuan. Sedangkan Antun Suhono memberikan definisi epistemologi sebagai teori mengenai hakekat ilmu pengetahuan, yaitu bagian dari filsafat yang membahas tentang *refleksi manusia atas kenyataan*. Sementara itu A.H. Bakker mempersamakan epistemologi dengan metodologi karena menganggap metodologi sebagai filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan yang dimaksudkan di sini menguraikan metode ilmiah sesuai dengan hakekat pengertian manusia di mana terdapat kategori-kategori umum yang hakiki bagi segala pengertian sehingga berlaku pula bagi semua ilmu.

Dari beberapa definisi dan pengertian yang telah diuraikan di atas maka bisa dipahami secara sederhana bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengertian dan cara mendapatkan pengetahuan yang akan membentuk suatu teori.

## 1.2. Pengetahuan

Uraian singkat tentang epistemologi tersebut di atas, mengisyaratkan suatu hubungan yang erat antara manusia dengan pengetahuan. Rapar (1996) mengartikan pengetahuan sebagai suatu kata yang digunakan untuk menunjuk kepada apa yang diketahui oleh seseorang tentang sesuatu. Jika seseorang pergi ke suatu tempat dan setelah datang ke tempat asal lalu dia menceritakan tentang tempat yang baru dikunjunginya, berarti apa yang diciturkannya adalah pengetahuannya tentang tempat tersebut. Kitapun memiliki pengetahuan tentang bermacam-macam warna, dan nama benda-benda di sekitar kita.

Pengetahuan senantiasa memiliki subyek, yaitu yang mengetahui, karena kalau tidak ada yang mengetahui, tidak mungkin ada pengetahuan. Jika ada subyek, tentu ada obyek, yaitu sesuatu yang kita ketahui atau hendak kita ketahui, tanpa obyek, tidak mungkin juga ada pengetahuan.

Lebih lanjut, Rapar (1996) membagi pengetahuan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Pengetahuan biasa (*ordinary knowledge*). Pengetahuan ini terdiri dari pengetahuan nir-ilmiah dan pra-ilmiah. Pengetahuan nir-ilmiah adalah hasil penyerapan dengan indera terhadap obyek tertentu yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk pula pengetahuan intuitif. Pengetahuan pra-ilmiah merupakan hasil pencerapan indrawi dan pengetahuan hasil pemikiran rasional yang tersedia untuk diuji lebih lanjut kebenarannya dengan menggunakan metode –metode ilmiah.

2. Pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*). Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kebenaran yang hendak dicapai dan disebut juga pengetahuan sains.
3. Pengetahuan filsafati (*philosophical knowledge*). Pengetahuan filsafati diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, penafsiran, spekulasi, penilaian kritis, dan pemikiran-pemikiran yang logis, analitis, dan sistematis. Pengetahuan ini berkaitan dengan hakikat, prinsip dan asas dari seluruh realitas yang dipersoalkan selaku obyek yang hendak diketahui.

Verhaak dan Haryono (1989;7-8) memiliki pandangan sendiri mengenai pengetahuan manusia dan membuat ringkasan sebagai berikut :

Kesatuan asasi antara subyek dan obyek dalam gejala pengetahuan manusia menjadi nampak dalam pengarahannya bawaan manusia untuk bertanya dan mencari tentang dirinya di dunia serta tentang dunia itu sendiri. Pertanyaan itu tiada batasnya, dan setiap jawaban menimbulkan pertanyaan lebih anjutan, lebih mendalam dan lebih menyeluruh lagi. Pengetahuan manusia itu terjadi sesuai dengan susunan kesatuan jiwa raganya yang bersifat rohani. Bentuk pengetahuan yang kongkret maupun abstrak, partikular maupun universal, menjelma dalam bahasa. Bahasa itu sendiri menunjukkan bahwa manusia memasyarakat dan menyejarah dalam tradisi pengetahuan.

Cukup jelas sekarang kaitan antara epistemologi dan pengetahuan. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari seluk beluk pengetahuan dan dari epistemologi inilah pengetahuan lahir berikut hukum-hukum dan teori-teorinya. Berikut kita akan

memasuki epistemologi Kapitalis dan Islam yang mendasari terbentuknya sistem ekonomi dan sistem moneter masing-masing.

### 1.3 Kapitalisme Dalam Tinjauan Epistemologi

#### 2.3.1. Pengertian Kapitalisme

Sampai saat ini, istilah Kapitalisme masih menjadi uraian yang problematik bagi banyak ahli sejarah ekonomi dan sosiologi. Oleh sebab itu kita akan mencari beberapa pendapat tentang Kapitalisme sebagai titik acuan untuk mengerti lebih jauh hakekat sistem ini.

Dalam Tulisannya, Husain (2000)<sup>1</sup> menyebutkan beberapa pengertian Kapitalisme yang diuraikan oleh beberapa ahli, sehingga terbentuk pengertian istilah ini sesuai dengan yang mendefinisikannya. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam barang lainnya (Bagus, 1996). Ebenstein (1990) menyebut Kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan Kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme. Sedangkan Hayek (1978) memandang Kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi. Menurut Ayn Rand (1970), Kapitalisme adalah "*a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned*". (Suatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik dimana semua pemilikan adalah milik privat).

---

<sup>1</sup> Beberapa definisi tentang Kapitalisme yang disebutkan disini diambil dari karya Hussain Heriyanto (2000), dengan menyebutkan sumber sesuai dengan yang memberikan definisi :

1. Bagus L., 1996, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta,
2. Ebenstein, W., 1990, Isme-Isme Dewasa Ini, (terjemahan), Erlangga, Jakarta
3. Hayek, F.A., 1978, The Principles of A Liberal Social Order, dalam Anthony de Crespigny and Jeremy Cronin, Ideologies of Politics, Oxford University Press, London
4. Rand, A., 1970, Capitalism: The Unknown Ideal, A Signet Book, New York
5. Heilbroner, 1991, R.L., Hakikat dan Logika Kapitalisme, (terjemahan), LP3ES, Jakarta.
6. Habermas, J., 1988, Legitimation Crisis, Polity Press, Cambridge Oxford



Heilbroner (1991) secara dinamis menyebut Kapitalisme sebagai formasi sosial yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historis-unik. Logika formasi sosial yang dimaksud mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari suatu masyarakat. Istilah "formasi sosial" yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini juga dipakai oleh Jurgen Habermas. Dalam *Legitimation Crisis* (1988), Habermas menyebut Kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial yaitu primitif, tradisional, Kapitalisme, post-Kapitalisme. (Huusain Heriyanto, 1999)

### **2.3.2. Akar Historis Kapitalisme dan Pengaruh *Renaissance***

Sebelum menjadi bentuknya yang sekarang ini, Kapitalisme telah melewati suatu proses yang sangat panjang dengan mereduksi dan menggabungkan berbagai pemikiran dan kebudayaan dalam penyesuaiannya. Pada umumnya bagaimana dan apa sebenarnya Kapitalisme masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli. Namun di sini tidak perlu diuraikan masing-masing pendapat mengenai perbedaan tersebut karena hal tersebut bukanlah menjadi tujuan utama penulisan ini. Salah satu pendapat yang cukup menarik mengenai bagaimana asal-usul Kapitalisme ini dapat kita telusuri dalam uraian Medhy tentang pemikiran Kebudayaan Postmodern Menurut Jean Baudrillard<sup>2</sup>. Pemikiran tersebut terangkum dalam sebuah deskripsi seperti tersebut di bawah ini.

Tempat bermulanya cerita besar tentang penaklukan alam oleh manusia dimulai di Miletos, sebuah kota kecil di gugusan kepulauan Yunani abad ke-6 SM. Di kota itulah bermula runtuhnya mitos-mitos tentang alam yang berupa

---

<sup>2</sup>Medhy Aginta Hidayat, 2001, Kebudayaan Postmodern Menurut Jean Baudrillard, bagian 1.

dongeng, fabel ataupun kepercayaan. Kita ketahui kehidupan orang pada jaman dahulu penuh dengan mitos-mitos dan dongeng yang begitu kuat mencengkeram pemikiran manusia terhadap alam semesta ini. Sejak saat itu manusia serta-merta memberontak dari kungkungan kebudayaan mitologis dan berusaha menggunakan akalnya untuk menjelaskan dunia.

Sejarah penaklukan alam dibawah kekuatan pikiran manusia mulai bergulir. Sokrates, filsuf besar Yunani, mempertegas usaha ini dengan sembojannya yang sangat terkenal, "*Kenalilah dirimu sendiri*". Semboyan ini memiliki makna yang dalam pada waktu diciptakan. Karena dari sini lah manusia mulai menjelajah dunianya sebagai manusia, dan tumbuh kesadaran bahwa dia bukan hanya obyek yang dipermainkan oleh alam, tapi sekaligus juga subyek yang bisa mempengaruhi irama alam.

Salah seorang murid Sokrates, Plato, seraya menggemakan pemikiran sang guru, menarik garis lebih tajam mengenai konsep manusia. Menurut Plato, manusia terdiri dari tiga tingkatan fungsi yakni, tubuh (*epithymia*), kehendak (*thymos*) dan rasio (*logos*). Rasio adalah tingkatan tertinggi, sekaligus mengatur dan melingkupi fungsi-fungsi yang lain. Pandangan Plato tentang manusia ini membawanya pada konsepsi negara ideal yang analog dengan tingkatan fungsi dalam diri manusia. Pertama, para pemimpin (analog dengan rasio). Kedua, para prajurit (analog dengan kehendak). Ketiga, para petani dan tukang (analog dengan tubuh) (Harun Hadiwijono, 1994: 43-44). Dengan konsepsi seperti ini Plato memperteguh keyakinan subjektivitas manusia dengan konstruksi kebudayaan (negara) yang berpijak pada rasio.

Perkembangan filsafat bergulir sampai pada satu titik tolak yang memiliki makna penting bagi kelahiran era modern. Gerakan humanisme Italia abad ke-14 M telah memacu lahirnya Renaisans sebagai jawaban terhadap kejumudan dan kebekuan pemikiran abad pertengahan. Renaisans yang berarti kelahiran kembali, membawa semangat pembebasan dari dogma agama yang

beku selama abad pertengahan. Kebebasan tersebut terekspresikan dalam berbagai bentuk seperti keberanian menerima dan menghadapi dunia nyata; keyakinan menemukan kebenaran dengan kemampuan sendiri; kebangkitan mempelajari kembali sastra dan budaya klasik; serta keinginan mengangkat harkat dan martabat manusia (Harun Hadiwijono, 1994: 11-12). Makna pentingnya renaissans dalam sejarah filsafat barat adalah peranannya sebagai tempat persemaian benih pencerahan abad ke-18 M yang menjadi embrio kebudayaan modern.

Seorang filsuf besar yang menjejakkan pengaruhnya pada masa ini adalah Rene Descartes, bapak rasionalisme, sekaligus arsitek utama filsafat modern. Dengan mengadopsi dan mensintesisakan pemikiran filsuf-filsuf sebelumnya, Descartes berambisi membangun metode pengetahuan yang berlaku untuk setiap bentuk pengetahuan. Menurutnya, kepastian kebenaran dapat diperoleh melalui strategi "kesangsian metodis". Dengan meragukan segala sesuatu, Descartes ingin menemukan adanya hal yang tetap yang tidak dapat diragukan. Itulah kepastian bahwa "*Aku sedang ragu-ragu tentang segala sesuatu*". Rumusan terkenal dari pemikiran Descartes ini adalah diktum, *Cogito ergo sum*, "Aku berpikir maka aku ada". Dengan diktum ini, rasio sekali lagi diyakini mampu mengatasi kekuatan metafisis dan transendental. Kemampuan rasio inilah yang menjadi kunci kebenaran pengetahuan dan kebudayaan modern.

Seperti yang ditulis Medhy (2000), Ahmad Sahal (1994) menguraikan sejarah kematangan kebudayaan modern selanjutnya ditunjukkan oleh pemikiran dua filsuf Jerman, Immanuel Kant dan Friederich Hegel. Melalui kedua pemikir inilah nilai-nilai modernisme ditancapkan dalam alur sejarah dunia. Kant dengan ide-ide absolut yang sudah terberi (kategori). Hegel dengan filsafat identitas atau lebih dikenal sebagai idealisme absolut. Konstruksi kebudayaan modern kemudian tegak berdiri dengan prinsip-prinsip rasio,

subjek, identitas, ego, totalitas, ide-ide absolut, kemajuan linear, objektivitas, otonomi, dan emansipasi.

Sementara itu dalam dunia ilmu dan kebudayaan, modernitas ditandai dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, penemuan teori-teori fisika kontemporer, kejayaan Kapitalisme lanjut, konsumerisme, merebaknya budaya massa, budaya populer, maraknya industri informasi seperti televisi, koran, iklan, film, internet, berkembangnya konsep *nation-state* (negara-bangsa), demokratisasi dan pluralisme.

Namun dalam penampilannya yang mutakhir tersebut, modernisme mulai menampilkan hal-hal yang barangkali tidak terpikirkan pada mulanya yang penuh kontradiksi, ideologis dan justru melahirkan berbagai patologi modernisme. Modernisme inilah, menurut Ariel Heryanto (1994), dalam Medhy (2000), yang telah mencapai status hegemonis semenjak kemenangan Amerika dan para sekutunya dalam Perang Dunia II yakni modernisme yang tidak lagi kaya watak seperti saat awal kelahirannya, namun modernisme yang bercorak monoton, positivistik, teknosentris dan rasionalistik; modernisme yang yakin secara fanatik pada kemajuan sejarah linear, kebenaran ilmiah yang mutlak, kecanggihan rekayasa masyarakat yang diidealkan, serta pembakuan secara ketat pengetahuan dan sistem produksi.

Adalah wajar jika ada yang mempertanyakan kembali unsur-unsur utama modernisme yaitu rasio, ilmu dan antropomorfisme, yang dapat menyebabkan reduksi dan totalisasi hakekat manusia. Di satu sisi modernisme telah memberikan sumbangannya terhadap bangunan kebudayaan manusia dengan paham otonomi subjek atau manusia yang mandiri, kemajuan teknologi, industrialisasi, penyebaran informasi, penegakan hak asasi manusia, serta demokratisasi. Namun di sisi lain, modernisme juga telah menyebabkan lahirnya berbagai patologi: dehumanisasi, alienasi, diskriminasi, rasisme, pengangguran, jurang perbedaan kaya dan miskin, materialisme, konsumerisme,

ancaman nuklir dan hegemoni budaya serta ekonomi. Namun perlu ditegaskan disini bahwa berbagai hujatan, kontradiksi pendapat, kelemahan dan kritik terhadap modernisme tersebut bukanlah menjadi bahasan yang utama dalam bab ini.

Gerakan *renaissance* telah merubah banyak hal dalam dunia ilmu pengetahuan di abad pertengahan. Saat itu merupakan tonggak dan titik tolak historis pembebasan ilmu dari belenggu penguasa dan gereja., yang dinyatakan oleh Kant sebagai pembebas manusia dari keadaan tutup mulut dan berani menggunakan akal nya dalam segala macam persoalan secara terbuka. Orang mulai dengan kesadaran, bahwa situasi dan gereja tidak lagi merupakan kodrat yang tidak berubah, tetapi adalah hasil kebebasan manusia itu sendiri. Disamping itu berkembang pula privatisasi agama, dimana dianggap merupakan urusan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan urusan politik dan kemasyarakatan atau yang lebih dikenal sebagai gejala sekulerisme.

Mulailah gereja terisolir dari masyarakat dan oleh manusia ditolak campur tangannya dalam kehidupan sosial, kebudayaan dan politik.

Salah satu ciri khas kehidupan intelektual masa itu adalah optimismenya yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, sehingga keselamatan manusia seakan dapat disandarkan dari itu dan bukan dari Tuhan.. Manusia mulai merasa bahwa eksistensinya adalah segala-galanya. Semua rahasia alam dapat disingkapkan asal saja dilakukan penyelidikan ilmiah yang cukup lama dan mendalam.

Cukup menarik apa yang dikatakan George Brandes, bahwa pada abad ke-17 manusia mempercayai agama kristen, sebagai simbol pemikiran transendental, pada abad ke-18 mereka menolak dan membasminya dan pada abad ke-19 mereka menonton dari luar dan memperhatikan dengan iba, sebagaimana orang melihat benda-benda sejarah dalam musium (Mulkan, 1986, hal. 14).

Manusia mulai menjauh hubungannya dengan spiritual dan hingga pada abad duapuluh telah banyak manusia yang menjadi begitu tergantung pada teknologi yang diciptakannya sendiri seolah-olah manusia melakukan pembunuhan terhadap diri sendiri secara perlahan-lahan tanpa mereka sadari dan sulit keluar dari masalah tersebut. Dari sini banyak pertanyaan yang mulai muncul tentang untuk apakah ilmu pengetahuan dan teknologi diciptakan, untuk kemanusiaan atau untuk memenuhi kepuasan dan kepentingan kelas tertentu saja? Namun dari hasil perpaduan berbagai pemikiran dan perkembangannya tersebut Kapitalisme mencapai bentuknya seperti yang kita amati sekarang.

### 2.3.3. Sejarah Perkembangan Kapitalisme

Dari uraian di atas sedikit kita ketahui bagaimana akar historis Kapitalisme dibentuk. Namun demikian sebagai sebuah ideologi besar, Kapitalisme masih tergolong muda. Kapitalisme telah mendominasi diskursus dan perdebatan yang sengit ketika mendapat kritik yang sangat keras di abad XIX sampai akhir abad XX yaitu sosialisme. Namun, sebagaimana yang telah disinggung di muka, apa sebenarnya Kapitalisme itu sendiri masih mengundang banyak pertanyaan. Catatan sejarah perkembangan Kapitalisme itu sendiri sampai saat ini masih merupakan uraian yang problematik. Walaupun ada sedikit kesepakatan tentang titik awal penggunaan istilah Kapitalisme, yang digunakan untuk merujuk pada suatu sistem perekonomian di Eropa – namun sejarawan terkemuka sekelas Fernand Braudel pun – yang menulis *civilization and capitalism* dalam tiga jilid untuk mengupas Kapitalisme- tidak memberikan informasi yang pasti tentang asal mula dan perkembangan fase-fase Kapitalisme. (Setyabudi, 1999, 91)

Informasi yang lebih berharga dapat ditemukan dalam uraian Dillard tentang asal-usul Kapitalisme (Rahardjo,1987)<sup>3</sup>. Yang menyatakan bahwa meskipun sebagai sistem dunia, Kapitalisme baru berkembang pada abad XVI, namun dalam kurun waktu sebelumnya telah terdapat embrio lembaga-lembaga Kapitalis yang berkembang pada akhir abad pertengahan. Secara lengkap Dillard membagi Kapitalisme dalam fase-fase sebagai berikut.

Pertama Kapitalisme Awal (1500-1750) yaitu Kapitalisme di Inggris selama abad XVI-XVIII yang digambarkan bertumpu pada industri sandang, di mana pabrik-pabrik pemintalan dan industri tekstil mulai menggunakan mesin-mesin sederhana. Perkembangan pesat industri-industri tersebut selama abad XVI sampai XVII merupakan prestasi yang spektakuler dengan penggunaan surplus ekonomi secara produktif yang membedakannya dengan sistem-sistem ekonomi sebelumnya. Berbeda dengan masa feodal ketika surplus digunakan untuk membangun simbol-simbol ekspresi kemewahan yang konsumtif.

Fase Kedua adalah fase Kapitalisme Klasik (1750-1914) yaitu ketika perkembangan Kapitalisme mulai ditandai dengan perubahan dari bentuk-bentuk perdagangan ke industri. Fase ini adalah masa awal perdagangan berbasis teknologi dalam bentuk industri-industri komoditas massal. Revolusi industri adalah momentum dari dominasi modal perdagangan menuju modal industri, ketika akumulasi modal yang simultan dari beberapa abad mulai menampakkan hasilnya pada abad XVIII. Kapitalisme berkembang menjadi motor kemajuan teknologi karena tumpukan modal memungkinkan dihasilkan dan dimanfaatkannya penemuan-penemuan baru. Terjadilah gelombang

---

<sup>3</sup> Uraian yang lebih lengkap tentang Kapitalisme dapat dilihat dari, M. Dawam Rahardjo (ed), 1987, *Kapitalisme dulu dan sekarang*, LP3ES, Jakarta. Dalam bukunya terdapat beberapa karya tentang Kapitalisme dari beberapa penulis seperti tentang Kapitalisme modern, Kapitalisme historis, Kapitalisme mutakhir dan beberapa karya lain.

penerapan praktis ilmu pengetahuan teknis yang telah dibangun selama beberapa abad. Pada masa inilah terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara penemu dan pengusaha yang saling membutuhkan untuk memproduksi secara massal yang baru berteknologi tinggi.

Seperti yang dikatakan oleh Budiman (1997, dalam Hendri, 1999), fase inilah yang sering disebut sebagai Kapitalisme dengan semangat *laissez faire* yang diturunkan dari ajaran Adam Smith atau lebih dikenal sebagai masa klasik Kapitalisme Liberal. Menurut Dillard, berbeda dengan fase sebelumnya, Kapitalisme pada masa ini benar-benar berpusat diseperti kategori-kategori ekonomis. Berkat keberhasilan Kapitalisme dalam mengangkat kaum borjuis pada posisi penting dalam struktur sosial masyarakat, selanjutnya menghasilkan pula kekuatan politis, hingga pada gilirannya mampu mendukung suatu peradaban yang semakin menguntungkan proses perkembangan Kapitalisme. Para industrialis di Inggris yang pada masa sebelumnya telah memperoleh kekuatan dari hasil akumulasi modal, akhirnya memperoleh konsesi perdagangan bebas yang merupakan faktor utama yang memperbesar Kapitalisme liberal, hingga memperkukuh posisi mereka di dunia bisnis.

Fase ketiga (1914- ) yang disebut Dillard sebagai Kapitalisme lanjut. Pada masa ini Kapitalisme mulai memasuki fase yang tidak bisa lagi dikatakan tradisional, artinya tidak bisa ditandai hanya dari segi ekonomis oleh arus-arus perdagangan bebas, melainkan dapat dilihat pula adanya peningkatan aturan-aturan pasar yang dikendalikan oleh segelintir perusahaan berskala besar dan campur tangan oleh negara. Budiman (1997) dalam Hendri (1999) menyebut fase ketiga dari Dillard ini sebagai fase Kapitalisme Monopolis. Kapitalisme dengan demikian telah mengakhiri masa Kapitalisme liberal. Kebebasan pasar (*the primacy market*) digantikan oleh kendali perusahaan-perusahaan besar (*the primacy of control*). Pemilikan (*ownership* atau *private property*) telah dilebur menjadi kekuasaan ekonomis perusahaan-perusahaan multinasional. Sistem



pekerjaan bebas yang masih bisa berlangsung di masa Kapitalisme liberal karena individu sedikit banyak masih tergantung pada pemilikan, kini telah terhapus perlahan-lahan digantikan oleh sistem kerja upahan yang dalam satu sudut terkesan mekanis dan lebih jauh lagi ada unsur paksaan, artinya orang terpaksa menerima pekerjaan yang belum tentu menjadi pilihannya.

Fase ini juga ditandai oleh bergesernya hegemoni Kapitalisme dari Eropa ke Amerika Serikat dan bangkitnya perlawanan bangsa-bangsa Asia dan Afrika terhadap kolonialisme Eropa. Sementara itu revolusi Rusia tampil ke depan menentang keunggulan organisasi ekonomi Kapitalisme sebagai sebuah sistem produksi sekaligus membongkar institusi utama Kapitalisme berupa pemilikan pribadi atas sarana produksi, meruntuhkan struktur kelas sosial, bentuk pemerintah serta agama yang sebelumnya telah mapan. Bukan sekedar itu, ideologi persaingan bebas yang telah menjadi konsensus awal abad XX akhirnya harus mengakui telah diruntuhkan pula oleh perang dan sisa-sisanya.

Namun ada juga yang memandang bahwa sebegitu jauh uraian Dillard telah ketinggalan jaman, karena deskripsinya hanya menyentuh perkembangan Kapitalisme hingga paruh pertama abad XX. Bagaimanapun penting dicermati bahwa telah terjadi pergeseran bentuk Kapitalisme yang cukup berarti pada beberapa dekade akhir abad XX. Gagasan tentang ini terutama berasal dari Clauss Offe<sup>4</sup>. Menurut Offe terdapat suatu kondisi disharmoni yang mencolok antara institusi representasi politik dalam sebuah sistem demokrasi dan berbagai persyaratan yang dituntut demi profit kapital dan reproduksi akibat perbedaan kepentingan keduanya. Offe menengarai bahwa prosedur-prosedur, pola-pola organisasi dan berbagai mekanisme institusional yang diandaikan mampu menghubungkan dan memelihara suatu harmoni dinamis antara kekuasaan

---

<sup>4</sup> Offe melontarkan pemikiran kontroversialnya tentang *disorganized capitalism*. Bagi Offe, Kapitalisme abad ke-20 akhir telah berkembang begitu rupa hingga jauh dari yang digambarkan oleh *organized capitalism* atau Kapitalisme monopolis. Demikian yang dinyatakan oleh Budiman (1997,68-69) dalam Hendri (1999), hlm. 103.

sosial dan otoritas politik-yakni upaya-upaya koheren untuk mengorganisir sistem-sistem sosio-politis Kapitalisme welfare-state kontemporer-secara aktual telah gagal menjalankan fungsinya. Ia selanjutnya mempertanyakan gejala-gejala, konsekuensi, dan berbagai kemungkinan tindakan kuratif bagi kegagalan proses mediasi, yang menurutnya justru kegagalan tersebut semakin mengokohkan era Kapitalisme kontemporer sebagai *disorganized capitalism*.

#### 2.3.4. Kapitalisme dan Positivisme

Dalam banyak literatur sering disebutkan adanya kaitan yang erat antara Kapitalisme, modernisme dan positivisme, sehingga di sini perlu sedikit disinggung hubungan tersebut, terutama hubungan antara Kapitalisme dan positivisme. Awal pemikiran positivisme mengakar dalam tradisi pencerahan yang bermula dari sejumlah pertanyaan kritis mengenai berbagai penghalang ilmu pengetahuan, yaitu tentang elemen-elemen tidak rasional untuk dapat mengerti realita yang sesungguhnya. Bacon dan Descartes memelopori tulisan-tulisan yang bersifat metodologis yang mulai meragukan pendekatan-pendekatan tradisional terhadap ilmu pengetahuan. Bagi Bacon, pengetahuan alam yang observasional tidak berhasil diuraikan tanpa membebaskan diri dari faktor-faktor irrasional yang menutup pemikiran manusia

Inilah kemudian yang membangun orientasi empiris ilmu pengetahuan terhadap alam dan hukum-hukumnya dengan menegasi secara agresif mitos-mitos, baik metafisis maupun teologis, jaman prapencerahan, sebuah tahap awal menghilangkan segala pemikiran irrasional dari manusia. Prinsip-prinsip tersebut kemudian berkembang menjadi dasar ilmu pengetahuan alam, dengan berusaha menjadikan realitas fisik sebagai obyek studinya dengan target memahami hukum-hukumnya.

Sementara itu Descartes memberikan basis filsafat rasionalisnya dengan prinsipnya yang terkenal, *je pens donc je suis, cogito ergo sum*, saya berpikir

maka saya ada. Manusia menjadi subyek berpikir (*res cogitans*) yang berhadapan dengan realitas eksternal yang dipikirkan (*res extensa*). Basis ontologi ini menghasilkan suatu dikotomis terhadap subyek obyek, yang berarti menegaskan supremasi manusia atas alam sebagai obyek penaklukannya. Pemahaman dicapai dengan pandangan yang berjarak dan netral terhadap obyek agar bisa dicapai pengetahuan yang obyektif. Ruang antara subyak dan obyek inilah yang dimediasi oleh ilmu pengetahuan (*ergo*).

Menurut Budiman (1997) seperti yang ditulis oleh Hendri (1999), berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan filsafat yang lebih tua, ilmu pengetahuan empiris sejak jaman Galileo berkembang dalam suatu sistem referensi yang metodologis, yang mencerminkan suatu ambisi penguasaan teknis. Hal inilah yang diadopsi oleh Auguste Comte dalam lapangan ilmu pengetahuan sosial.

Comte berpandangan bahwa dari studi tentang sejarah kecerdasan manusia, dia telah menemukan hukum-hukum universal yang fundamental. Menurutnya, konsepsi dan teori-teori telah melewati tiga tingkatan teori yang berbeda, yaitu teologis atau hal-hal yang mengawang, metafisika atau abstrak, dan ilmiah atau positif. Hukum ini mengumumkan berakhirnya periode metafisika dan dimulainya tingkat baru, dimana konsepsi yang spekulatif digantikan oleh ilmu pengetahuan dan fakta-fakta.

Sejalan dengan pandangan tersebut adalah Emil Durkheim, sosiolog yang diakui sebagai salah satu dari tiga orang pendiri sosiolog modern disamping Max Weber, dan Karl Marx, mencoba membangun dasar-dasar sosiologinya dalam epistemologi positivisme dan membangun basis moralitas sosial dengan metodologi ilmiah. Durkheim memandang bahwa moralitas bukanlah sesuatu yang normatif, melainkan empiris. Dengan melihat moralitas lebih sebagai fakta sosial daripada sekedar nilai-nilai, Durkheim percaya dapat merumuskan aturan-aturan tertentu, mengklasifikasikan, dan menerangkan

moralitas secara induktif, obyektif, rasional dan positivis untuk dapat diimplementasikan dalam masyarakat. Mengutip pernyataannya:

Tak ubahnya dengan para idealis yang memisahkan reaksi psikologis dari biologis, begitu pula kami memisahkan reaksi psikologis dan sosial; satu-satunya penamaan yang kami terima adalah rasionalitas. Bahkan sesungguhnya tujuan utama kami adalah menerapkan lebih lanjut rasionalitas ilmiah itu pada perilaku manusia (Durkheim, 1986, hal.9 dalam Hendri, 1999)

Pernyataan ini semakin memantapkan gelombang positivisme sebagai warisan pencerahan untuk menjadi tema besar dalam wilayah-wilayah ilmu pengetahuan, tidak saja dalam lingkup pengetahuan eksakta, namun juga merambah pada keilmuan sosial, dan bukan sebatas fenomenalitas, tetapi juga menembus batas-batas idealitas manusia.

## ***BAB 2***

### ***Epistemologi Islam***

\*\*

Jika ditinjau dari usianya, peradaban Islam sudah cukup tua. Islam merupakan agama, ideologi sekaligus jalan hidup (*the way of live*) kaum muslimin yang berasal dari Allah SWT. yang disampaikan melalui Rasul-Nya Muhammad SAW. di jazirah Arab. Perkembangan Islam sebagai suatu peradaban dapat dikatakan sangat pesat dimana hanya dalam masa lebih kurang 23 tahun, risalah Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. telah mencapai suatu bentuk budaya dan peradaban yang mendunia.

Dilihat dari etimologisnya, Islam berhubungan erat dengan damai, dalam dan luar. Dua pandangan tersebut tergabung dalam pandangan seorang muslim terhadap idealisme keseimbangan *fikr* dan *dzikr*, *qalb* dan *aql* sebagai *ulil albab* (Hendri, 1999, 133). Ruh sistem Islam adalah pertengahan yang adil, yang dengannya Allah menjadikan ciri khas utama umat ini, sebagaimana firmanNya :

" Demikian pula Kami jadikan kamu sekalian umat yang pertengahan...". ( Al Baqarah:143)

Seorang cendekiawan Islam yang terkenal, Yusuf Qardhawi (1995) menguraikan adanya keseimbangan ini yang tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh Islam diantara individu dan masyarakat, sebagaimana ditegakkannya dalam berbagai pasangan lain seperti dunia dan akhirat, jasmani dan ruhani, idealisme dan fakta, dan lain-lain.

### 2.4.1. Epistemologi Islam

Kebudayaan Islam pada intinya adalah refleksi spirit yang terpancar dari pandangan Islam terhadap alam semesta, yaitu manusia dan kehidupan. Dapat dipahami bagaimana orang Islam memandang kehidupan, di mana cara pandang yang komprehensif terhadap kehidupan tidak akan membuatnya terjebak dalam satu sisi kehidupan. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana Islam memandang masalah ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan secara umum. Pandangan yang komprehensif ini akan menghindari kesempitan pola pikir dan wacana yang akhir-akhir ini sering dialami masyarakat sebagai pengaruh globalisasi dan adanya konsep spesialisasi.

Pandangan hidup Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental yaitu *Tauhid* (keesaan Tuhan), *Khalifah* (*wakil*), dan *'Adalah* (keadilan)<sup>5</sup>. Dalam hal ini *Tauhid* adalah konsep dasar atau konsep yang paling penting karena dua konsep yang lain adalah turunan logikanya. *Tauhid* mengandung implikasi bahwa alam semesta secara sadar dibentuk dan diciptakan oleh Tuhan yang Maha kuasa, yang Esa, yang unik dan oleh karena itu tidak mungkin alam jagad raya ini muncul dengan sendirinya atau secara kebetulan<sup>6</sup>. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan memiliki satu tujuan dan hal inilah yang memberikan makna dari arti eksistensi alam semesta di mana manusia adalah salah satu dari bagiannya (Umar Chapra, 2000,).

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi yang mampu mengatur sumber-sumber daya sebagai amanah dan karenanya bertanggung jawab pada yang menciptakannya. Implikasi manusia sebagai khalifah mengandung makna

---

<sup>5</sup> Tiga pandangan Islam terhadap dunia ini secara baik diuraikan oleh M. Umer Chapra, 1999, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Terjemahan, Nur Hadi Ihsan, dan Rifki Amar, Penerbit Risalah Gusti, Surabaya. Hlm. 217-235.

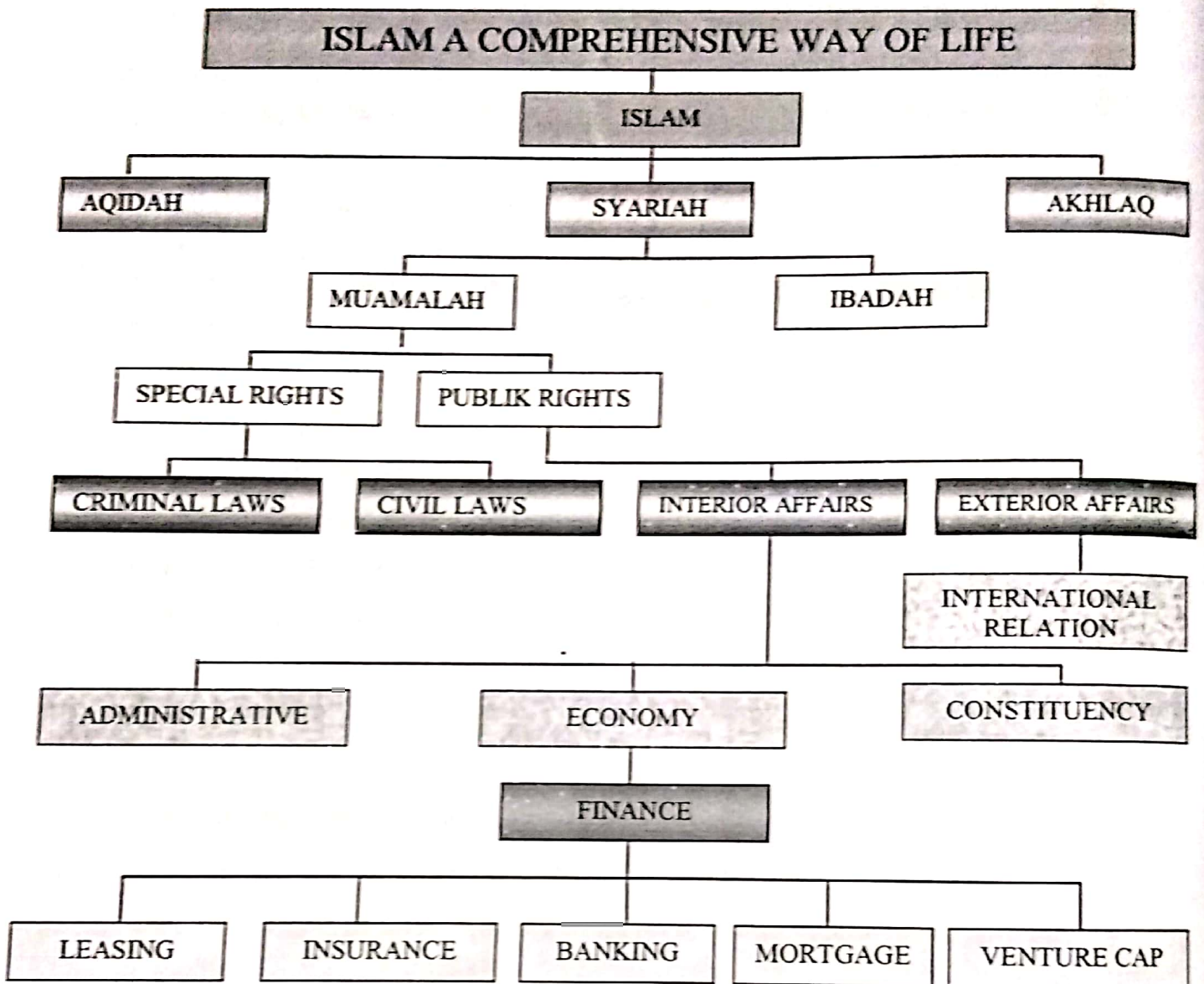
<sup>6</sup> Beberapa Ayat yang menerangkan hal ini diantaranya Surat Ali Imran :191, Shad:27 dan Al-Mu'minin:15. Lihat M.Umer Chapra ,2000, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (terj.) penerbit GIP dengan Tazkia Institut, hlm. 6.

persaudaraan antar manusia yang bisa terwujud hanya bila ada rasa keadilan (*'adalah*) seperti dalam Surat Al Maidah ayat 8 :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Menurut Mannan (1992), konsep Tauhid ini mengandung makna konsep moralitas universal yaitu semua kehidupan adalah tunggal. Karena itu tidak ada bidang kehidupan yang menuntut terpisah dan merdeka dari yang lain, karena pandangan moral dan spiritual manusia yang mengkoordinasi dan menyelaraskan kehidupan manusia dalam segala bidang baik secara individu maupun secara bersama-sama dalam masyarakat. Secara sederhana Antonio (2000) menggambarkan pandangan Islam terhadap kehidupan sampai kepada masalah yang lebih khusus seperti masalah ekonomi dan keuangan tampak dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1. Flow Chart Paradigma Islam Terhadap Ekonomi



Sumber : Zarqa (1959), *al-Fiqh al-'Am: al-Fiqh al-Islamy fi Tsaubih al-Jadid*, dengan tambahan dan modifikasi oleh M. Syafi'i Antonio.

Dari gambar 2.1. dapat dijelaskan, bahwa untuk mencapai tujuan suci dari manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu memanfaatkan bumi dan segala isinya demi kesejahteraan bersama, maka Allah memberikan petunjuk melalui para rasulnya berupa akidah dan akhlak serta syariah. Mengutip pendapat Antonio (2001), dua komponen Islam yaitu akidah dan akhlak bersifat



konstan, yang tidak mengalami perubahan seiring dengan perbedaan waktu dan tempat. Sedangkan syariah dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat. Hal ini diterangkan dalam Al Qur'an dan Hadits :

“...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...” (QS : *Al Maa'idah*: 48).

“ Para rasul tak ubahnya bagaikan saudara seapak, ibunya (syariahnya) berbeda-beda sedangkan dinnya (tauhidnya) satu.” (HR Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad)<sup>7</sup>

Syariah Islam bersifat komprehensif dan Universal yang berarti merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Sedangkan universal berarti bahwa Islam menembus dimensi ruang dan waktu, dapat diterapkan dalam setiap tempat dan waktu.

Dalam hubungannya dengan masalah sosial (*muamalah*), Islam mengatur hak-hak khusus yang terwujud dalam bentuk hukum pidana (*criminal laws*) dan hukum perdata (*civil laws*), serta hak-hak umum yang meliputi urusan dalam negeri dan urusan luar negeri. Bagian urusan luar negeri akan mengatur bentuk-bentuk hubungan dengan negara lain dalam berbagai hal seperti perdagangan, perjanjian kerjasama dan lain sebagainya. Sedangkan bagian urusan dalam negeri mencakup masalah administrasi, ekonomi dan pemilihan. Dalam bagian ekonomi inilah diatur masalah keuangan yang mencakup diantaranya permasalahan sewa guna usaha (*leasing*), asuransi, perbankan, pegadaian, dan menutup peluang spekulasi.

Berkaitan dengan pandangan Islam terhadap Ekonomi dapat dilihat dari pandangan Islam secara menyeluruh. Tujuan dari sebuah sistem ekonomi pada prinsipnya ditentukan oleh pandangannya terhadap dunia, yang

---

<sup>7</sup> Al-Hakimi, A'lamus Sunnah al-Mansyurah (Maktabah as-Suwady, 1998), hlm. 89 dalam M. Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, Jakarta.

mengetengahkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana alam semesta ini muncul serta makna dari tujuan hidup manusia. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan memunculkan jawaban dan membentuk tertib-tertib tersendiri sehingga pada akhirnya akan timbul prinsip kepemilikan, tujuan manusia memiliki kekayaan, hubungan manusia dengan manusia yang lain.(Chapra, 2000; 4) Karena itulah tujuan dan strategi dari setiap sistem ekonomi pada hakikatnya adalah hasil logis dari pandangannya terhadap dunia. Karena itu setiap pembahasan tentang masalah ekonomi Islam, harus terlebih dahulu melihat pandangan hidup Islam dan tujuan-tujuan hidupnya.

Dari uraian dalam bab ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk membentuk suatu sistem diperlukan suatu landasan pola pikir baik berupa teori, doktrin, atau hukum. Sumber ini terbentuk dari pengetahuan manusia yang tersusun secara sistematis membentuk suatu filsafat pengetahuan atau epistemologi. Epistemologi Kapitalisme pada dasarnya terbentuk secara kontinyu lewat hasil pola pikir manusia yang kita sebut sebagai suatu filsafat. Sedangkan epistemologi Islam lebih dibentuk oleh doktrin wahyu Ilahi yang dijabarkan dalam realitas. Suatu paradigma yang berbeda karena berasal dari basis ontologi dan epistemologi yang berbeda dapat saja membentuk suatu aksiologi yang berbeda. Setelah kita pahami pengertian epistemologi serta bentuk aplikasi dalam sistem Kapitalisme dan Islam, maka bab selanjutnya akan memasuki sistem ekonomi dan moneter Kapitalis, dilanjutkan dengan sistem ekonomi dan moneter Islam.

## ***BAB 3***

### ***Sistem Ekonomi Kapitalis***

**\*\*\***

Seperti yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, bahwa sebagai sebuah ideologi besar, Kapitalisme mencakup berbagai bidang kehidupan. Semua bidang-bidang tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sistem ekonomi yang bebas misalnya perlu suatu kondisi sosial politik yang demokratis. Pengakuan hak-hak individu yang tinggi dengan gaya hidup individualisme akan berimplikasi terhadap budaya permisif di satu sisi, dan ikatan sosial yang berkurang di sisi lain. Rasa penghormatan antar pribadi lebih didapat dari saling pengertian terhadap hak-hak masing-masing individu yang besar, daripada karena ikatan emosional yang kuat diantara mereka. Pembahasan terhadap berbagai bidang dalam paham Kapitalis tentu saja akan terlalu luas untuk diutarakan dalam tulisan ini. Bab ini akan memfokuskan pada uraian secara ringkas sistem ekonomi dalam paham Kapitalis.

#### **3.1. Kapitalisme Sebagai Sebuah Sistem Ekonomi**

Sebagai sebuah sistem yang besar, Kapitalisme juga mencakup sistem ekonomi. Sistem ekonomi merefleksikan sejumlah perangkat kepercayaan yang menentukan bagaimana sebuah masyarakat seharusnya diorganisasikan, bagaimana barang-barang dan jasa-jasa seharusnya diproduksi dan bagaimana pendapatan seharusnya didistribusikan. Sebagai bagian dari seperangkat kepercayaan tentu saja sistem ekonomi ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terkandung, atau lebih sederhananya, dipengaruhi oleh budaya dari mana sistem tersebut terbentuk.

Sebagaimana diketahui bahwa masalah mendasar yang dihadapi hampir dalam setiap sistem ekonomi adalah keterbatasan atau kelangkaan sumber daya yang tersedia. Keputusan diperlukan untuk menentukan bagaimana sumberdaya tersebut dialokasikan untuk produksi menjadi bermacam-macam faktor-modal, tenaga kerja dan tanah, mungkin perlu ditambahkan lagi teknologi. Masalah kelangkaan sumber daya ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi yang ingin dipecahkan pada umumnya ada tiga hal :

1. Komoditi apa dan berapa jumlahnya yang harus diproduksi (masalah *what* )
2. Bagaimana cara memproduksi (masalah *how*)
3. Bagi siapa komoditi tersebut diproduksi (masalah *for whom*)

Jika kita membicarakan sistem ekonomi Kapitalisme akan selalu dikaitkan dengan sistem ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Dengan bukunya yang terkenal berjudul "*An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*" atau biasa disingkat "*The Wealth of Nations*" yang diterbitkan tahun 1776. Buku tersebut lazim disebut sebagai standar yang pertama dalam bidang pemikiran ekonomi. Menurut pandangan Djojohadikusumo (1991), pandangan yang mendasari seluruh pemikiran mazhab klasik mengenai masalah-masalah ekonomi dan politik bersumber pada falsafah tentang tata susunan masyarakat yang sebaiknya dan dan sewajarnya berdasarkan hukum alam (*the order of things according to natural law*). Di mana dalam menyangkut masalah ekonomi, manusia selalu terkait dengan peranan dan kepentingan individu.

Risalah terkenal Adam Smith, yaitu *The Wealth of Nations* (1776), diakui sebagai tonggak utama Kapitalisme klasik yang mengekspresikan gagasan "*laissez faire*"<sup>8</sup> dalam ekonomi. Bertentangan sekali dengan

---

<sup>8</sup> Istilah "*Laissez faire*" berasal dari bahasa Perancis *laissez faire la nature* (*let nature take its course*); dapat diartikan sebagai sikap pembiaran kebebasan semesta (alami), tanpa pengaturan dan kontrol. Dalam ekonomi bisa diartikan sebagai minimumnya peranan pemerintah dalam perekonomian.

merkantilisme yaitu adanya intervensi pemerintah dalam urusan negara. Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri, karena masing-masing individu tersebut paling tepat mengetahui tentang apa saja yang menjadi kepentingannya. Hal ini disebabkan adanya dorongan motivasi ekonomi yang berhubungan dengan peranan dan kepentingan individu. Masih menurut Adam Smith, perilaku manusia secara alamiah didorong oleh enam pertimbangan motivasi (Djojohadikusumo; 1991; 31):

1. Kepentingan diri sendiri
2. Pada dasarnya ada unsur simpati dalam hubungan antar manusia
3. Hasrat untuk berkelakuan secara bebas
4. Kecenderungan perilaku manusia untuk menjaga sikap sopan santun
5. Kebiasaan untuk bekerja
6. Kecenderungan dalam dunia modern untuk mengangkut barang dan menukarnya dengan barang lain melalui transaksi jual beli (konsumerisme)

Atas dasar motivasi inilah maka tiap individu dianggap wajar mengetahui apa yang diinginkannya dan cara terbaik untuk mencapai kesejahteraannya adalah dengan membiarkannya memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Apakah dengan cara semacam ini tidak akan terjadi benturan dan persaingan yang saling merugikan? Smith berpendapat justru dengan persaingan itulah akan tercapai efisiensi dan akan memajukan masyarakat secara keseluruhan. Perilaku individu yang saling mengejar kepentingannya masing-masing secara bersama-sama seperti diarahkan oleh suatu tangan tak kelihatan (*invisible hand*), yaitu manifestasi dari suatu tata susunan masyarakat yang wajar karena berlandaskan hukum alamiah. Dalam masyarakat seperti itu

berlangsung kekuatan-kekuatan yang saling mendukung kegiatan ekonomi dan pasar menuju titik keseimbangan.

Dalam kaitannya dengan masalah dan sistem ekonomi, Kapitalisme merupakan suatu bentuk tatanan ekonomi yang digunakan oleh semua masyarakat yang sistem ekonominya terintegrasi dengan sistem pasar. Ciri utama keseluruhan logika sistem pasar adalah adanya anggapan simetri antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Dalam hal ini individu diberi kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik produksi maupun konsumsi sampai pada tingkat kepuasan masing-masing, baik dalam bentuk laba yang maksimum (bagi unit perusahaan), maupun kepuasan dalam mengkonsumsi nilai guna (*utility*) yang maksimal (bagi individu atau konsumen). Dengan tercapainya kepuasan individu secara maksimal maka dengan sendiri tercapainya kesejahteraan umum. Pandangan tersebut didasarkan pada sebuah asumsi bahwa individu, dalam kapasitasnya sebagai konsumen yang berdaulat, bertindak secara rasional dan memaksimalkan nilai guna (*utility*) dengan membeli harga pada barang dan jasa pada tingkat harga yang paling rendah yang menempati kedudukan tertinggi dalam skala prioritas mereka. Begitu pula individu, dalam kapasitasnya sebagai produsen, juga bertindak secara rasional dan merespon secara "pasif" permintaan ini dengan melakukan produksi dengan menekan ongkos serendah-rendahnya karena dengan cara ini akan membantu meningkatkan keuntungan (Chapra 2000, 18-19).

Interaksi antara dua pelaku ekonomi berjalan dalam suatu sistem pasar bebas yang bergerak melalui stimulus harga dalam mekanisme penawaran-permintaan sampai pada akhirnya tercapai suatu kondisi ekuilibrium. Pada kondisi ini dipercaya kepuasan konsumen adalah maksimal dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan produsen adalah minimal sehingga menghasilkan laba yang maksimal. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pasar

bebas akan mengarahkan pada penggunaan sumberdaya yang paling “efisien” dan distribusi paling “merata” dengan cara yang paling adil tanpa harus melibatkan penilaian.

Selanjutnya menurut Chapra (2000) kondisi ekuilibrium yang kompetitif (*pareto optimum*) akan menjadikan keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain bertambah buruk, dan hal itu harus diterima sebagai suatu keadaan yang “efisien” dan “adil”. Dengan demikian dalam konsepsi pemerataan dan keadilan tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan-tujuan pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok dan pengurangan jurang ketidakmerataan dalam pendapatan dan kekayaan.

Kebebasan individu dalam aktivitas ekonominya dapat diwujudkan dengan pengakuan kepemilikan pribadi. Karena dengan demikian individu-individu pemilik modal (Kapitalis) dapat lebih secara optimal menggunakan modal yang mereka miliki untuk melakukan kegiatan konsumsi maupun produksi sehingga masing-masing dapat memperoleh laba/keuntungan maupun nilai guna yang maksimal. Dengan asumsi bahwa para pelaku ekonomi dapat berpikir secara rasional yang mengarahkan tindakannya pada bentuk motivasi pencarian keuntungan yang maksimal. Dengan demikian motif pencarian keuntungan yang maksimal akan menjadi motivasi yang paling dominan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Kepemilikan modal sebagai penguasaan sumberdaya dalam sistem Kapitalisme merupakan sebuah persyaratan mutlak untuk dapat meningkatkan kemakmuran individu dan tentunya kesejahteraan umum. Oleh karena itu usaha memperoleh modal menciptakan mekanisme penawaran dan permintaan antara pihak yang surplus dan minus dalam bentuk kredit modal. Aktivitas-aktivitas tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan saling terkait satu sama lain dalam aktivitas ekonomi pada sistem ekonomi Kapitalis sehingga aspek-

aspek kepemilikan, modal, uang, kredit dan keuntungan kemudian terinstitusikan sehingga memperkuat bangunan sistem ekonomi Kapitalis.

Menurut Chapra (2000,18) Kapitalisme memiliki lima ciri utama yang menonjol yakni:

1. Ia menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat (melalui maksimasi laba) dan produksi yang maksimal serta pemenuhan "keinginan" (*want*) menurut preferensi individual sangat esensial bagi kesejahteraan manusia.
2. Ia menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.
3. Ia berasumsi bahwa inisiatif individual ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum.
4. Ia tidak mengakui pentingnya peranan pemerintah atau penilaian kolektif, baik efisiensi alokatif maupun pemerataan distribusi.
5. Ia mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri (*self Interest*) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.

Senada dengan apa yang ungkapkan oleh Chapra diatas, menurut Sombart (1919) dalam Mohammad (2001) ada dua karekteristik utama Kapitalisme yaitu maksimalisasi laba dan tindakan ekonomi yang rasional. Hal tersebut digambarkan oleh Sombart (1915), seperti yang ditulis oleh Kham (1990,23) bahwa:

*The capitalistic spirit, the desire for self-gain, for profit, is part of cultural make up of Europeans, and this can traced back to preceding civilization. We can go back as far as the Babylonians and find that capitalistic was present. From the Greeks, the Western world has come to*



*revere rationality. ...From the Romans, the Western world has come to appreciate the pragmatic benefit organization, analysis, and administration. From Christianity, the Western world has come to value individuality; and according to Weber, in particular, Protestantism, has made a "religion" of hard work to achieve economic benefit. (Kham 1990,23 dalam Mohammad, 2001).*

Jadi cukup jelas bahwa karakter yang dimiliki oleh Kapitalisme itu merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya yang tertanam dalam masyarakat barat, seperti adanya pemujaan terhadap rasio, motif mencari keuntungan, analisis dan administrasi, individualisme, dan semangat bekerja sebagai wujud etika Protestan. Barangkali yang menarik adalah apakah karakter tersebut bersifat universal, artinya bisa cocok untuk semua negara?.

### **3.2 Pilar-Pilar Ekonomi Kapitalisme**

Schnitzer (1991) membagi sistem ekonomi Kapitalis dalam beberapa bagian yang akan diuraikan yaitu kepemilikan pribadi, motif mencari keuntungan, sistem harga, kebebasan berusaha, persaingan, individualisme, perilaku konsumen, etika kerja, keterbatasan peranan pemerintah.<sup>9</sup>

#### **1. Kepemilikan individu**

Dibawah Kapitalisme terdapat kepemilikan pribadi dari faktor-faktor produksi-tanah, tenaga kerja, dan modal sekaligus hak kepemilikan individu. Setiap individu berhak untuk memperoleh kekayaan, untuk membelanjakan dan mengontrolnya, untuk membeli atau menjualnya dan lain-lain. Namun bukan berarti bebas segala-galanya. Di dalam prakteknya hak-hak kepemilikan individu sering dibatasi oleh aksi-aksi sosial dan juga oleh pemerintah. Selain itu salah satu hal yang baik dalam sistem ekonomi Kapitalis, kekayaan tidak

---

<sup>9</sup> Lebih jauh tentang hal ini dapat dibaca karya Martin Schitzer berjudul: *Comparative Economic System-5<sup>th</sup> ed. (Copyright ©1991 by South-Western Publishing Co.)*, hal. 3-21.

hanya dimiliki oleh individu secara perorangan, tetapi juga oleh perusahaan bisnis. Sedangkan keberadaan hak-hak untuk masyarakat umum atau untuk kepentingan publik dikendalikan secara bersama-sama dalam proses politik.

## **2. Motif mencari keuntungan**

Berbagai macam barang yang diproduksi di pasar diolah dan ditentukan, pertama oleh para manajer perusahaan bisnis atau oleh para pengusaha. Mereka secara langsung bertanggung jawab untuk mengolah sumber-sumber daya ke dalam proses produksi dan menentukan apakah hasil-hasil produksi tersebut laku atau tidak, ditentukan oleh perilaku konsumen di pasar. Motif mencari keuntungan menggambarkan kebijakan para manajer untuk memproduksi barang yang dapat dijual pada harga yang lebih tinggi dari biaya produksinya.

Di dalam perusahaan individu, keuntungan diperlukan untuk kelangsungan hidup yaitu untuk pembayaran kepada para pemilik modal. Bahkan keuntungan dapat digunakan untuk menguji apakah suatu barang atau jasa seharusnya diproduksi atau tidak, dan jika ya, berapakah kira-kira yang seharusnya diproduksi.

## **3. Sistem Harga**

Ada dua hal yang ingin disoroti dalam kaitannya dengan sistem harga yaitu mekanisme harga dan penentuan harga. Individu dan bisnis dalam sistem ekonomi Kapitalis diperkirakan membuat paling banyak tipe keputusan ekonomi berdasarkan harga, hubungan harga dan perubahan harga. Fungsi harga adalah untuk menyediakan suatu mekanisme pengaturan dari jutaan produksi yang dilakukan oleh masing-masing entitas atau perusahaan dan unit-unit distribusi. Harga yang tercermin di pasar menentukan jenis dan jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang akan diproduksi dan bagaimana mendistribusikannya.

Dalam kaitannya dengan penentuan harga, di dalam ekonomi pasar bebas, permintaan dan penawaran menentukan harga di mana pembelian atau penjualan ditransaksikan. Permintaan pasar adalah jumlah total seluruh permintaan konsumen individual terhadap barang dan jasa tersebut, di mana terdapat hubungan yang negatif antara jumlah barang yang diminta dengan harganya. Semakin tinggi harganya, semakin sedikit jumlah barang yang diminta (hukum permintaan).

Sebaliknya penawaran pasar mencerminkan jumlah total dari seluruh penyedia barang atau jasa yang ingin menawarkan produksinya dengan berbagai kemungkinan harga yang diberikan. Terdapat korelasi positif antara tingkat harga di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan, semakin tinggi harga, semakin banyak barang atau jasa yang ditawarkan (hukum penawaran).

Interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar mencerminkan harga barang atau jasa di pasar. Ekuilibrium harga terjadi ketika ada persamaan antara jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan di pasar.

#### **4. Kebebasan Berusaha**

Kebebasan berusaha adalah salah satu pilar sistem ekonomi Kapitalis yang mengapresiasi hak-hak umum tiap individu untuk berusaha dalam berbagai aktivitas ekonomi, tentu saja yang tidak bertentangan dengan norma-norma atau yang merugikan kepentingan umum. Dengan perbandingan indikator pasar, harga dan biaya, individu akan menyeleksi lapangan aktivitas ekonomi yang menjadi pilihannya. Kebebasan berusaha merupakan penghargaan kepada hak-hak individu untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi. Tiap individu bebas untuk memilih lapangan usaha yang menurutnya paling cocok dan paling disenangi.

## 5. Persaingan

Adanya Kepemilikan individu dan kebebasan berusaha, serta kepercayaan alokasi sumber daya yang langka oleh pasar mendorong tiap individu atau entitas untuk saling bersaing. Dalam kehidupan ekonomi, kepercayaan diri tiap individu sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil, seperti misalnya karir kerja yang baik, gaji yang tinggi, promosi jabatan, keinginan akan barang-barang dan jasa-jasa dan keamanan di hari tua. Jadi terdapat semacam Darwinisme sosial dalam masyarakat Kapitalis. Kita ingat dalam teori Darwin tentang seleksi alam di mana hanya makhluk yang unggul yang mampu bertahan dalam hidup dan melangsungkan keturunannya. Darwinisme sosial agak mendekati pengertian itu dengan meminjam istilah Schnitzer tentang pengertiannya :

*“Live is a competitive struggle in which only the fittest, in terms of resources, get to the top.”*

Jadi hukum rimba akan berlaku dalam masyarakat Kapitalis, tentu saja rimba yang memiliki seperangkat hukum dan aturan untuk perlindungan hak asasi.

## 6. Individualisme

Adanya prinsip Darwinisme sosial, dimana hanya manusia yang unggul saja yang bisa bertahan hidup atau mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi membuat masing-masing individu untuk saling bersaing dan dengan sendirinya kehidupan mereka sadar atau tidak akan bersifat individualistis. Hal ini juga berkaitan dengan adanya persamaan dalam kesempatan, yaitu hak-hak individu untuk berhasil atau gagal dalam hidupnya. Semangat untuk saling bersaing inilah salah satu motivasi dasar dalam masyarakat Kapitalis untuk maju.

## **7. Kekuasaan Konsumen**

Di dalam ekonomi pasar Kapitalis, kekuasaan konsumen adalah salah satu istilah penting karena konsumsi dianggap sebagai pemikiran dasar dari aktivitas ekonomi. Kekuasaan konsumen tentu saja berangkat dari asumsi bahwa ada ekonomi persaingan pasar. Konsumen bisa berbicara banyak dengan uangnya dengan permintaan barang yang lebih banyak bagi barang-barang yang diinginkan dan permintaan yang sedikit bagi barang-barang yang kurang begitu diinginkan. Kebebasan konsumen yang berarti juga kebebasan bagi konsumen untuk memilih selaras dengan ekonomi *laissez-faire*. Yang mengasumsikan bahwa konsumen akan bisa mengambil keputusan yang rasional dan dalam ekonomi pasar yang kompetitif, asumsi ini menjadi semakin berarti.

## **9. Etos Kerja Protestan**

Etos kerja Protestan adalah sebuah prinsip ideologi yang diambil dari reformasi Protestan pada abad ke-16 dan yang diasosiasikan dengan tokoh reformasi keagamaan John Calvin. Calvin mengajarkan suatu doktrin pembebasan atau keselamatan yang selaras dengan prinsip-prinsip sistem Kapitalis. Menurut Calvin dan Kaum Puritan Inggris di awal-awalnya, kerja keras, ketekunan, dan hemat adalah tanda-tanda materi bahwa tiap individu sedang menggunakan keseluruhan kemampuan yang diberikan pada mereka oleh Tuhan dan tujuan-tujuan-Nya. Keselamatan diasosiasikan dengan prestasi di dunia ini, jadi kerja dan imbalan yang didapat tersebut memiliki nilai moral.

## **10. Peranan Pemerintah yang Terbatas**

Menurut doktrin *laissez-faire*, peranan pemerintah seharusnya dibatasi hanya pada fungsi-fungsi umum untuk barang yang menguasai hajat hidup seluruh masyarakat, dan seharusnya tidak berusaha mengontrol atau

mencampuri aktivitas ekonomi swasta. Di sini diasumsikan bahwa individu adalah rasional dan hakim yang lebih baik dari keinginannya sendiri dari pada pemerintah.

Dalam kondisi pasar yang kompetitif dan efisien akan tercapai keseimbangan karena ada "*invisible hand*" yang mengaturnya dan intervensi dari berbagai pihak, pemerintah misalnya, justru akan mengganggu keseimbangan.

Itulah beberapa pilar ekonomi Kapitalis yang diuraikan secara sederhana menurut Schnitzer. Sedangkan Barry Clark (1991) seperti yang dikutip oleh Munawar Ismail (1996), menguraikan pilar-pilar sistem ekonomi Kapitalis adalah sebagai berikut<sup>10</sup> :

- a. Manusia adalah makhluk *self intersted* dan dengan kapasitas yang ada pada dirinya, manusia mampu menemukan alat yang paling efisien untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya.
- b. Masyarakat hanyalah agregasi dari individu dan oleh karena itu masyarakat tidak memiliki tujuan. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mampu memberikan kebebasan individu untuk mencapai kepentingannya.
- c. Pemerintah adalah lembaga yang diciptakan individu-individu untuk melindungi hak mereka melalui undang-undang. Lebih dari itu pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sedikit mengatur.
- d. Yang berkaitan dengan moral, tidak ada metode yang obyektif untuk mengatakan bahwa nilai tertentu lebih baik dari yang lain dan, oleh karena itu, individu seharusnya diberikan kebebasan untuk menentukan benar dan salah berdasarkan preferensi individu.

---

<sup>10</sup> Munawar Ismail, 1996, Islam, Kapitalisme Dan Sosialisme; Studi Komparasi Sistem Ekonomi, Lintasan Ekonomi, Universitas Brawijaya, hlm. 19-20.

- e. Kebebasan diartikan sebagai absennya paksaan dari pemerintah atau individu lainnya. Kebebasan identik dengan otonomi dan independensi.
- f. Kesamaan diartikan sebagai kesamaan dalam memperoleh kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan untuk mendapat perlindungan hak yang ditetapkan undang-undang.
- g. Keadilan meliputi perlindungan hak dan hukuman bagi mereka yang mengganggu orang lain.

Berdasarkan beberapa pilar-pilar ekonomi Kapitalisme di atas terlihat betapa besar peran individu dan kebebasannya. Seperti apa yang diuraikan oleh Munawar Ismail (1996) sistem ekonomi Kapitalis adalah sistem yang didasarkan pada hak individu, kebebasan secara arbitrer dan tidak memiliki landasan moral atau etika.

Sebegitu jauh uraian ekonomi Kapitalis, terutama Kapitalisme klasik juga memiliki keterbatasan juga. Seperti apa yang dikatakan oleh Samuelson (1994) bahwa doktrin “tangan gaib” yang banyak mengilhami para pakar ekonomi, baik yang setuju atau tidak terhadap Kapitalisme, terlihat adanya kelemahan, misalnya adanya kegagalan pasar. Dua kegagalan pasar yang paling utama adalah tidak adanya pasar persaingan sempurna (yang banyak digunakan sebagai asumsi dalam teori-teori ekonomi klasik dan akhirnya dikritik oleh generasi Keynes) dan adanya eksternalitas.

Dari uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan epistemologi Kapitalis akan tampak bahwa terdapat pemisahan yang jelas antara wilayah normatif dan positif. Baik dari tataran teoretis maupun aplikatifnya. Pemisahan ini tentu saja akan berdampak pada sistem yang dibentuk dan selanjutnya juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang menjalani sistem tersebut. Meskipun gambaran ekonomi Kapitalis dewasa ini tidak sama persis dengan gambaran tersebut di atas, tetapi terdapat banyak kesamaan dasar dalam

paradigma dan perilaku ekonominya, tentu saja dengan adanya penyesuaian-penyesuaian seiring dengan perkembangan jaman.

Dari sistem ekonomi Kapitalis yang menjadi landasan berpikir, kita akan menuju sistem moneter Kapitalis. Apakah sistem moneter Kapitalis juga dipengaruhi oleh ideologi Kapitalis, bagaimana sistem tersebut disusun menjadi teori-teori, dan bagaimana dampak penerapan terhadap perekonomian akan di bahas dalam bab berikutnya.



## *BAB 4*

### *Sistem Moneter Kapitalis*

**\*\*\*\***

Sistem moneter adalah suatu entitas yang terdiri atas otorita moneter (bank sentral dan pemerintah) serta lembaga-intermediasi keuangan termasuk perbankan yang menyediakan jasa atau layanan kepada masyarakat dalam memperlancar kegiatan ekonominya. Bersama-sama dengan berbagai komponen lain dalam sistem ekonomi Kapitalis, sistem moneter bergerak mengikuti irama gerakan masyarakat Kapitalis. Semakin maju peradaban masyarakat, semakin kompleks masalah kehidupan yang dihadapi dan memerlukan penyelesaian yang semakin beragam pula. Sebagai contoh, jika pada masa-masa awal abad XX, standar moneter internasional menggunakan standar emas, dengan semakin majunya perdagangan dan transaksi dunia, semencara cadangan emas dunia tidak lagi mencukupi, maka perlahan-lahan standar ini mulai ditinggalkan. Demikian juga dengan perkembangan pasar uang dan pasar modal, jika pada awalnya hanya menggunakan beberapa instrumen keuangan atau surat berharga, seiring dengan kemajuan perekonomian dunia, bermunculan derivasi-derivasinya.

Dalam kenyataannya sistem moneter terdiri dari banyak subsistem sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Untuk membatasi ruang lingkup yang akan dibahas, tulisan ini menguraikan beberapa konsep dasar dari subsistem tersebut. Sub sistem tersebut terdiri dari konsep dasar uang, masalah bunga, perbankan, bank sentral dan kebijakan moneter.

#### 4.1. Konsep Dasar Uang

Uang dalam perekonomian bisa disamakan darah dalam tubuh manusia. Dalam sejarahnya uang menggantikan sistem perdagangan barter di mana barang ditukarkan dengan barang, dengan menggunakan uang maka suatu perekonomian lebih efisien. Seperti yang dikatakan oleh Samuelson dan Nordhaus (1985)<sup>11</sup>:

Hakikat uang adalah fungsinya sebagai alat tukar, dan dengan alat tersebut kita menjual dan membeli dan menjual segalanya. Berbagai barang pernah berfungsi sebaagai uang selama berabad-abad, namun sekarang ini merupakan jamannya uang kertas dan bank, yaitu jenis yang tidak memiliki intrinsik sama sekali

Secara umum fungsi uang adalah sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. alat tukar (*means of exchange*)
2. penyimpan daya beli (*store of value*)
3. satuan hitung (*unit of account*)
4. satuan ukuran masa depan (*standard of deferred payments*)

Peranan uang sebagai alat tukar mengharuskan uang sebagai sesuatu yang dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran. Artinya orang percaya bahwa orang lain juga percaya dan mau menerima alat yang dipakai untuk pembayaran tersebut jika suatu saat dia menggunakannya sebagai alat pembayaran. Dari sini dapat kita ketahui besarnya unsur kepercayaan dan merupakan unsur utama bagi penggunaan uang.

---

<sup>11</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1985, *Economic, 12 ed.*, terj. Hal. 351.

<sup>12</sup> W.S. Jevons, *Money and the Mechanism of Exchange* (London : Routledge, Kegan, Paul, 1910) dalam Rudiger Dornbusch dan Stanley Fischer, 1995, *Makroekonomi*, Terjemahan, J. Mulyadi, Penerbit Erlangga, Jakarta hal. 313

Fungsi dasar uang yang kedua yaitu sebagai penyimpan daya beli yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kekayaan, sebagaimana orang dapat menyimpannya dalam bentuk lain seperti emas, perhiasan, tanah, rumah dan lain-lain.

Sebagai satuan hitung, uang akan mempermudah penghitungan nilai sesuatu untuk ditukarkan. Hal ini dapat membantu manusia dalam membandingkan nilai atau ukuran barang dengan barang lain yang secara langsung sulit diperbandingkan, misalnya nilai mobil dibandingkan dengan beras.

Sedangkan fungsi uang yang lain adalah sebagai ukuran pembayaran yang tertunda atau masa depan berkait dengan transaksi pinjam meminjam dan atau transaksi kredit. Misalnya membeli barang lebih dahulu, bayarnya kemudian, atau pinjam uang sekarang dibayar dengan uang nanti.

#### 4.1.1. Teori Tentang Permintaan Uang

Teori permintaan uang berguna untuk mengetahui berapa jumlah uang yang beredar dan atau yang diperlukan dalam suatu masyarakat dan dalam suatu periode berkaitan dengan aktivitas ekonominya. Teori ini dapat kita bagi menjadi beberapa aliran besar yaitu teori permintaan uang Klasik, Keynes dan teori kuantitas Modern.

Teori moneter klasik walaupun agak berbeda satu sama lain, mempunyai kesamaan-kesamaan dasar dan bisa diberi nama umum sebagai “teori kuantitas mengenai uang” atau *The Quantity Theori of Money*. (Boediono, 1996, hal.17). Ahli ahli teori moneter ini adalah Irving Fisher, Marshall-Pigou (dari Cambridge).

Dengan menggunakan identitas  $MV = PT$ , dimana :

M = volume uang yang ada di masyarakat

$V$  = velocity atau kecepatan rata-rata perputaran uang dalam suatu periode

$P$  = harga rata-rata barang yang ditransaksikan

$T$  = volume transaksi,

Fisher memformulasikan teori permintaan uangnya menjadi

$$M_d = \frac{1}{V} P \bar{T} \quad (4.1)$$

Permintaan uang dari masyarakat adalah suatu proporsi tertentu dari nilai transaksi. Tanda “-“ adalah variabel-variabel yang dianggap konstan dalam jangka pendek, karena dalam analisa jangka pendek, perputaran uang dan volume transaksi dianggap tidak mengalami perubahan yang berarti. Sedangkan formulasi dari Cambridge berbentuk:

$$M_d = k P \bar{Y} \quad (4.2)$$

di mana  $Y$  adalah pendapatan nasional riil.

Jadi permintaan uang menurut Cambridge seperti yang diformulasikan dalam persamaan (4.2.) adalah, ceteris paribus, permintaan akan uang adalah proporsional terhadap pendapatan nasional. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa menurut teori kuantitas klasik, permintaan uang ditentukan oleh tingkat pendapatan.

Teori Permintaan uang yang kedua adalah teori Keynes. Teori ini adalah bagian dari karya besarnya tentang ekonomi makro yaitu *General Theory*. Sebagaimana buku *General Theory*-nya, teori moneter ini juga berbeda dengan teori-teori ekonomi klasik sebagai perombakan atas asumsi-asumsi klasik yang diantaranya adalah selalu mendasarkan diri pada keadaan *full employment*. Ahli ahli dalam teori ini adalah JM. Keynes, Baumol dan Tobin. Keynes membagi motif memegang uang dalam tiga hal yaitu:

1. Untuk transaksi (*money demand for transaction*)
2. Untuk berjaga-jaga (*money demand for precautionary*) yang merupakan fungsi kekayaan
3. Motif spekulasi (*money demand for speculation*) yang dipengaruhi oleh tingkat bunga.

Bentuk sederhana dari model permintaan uang Keynes adalah :

$$\underline{M_d} = [ kY + \emptyset (R,W) ] \quad (4.3)$$

P

Dimana  $\underline{M_d}$  adalah permintaan total akan uang dalam arti riil.

P

$kY$  adalah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, yaitu suatu proporsi ( $k$ ) dari pendapatan nasional riil ( $Y$ )

$\emptyset(R,W)$  adalah permintaan uang untuk spekulasi yang dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat bunga yang berlaku ( $R$ ) dan nilai riil aset (kekayaan atau wealth) yang ada di masyarakat ( $W$ )

Variabel  $W$  dimasukkan karena permintaan uang untuk tujuan spekulasi sebagai bagian dari  $W$  yang dipegang dalam bentuk uang tunai. Persamaan (4.3) tersebut dapat ditulis dengan :

$$M_d = [ kY + \emptyset (R,W) ] P \quad (4.4)$$

Dalam analisa jangka pendek,  $W$  biasanya dianggap konstan sehingga fungsi (4.4) menjadi :

$$M_d = [kY + \emptyset(R)] P \quad (4.5)$$

Atas dasar formula tersebut maka para ekonom mengambil kesimpulan bahwa suku bunga merupakan variabel yang penting dalam pembentukan permintaan uang dalam kaitannya dengan keseimbangan pasar ( $M_d = M_s$ ). Keseimbangan pasar tersebut menentukan tingkat bunga dan harga dengan tekanan utama pada pembentukan tingkat bunga, sedangkan tingkat harga lebih ditentukan oleh permintaan dan penawaran agregat (AD,AS) dalam model teori makro Keynes (Boediono,1996)

Dapat disimpulkan permintaan uang Keynes selain ditentukan oleh pendapatan, juga oleh kekayaan dan tingkat bunga. Karena dalam analisa jangka pendek, kekayaan dianggap konstan, maka dua variabel yang mempengaruhi permintaan uang adalah pendapatan dan tingkat bunga.

Selanjutnya teori permintaan uang yang ketiga adalah teori kuantitas Modern. Teori ini pada dasarnya adalah pembaruan dari teori kuantitas klasik. Jika teori Keynes dianggap pengembangan lebih lanjut dari aspek *uncertainty* (ketidakpastian) dan *expectations* (harapan) dari teori Cambridge, sehingga timbul teori permintaan spekulatif akan uang, kuantitas modern -yang dipelopori oleh Milton Friedman- adalah pengembangan aspek lain dari teori Cambridge yaitu konsepsi bahwa teori permintaan uang hanyalah penerapan umum dari permintaan dalam ekonomi mikro, sedangkan prinsip dasarnya sama yaitu "pemilihan antara berbagai alternatif" oleh konsumen (atau dalam hal permintaan akan uang "pemilik kekayaan"). (Budiono, 1996,hal 61)

#### **4.1.2. Penawaran Uang**

Sampai sejauh ini terdapat asumsi bahwa penawaran uang hanya dilakukan oleh pemerintah atau otorita moneter. Dalam teori moneter klasik, dimana ada asumsi standar emas dan tidak ada perbankan, atau peranan perbankan kecil sekali, proses permintaan dan penawaran uang lebih ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi besar kecilnya jumlah uang beredar ditentukan oleh besar kecilnya emas yang ada dalam masyarakat.

Dalam teori penawaran uang modern, dimana standar yang digunakan bukan lagi emas, maka sumber terciptanya uang beredar, atau penawaran uang, adalah otorita moneter dan lembaga keuangan (keduanya disebut sistem moneter). Artinya sebagian uang diciptakan oleh otorita moneter dan disebut uang inti, sebagian lain diciptakan oleh lembaga keuangan dan disebut sebagai uang sekunder (giral). Namun demikian proses terciptanya uang beredar ini adalah akibat proses permintaan dan penawaran uang lewat penyesuaian portofolio, walaupun kadangkala ditentukan secara sepihak oleh otorita moneter, misalnya pembiayaan defisit anggaran dengan mencetak uang baru (Boediono, 1996).

Permintaan dan penawaran inilah yang menjadi dasar kebijakan moneter, karena jumlah uang beredar dapat mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dan dalam perekonomian modern yang berbasis bunga, dapat mempengaruhi tingkat bunga. Masalah kebijakan moneter akan dibahas dalam sub bab Kebijakan Moneter dalam bagian akhir bab ini.

#### **4.2. Teori Bunga**

Dalam perekonomian Kapitalis, masalah bunga masih merupakan uraian yang problematik. Ada yang menganggap bahwa bunga adalah harga dari

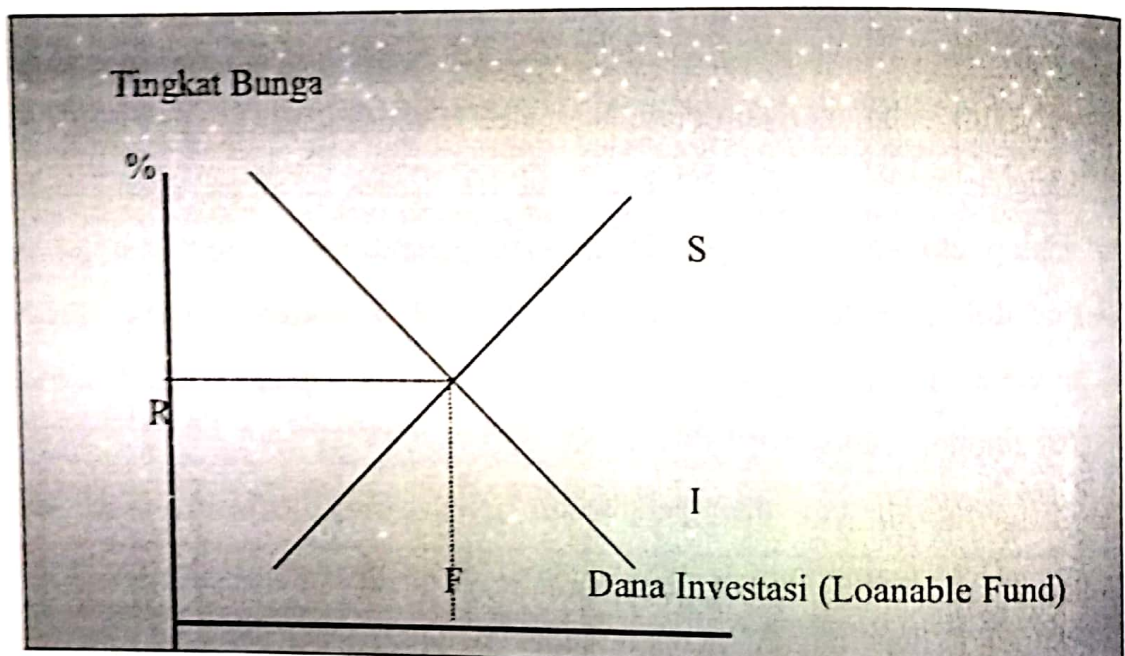
penggunaan uang karena berkait dengan masalah waktu, namun ada juga yang berpendapat bahwa teori mengenai bunga masih agak kurang jelas.

Ada beberapa teori yang menjelaskan keberadaan tingkat bunga dalam perekonomian Kapitalis ini yaitu :

#### 4.2.1. Mazhab klasik : loanable fund

Menurut mazhab ini bunga adalah harga dari penggunaan *loanable fund*. *Loanable fund* sendiri diartikan sebagai dana yang tersedia untuk dipinjamkan.

Gambar 4.1.  
Kurva Loanable Fund



Proses tawar menawar antara pemilik dan peminjam dana akan membentuk suatu keseimbangan dalam pasar dana investasi seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Jadi  $R$  disini adalah tingkat bunga keseimbangan yang mencerminkan harga dari dana itu sebagaimana proses permintaan dan penawaran dalam pasar komoditi. Dan transaksi ini bisa tercapai bila harga tersebut bersedia untuk dibayar oleh pembeli yaitu peminjam dana



atau pihak yang membutuhkan dana tersebut. Demikianlah proses terbentuknya tingkat bunga menurut mazhab klasik.

#### 4.2.2. Mazhab Keynesian : Liquidity Preference

Teori yang kedua mengenai tingkat bunga berasal dari Keynes yang dikenal dengan nama *liquidity Preference* yang berarti orang pada dasarnya menginginkan dirinya tetap likuid (memegang uang) untuk memenuhi tujuannya yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Dengan asumsi ini orang bersedia membayar seharga tertentu untuk menjaga likuiditasnya dan harga tersebut adalah tingkat bunga. Perbedaan mendasar antara mazhab Klasik dan Keynesian adalah bahwa menurut mazhab klasik bunga timbul karena uang adalah produktif, dalam arti dengan adanya uang di tangan, maka seseorang bisa menambah faktor produksinya (modal) yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dengan melakukan usaha di sektor riil. Sedangkan Keynesian lebih menekankan bahwa uang bisa produktif dengan cara lain. Salah satunya dengan berspekulasi di pasar surat berharga. Karena harapan adanya keuntungan tersebut maka orang bersedia membayar seharga tertentu (bunga). Seorang ekonom Inggris bernama Sir John Hicks melihat bahwa antara kedua teori diatas sebenarnya justru saling melengkapi dengan kesimpulan bahwa sebenarnya uang adalah dana investasi sekaligus aktiva likuid. Tingkat bunga bisa dikatakan tingkat bunga keseimbangan (*equilibrium interest rate*) bagi suatu perekonomian apabila tingkat bunga tersebut memenuhi keseimbangan di pasar dana investasi (*loanable fund*) sekaligus keseimbangan di pasar uang (*asset likuid*). (Boediono, 199, hal.84)

#### 4.2.4. Konsep Time Value of Money

Salah satu konsep dalam ekonomi yang dikembangkan dari basis tingkat bunga adalah konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*). Konsep ini, yang sering disebut oleh para ekonom sebagai *positive preference*, menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan (Achsien 2000, 43). Konsep *capital and interest* dan *positive theory of capital* yang dikembangkan oleh ekonom Von Bhom Bawerk menyebutkan bahwa *positive preference* merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Diskonto dalam *positive time preference* ini biasanya didasarkan pada, atau paling tidak berhubungan erat dengan, tingkat bunga (*interest rate*) (Achsien 2000, 43).

Konsep ini sering digunakan dalam menilai aset-aset ekonomi. Konsep diskonto misalnya adalah sangat penting dalam analisis teori modal dan investasi. Secara praktis, digunakan dalam evaluasi proyek ataupun keputusan investasi. Penggunaan model *Net Present Value* (NPV), *Cost-Benefit Analysis*, *Internal Rate of Return* (IRR), *dividen model* dalam *asset valuation* dan model-model lainnya, merupakan bentuk-bentuk diskonto yang dimaksud dalam *time value of money*.

Karena produksi yang dilakukan perusahaan diikuti dengan adanya jangka waktu kepemilikan atas aset perusahaan, maka *opportunity cost* terhadap seluruh aset perusahaan pada akhir produksi harus sama dengan *opportunity cost* seluruh aset perusahaan pada awal kepemilikan. Apabila selama masa kepemilikan aset, perusahaan tidak melakukan proses produksi maka jika *opportunity cost* pada akhir masa kepemilikan lebih besar dari *opportunity cost* pada awal kepemilikan aset tersebut, maka kelebihan atau kenaikan tersebut hanya dapat ditambahkan pada pengaruh bersih akibat perubahan harga atas nilai aset yang bersangkutan.

Para pemikir aliran ini (*opportunity cost*) beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti kreditor menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan diri sendiri. Hal itu serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah yang berhutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, waktu mempunyai harga yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

Sementara itu konsep *time value of money* berkaitan erat dengan konsep *opportunity cost* yang banyak digunakan dalam perhitungan keuangannya. Hal itulah yang dijadikan dasar para penganut teori ini bahwa pemberi pinjaman atau kreditor berhak menikmati sebagian keuntungan peminjam, yang besar kecilnya keuntungan terkait langsung dengan besar kecilnya waktu dan kreditor dianggap berhak mengenakan harga sesuai dengan lamanya waktu pinjaman.

### **4.3. Peranan Perbankan**

Dalam suatu perekonomian, apabila uang bisa analogikan darah dalam tubuh, maka bank (dan lembaga keuangan lainnya ) bisa diartikan sebagai pembuluh darahnya. Perekonomian suatu negara akan berkembang pesat apabila ditunjang oleh lembaga intermediasi yang baik. Dewasa ini peranan bank semakin berkembang pesat dan semakin kompleks dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Bank merupakan badan usaha komersial dengan tujuan mencari keuntungan bagi pemiliknya. Menurut UU. No. 10 tahun 1998, bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip bagi Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran (Yuslam Fauzi, 2001). Bank-bank modern merupakan hasil perkembangan secara bertahap, yang dimulai dari para tukang emas yang menyediakan jasa penitipan uang dan barang-barang berharga<sup>13</sup>. Secara sederhana peranan bank pada dasarnya adalah sebagai perantara (lembaga intermediasi) antara pemilik dana dan pihak yang menggunakan dana tersebut. Dengan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi baru, peranan bank menjadi semakin luas.

Dalam suatu masyarakat di mana sarana untuk mendapatkan dana dari pasar modal belum memadai, peranan perbankan akan lebih penting untuk menunjang biaya produksi sektor riil lewat pinjaman kreditnya. Jenis usaha bank bukan hanya dalam bentuk memberikan pinjaman kredit, namun masih banyak jenis usaha lain dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, namun apa saja jenis kegiatan bank dan bagaimana mekanismenya bukanlah hal akan dibahas secara terperinci di sini. Secara umum fungsi pokok bank umum adalah sebagai berikut: (Dahlan Siamat (1995)

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
- b. Menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat
- d. Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau perwalian amanat kepada individu dan perusahaan
- e. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional
- f. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga
- g. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain misalnya, kartu kredit *traveler's check*, transfer dana dan sebagainya

---

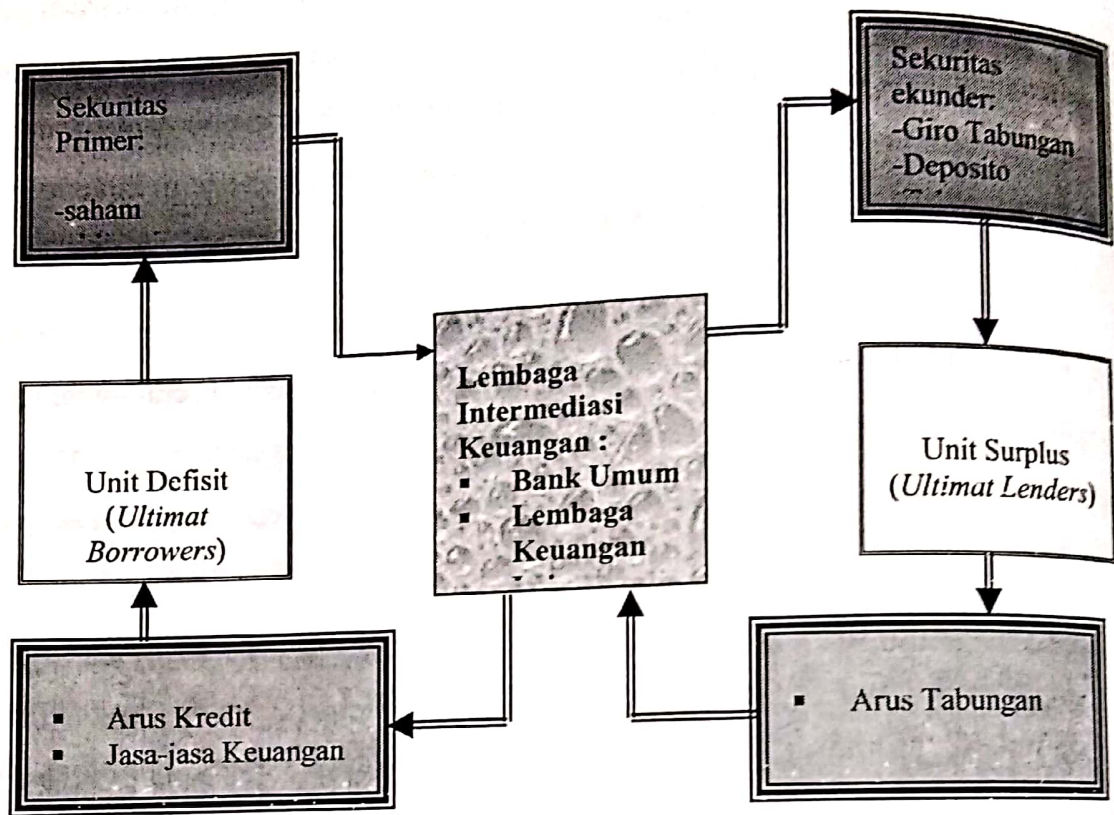
<sup>13</sup> Mengenai sejarah bank yang dimulai dari tukang emas secara sederhana dapat dibaca dalam buku karya Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus (1985), *Economic*, McGraw Hill, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, edisi ke-12, hal 358-359.

Dalam prakteknya bank-bank komersial banyak menggunakan tingkat suku bunga dalam perhitungan seperti tingkat suku bunga deposito, tabungan, kredit, dan pinjaman-pinjaman jangka pendek seperti *call loan*, *overnight* dan sebagainya. Bahkan dalam surat-surat berharga pun bahkan banyak menggunakan basis tingkat bunga atau diskonto. Karena banyak produk yang menggunakan tingkat bunga tersebut perbankan dan sistem keuangan pada umumnya sangat sensitif terhadap perubahan tingkat bunga.

Adanya jaminan tingkat bunga membuat pihak yang mendapatkannya (penabung) atau bank sendiri yang mendapat bunga kredit akan merasa mendapat pendapatan yang pasti. Salah satu kelebihan sistem ini adalah pihak yang menggunakan dana (peminjam) dituntut dengan sendirinya untuk berusaha sebaik mungkin mendapatkan keuntungan. Hal ini bukan berarti bank-bank komersial tidak menghadapi resiko. Bisa jadi terjadi apa yang disebut kredit macet. Sementara itu salah satu kekurangan sistem bunga seperti ini membuka kemungkinan transaksi di pasar uang dan keuangan secara umum kurang terkait dengan kondisi perekonomian riil sehingga bisa terjadi *bubble economic*, di mana nilai transaksi di sektor moneter jauh melebihi transaksi di sektor riil.

Perbankan merupakan bagian integral dari lembaga intermediasi keuangan. Secara sederhana bagaimana peranan perbankan dalam masyarakat dapat digambarkan di bawah ini:

Gambar 4.2.  
Proses Intermediasi Keuangan



Sumber : Dahlan Siamat (1995), Manajemen Lembaga Keuangan, dengan tambahan dan modifikasi.

Sampai sejauh ini berbagai mekanisme teknis yang digunakan perbankan dalam transaksi yang berhubungan dengan waktu (konsep *time value of money*) baik yang berupa paket pinjaman, simpanan maupun perdagangan kebanyakan berbasis tingkat bunga. Misalnya bunga deposito, bunga kredit, apa yang dikenal di Indonesia sebagai bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan lain-lain. Mengenai berbagai jenis paket dan teknisnya dari instrumen keuangan berbasis bunga tidak dibahas secara mendetail karena bukanlah merupakan cakupan dari penulisan ini.

#### 4.4. Bank Sentral

Setiap negara di dunia ini memiliki bank sentral dalam memperlancar aktivitas sektor moneter. Menurut Nopirin (1993), tugas bank sentral pada umumnya adalah untuk memelihara supaya sistem moneter itu bekerja secara efisien sehingga dapat menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan kredit atau uang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi. Guna mencapai sasaran ini, bank sentral bertanggung jawab atas dua hal :

- ◆ Perumusan serta pelaksanaan kebijaksanaan moneter
- ◆ Mengatur, mengawasi, serta mengendalikan sistem moneter.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab yang kedua ini, bank sentral mempunyai tugas :

- a. Memperlancar lalu lintas pembayaran sehingga dapat cepat dan efisien. Untuk memenuhi tujuan ini, bank sentral melakukan beberapa hal antara lain dengan menciptakan uang kertas dan menyelenggarakan kliring.
- b. Sebagai pemegang kas pemerintah. Bank sentral memegang peranan yang penting dalam membantu memperlancar kegiatan keuangan (penerimaan dan pembayaran) pemerintah.
- c. Mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa keuangan, membuat peraturan tentang pendirian serta penggabungan dan sebagainya.
- d. Melakukan pengumpulan serta analisa data ekonomi nasional dan internasional.

Selain memiliki tugas seperti tersebut di atas, bank sentral juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama bank sentral adalah sebagai pemberi pinjaman terakhir (*lenders of last resort*). Sedangkan fungsi yang kedua adalah sebagai bank dari bank (*banker's bank*). Ia adalah sebuah bank yang menguasai bagian

utama cadangan bank dari suatu negara dan yang merupakan tempat penyimpanan kredit yang terakhir. Bank sentral ini biasanya punya beberapa ciri. Pertama, memegang cadangan semua atau sebagian besar dari bank-bank umum. Kedua, mendiskonto ulang (*rediscounting*) dan meminjamkan *commercial paper* yang bermutu tinggi dan agunan lainnya kepada bank-bank yang menjadi anggotanya. Ketiga, melakukan jasa-jasa fiskal bagi pemerintah. Keempat, memonopoli penerbitan uang (*bank note*). Kelima, mengontrol cadangan emas atau cadangan moneter lainnya dari suatu negara. Keenam, membantu penagihan cek. Ketujuh, mengkoordinasikan kebijaksanaan kredit dan implementasi kebijaksanaan pemerintah.

Tetapi, beberapa bank sentral tidak mutlak terbatas berurusan hanya dengan bank, khususnya bank-bank sentral yang berasal dari status aslinya sebagai bank umum. Bank-bank sentral yang demikian itu mungkin berhubungan bisnis dengan masyarakat luas, seperti *Bank of France* dan *Commonwealth Bank of Australia*. Meskipun fungsi-fungsi *Commonwealth Bank of Australia* sudah dipisahkan ke dalam *Reserve Bank of Australia* yang baru pada Januari 1960, bersama-sama dengan bagian kredit pedesaannya, setelah terlibat langsung dalam operasi perbankan melalui divisi perbankan umum, mortgage bank, dan bagian pembiayaan industri. (Mukharor Jalil, 1997)<sup>14</sup>

Model-model dasar dari bank-bank sentral mungkin bisa diklasifikasikan dua tipe. Pertama, tipe Eropa, yang menggambarkan sangat terpusatnya kekuatan operasi dan kebijaksanaan pada gubernur. Kedua, tipe *Federal Reserve*, yang menggambarkan secara rinci statutenya dan desentralisasi operasi, termasuk juga dalam pembuatan kebijaksanaan. Bank

---

<sup>14</sup> Mukharor Jalil, 1997, *Bank Sentral, Central Bank*, <http://www.infobank-online.com/kamus>



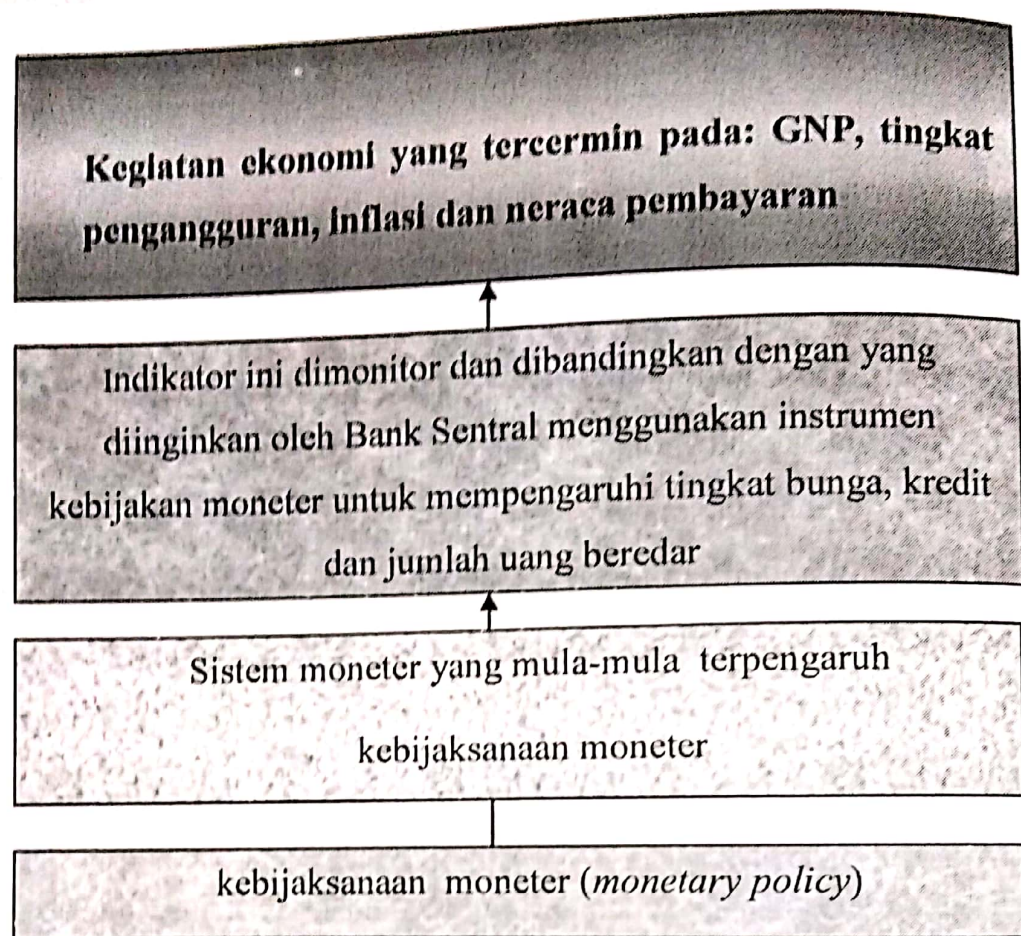
sentral yang tertua di dunia adalah Bank of England, yang didirikan pada tahun 1694 sebagai bank swasta biasa. Tapi, bank ini baru berkembang dan bertindak secara formal sebagai bank sirkulasi (*bank of issue*) dan sebagai *banker's bank* pada tahun 1773, atau 79 tahun kemudian setelah reorganisasi. *Bank of England* baru menyelenggarakan kliring di antara bank-bank pada 1854, atau 81 tahun setelah berdiri. Sedangkan, pembentukan bank sentral Amerika Serikat, yaitu *Federal Reserve System* atau dikenal dengan sebutan *Fed*, dibentuk tahun 1913.

#### 4.5. Kebijakan Moneter

Kebijaksanaan moneter diambil dalam rangka mempengaruhi kegiatan ekonomi. Sebenarnya banyak faktor lain yang juga mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara, di mana pada masing-masing tempat dan waktu berbeda-beda pula permasalahan ekonominya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan berbagai faktor penyebab permasalahan ekonomi tersebut sebelum mengambil keputusan final suatu kebijakan. Menurut Samuelson (1994) kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral dalam melaksanakan pengendaliannya atas uang, suku bunga dan persyaratan kredit. Sedangkan instrumen utama yang digunakan adalah operasi pasar terbuka, persyaratan cadangan dan tingkat diskonto.

Gambar skematis 4.4. menunjukkan kaitan kebijaksanaan moneter dengan kegiatan ekonomi : (Nopirin,1996,hal.51)

Gambar 4.3.  
Transmisi Kebijakan Moneter



Ada beberapa cara yang diambil oleh otoritas moneter dalam rangka mempengaruhi kegiatan ekonomi. Cara-cara yang ditempuh selama ini terdiri dari ketentuan cadangan minimum (*minimum reserve requirement*), politik diskonto, operasi pasar terbuka (*open market operation*), moral suasion dan kontrol kredit selektif. Kebijakan yang diambil tergantung pada keadaan mana yang paling sesuai dengan cara yang diambil.

#### 4.5.1. Instrumen Kebijakan Moneter

Seperti yang telah disebutkan di muka bahwa kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, tingkat bunga dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan kebijakan

moneter, terutama untuk stabilisasi perekonomian, dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kalau kestabilan dalam kegiatan ekonomi terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pada dasarnya instrumen/alat kebijakan yang dipakai adalah :

1. Politik Pasar Terbuka, yaitu dengan menjual atau membeli surat-surat berharga oleh bank sentral.
2. Politik Diskonto, yaitu tindakan untuk mengubah-ubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum ketika meminjam dana dari bank sentral.
3. Politik Perubahan Cadangan Minimum, yaitu kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan minimum bagi bank, sehingga kemampuan untuk menciptakan kredit atau uang giral oleh bank bisa diatur.
4. *Margin Requirement*, digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan-tujuan pembelian surat berharga, yaitu menetapkan kas *down payment* atau proporsi yang harus dibayar dengan uang kas untuk membeli surat berharga.
5. *Moral Suasion*, yaitu himbauan moral dari bank sentral untuk mempengaruhi sikap semua pihak yang berkaitan dengan bidang moneter.
6. Kontrol Kredit Selektif, digunakan untuk memastikan bahwa bank-bank umum telah memberikan pinjaman-pinjaman serta berinvestasi sesuai dengan yang diinginkan pemerintah (sesuai regulasi).

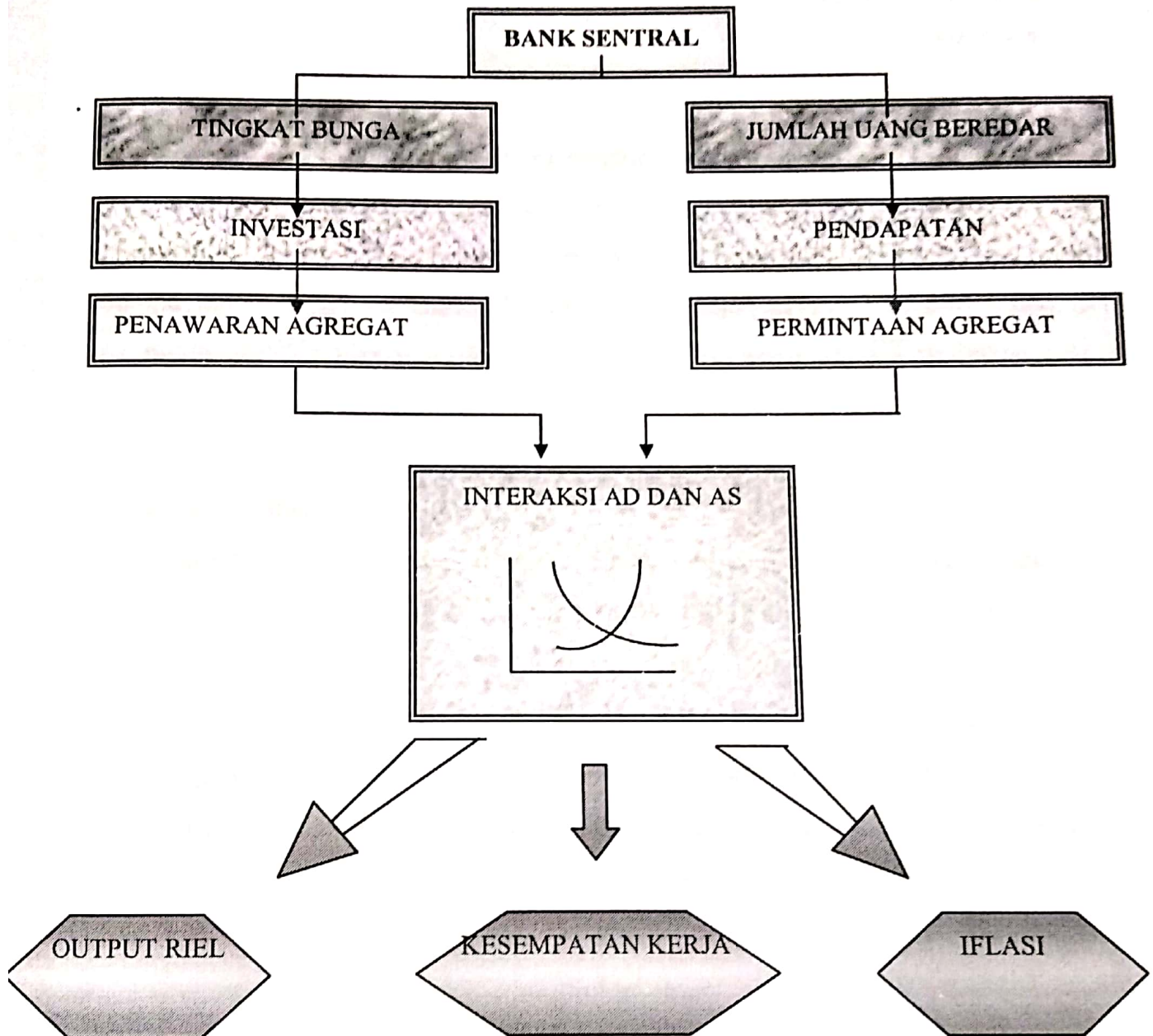
Dalam penggunaannya, instrumen tersebut harus dipilih secara tepat. Karena itu perhitungan-perhitungan yang tepat dengan mempertimbangan berbagai aspek, harus dilakukan. Perhitungan ini kadang-kadang harus menembus batas bidang moneter, bahkan bidang ekonomi. Namun demikian dalam menetapkan perhitungan-perhitungan dasarnya harus tetap juga menggunakan data-data ekonomi supaya data yang diperoleh tidak bias dan

rancu. Baru bila sudah sampai pada tahap pengambilan kebijakan harus dipertimbangkan faktor-faktor lain.

Pertimbangan ini sangat perlu karena dianalogikan dengan dokter yang memeriksa kondisi pasien, akan menentukan obat apa yang tepat untuk pasien, berapa dosisnya dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita jumpai pada saat misalnya keadaan suatu perekonomian sedang dilanda inflasi yang cukup tinggi, sehingga seharusnya bank sentral perlu menaikkan tingkat bunga, namun disisi lain perekonomian sedang dalam keadaan lesu, yang segera perlu dilakukan pemulihan misalnya dengan kebijakan moneter yang ekspansif, misalnya dengan menaikkan jumlah uang beredar atau dengan menurunkan tingkat suku bunga.

Secara sederhana mekanisme kebijakan moneter dapat digambarkan dalam diagram flowcharge sebagai berikut :

Gambar 4.4.  
Mekanisme Kebijakan Moneter



Sumber : Paul A. Samuelson dan William D. Nordaus, 1994, Economics, terj. Ed. 12, hal 389, dengan dimodifikasi.

## **BAB 5**

### ***Sistem Ekonomi Islam***

**\*\*\*\*\***

Bab ini akan membahas secara singkat tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari cara Islam memandang dunia ini. Sistem ini sedikit berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis, meskipun dalam beberapa hal terdapat kesamaan. Pembahasan tentang sistem ekonomi Islam akan mengantarkan kita pada bab berikutnya yang menjadi pokok bahasan penulisan ini yaitu sistem moneter.

#### **5.1. Ekonomi Islam**

Ekonomi, seperti yang diketahui semua orang, lebih merupakan bagian dari suatu aspek kebudayaan. Kebudayaan itu tidak lebih dari pada kehidupan, di mana kehidupan itu mewujudkan dirinya sendiri dalam seluruh ragam dan kekuatannya. Spirit dari setiap kebudayaan adalah pandangan kepada kehidupan dan hubungan yang terkait di dalamnya. Ini adalah cara memandang barang dan materi, yang juga merupakan kecenderungan terhadap tujuan-tujuan yang pasti, yang dipilih dari sekian banyak pilihan; suatu kecenderungan terhadap alat-alat khusus, terpisah dari semua pilihan yang lain. Ia merupakan penuntun bagi semua perilaku individu. Yang menghubungkan satu tingkah laku dengan tingkah laku yang lain.

Ali Fikri dalam Mustafa Kamal (1997) mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai *kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al Qur'an dan Sunah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam bi'ah (lingkungan)*

*dan setiap zaman.* Agama Islam dilandasi postulat iman dan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari Islam dapat diterjemahkan kedalam teori dan diinterpretasikan ke dalam praktek tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Dalam ajaran perilaku individu dan masyarakat diarahkan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal ini menjadi subyek yang dipelajari dalam ekonomi Islam.

S.M. Hasanuz Zaman dalam Rahardjo (1991;113) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai berikut :

(Ilmu) Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari suruhan-suruhan dan tata aturan syariah, yang bertujuan mencegah ketidakadilan dalam pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber material, guna memenuhi kebutuhan manusia sehingga memungkinkan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan kewajiban masyarakat.

Perbedaan tersebut dengan definisi pada umumnya pada ilmu ekonomi adalah tekanannya pada usaha "mencegah ketidakadilan" serta pada tujuannya yang tidak saja untuk memenuhi kebutuhan kebendaan, namun juga untuk melaksanakan perintah Allah dan kewajiban kemasyarakatan.

Metwally (1995) memberikan definisi tersendiri :

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, Hadits Nabi (Muhammad), Ijma dan Qias. Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber utama agama Islam, sedangkan ijma dan qias merupakan pelengkap Al-Qur'an dan Hadits.

Usaha lain untuk mendefinisikan ekonomi Islam dilakukan oleh M. Akram Khan yang mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai :

*suatu ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki keberhasilan manusia (human falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. (Rahardjo, 1991;114)*

Perbedaan pokoknya terletak pada penolakan Akram Khan pada asumsi kelangkaan. Dia berpendapat bahwa Al Qur'an memberitahukan pada kita bahwasanya Allah memberikan kecukupan dalam sumber-sumber kehidupan. Jadi walaupun ada kelangkaan, maka hal itu lebih disebabkan karena kurangnya penggunaan secara tepat warisan alam atau karena ketidakseimbangan dalam distribusinya. Dan tugas manusia adalah untuk memulihkan sumber-sumber itu hingga mencukupi, dengan memperluas dasar-dasar produktif, memperbaiki ketrampilan teknis, redistribusi sumber-sumber atau menghilangkan penyalahgunaan sumber-sumber, atau menahan keinginan yang berlebihan. Syariah telah memiliki ketentuan yang mengatur pemilikan, pemanfaatan dan pengalihan sumber-sumber tersebut. Ia setuju untuk meninjau kembali paradigma ekonomi barat yang mendasarkan diri pada premis rasionalitas penggunaan sumber-sumber, di mana tiap-tiap individu cenderung untuk memaksimalkan kepuasannya masing-masing (*maximize utility*).

Ciri lain dari definisi ekonomi Islam adalah adanya prinsip kerjasama dan partisipasi, yang menegaskan bahwa, selain pada dasarnya manusia itu serakah, ia juga punya dasar altruistik untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menurut Siddiqi (1991), dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek ekonomi Islam, pandangan hidup Islam atau pandangan Islam terhadap kehidupan adalah sebagai berikut :

Allah yang maha kuasa adalah pencipta dan raja seluruh alam semesta termasuk manusia . Rentang keberadaan manusia



tidak semata-mata hanya duniawi ini tetapi bersambung hingga ke alam baka. Manusi walaupun bebas menentukan pilihan dan jalan hidupnya, namun bertanggung jawab terhadap kelakuannya di kehidupan kemudian di mana kebahagiaan kekal dan siksaan yang abadi akan menjadi bagiannya sesuai dengan perbuatannya di dunia. Ini hanya merupakan pola khusus dari kelakuan yang diharapkan di dunia dan akan sukses di kehidupan akhir. Pola ini memberikan keseimbangan hidup duniawi dari arah secara lengkap sesuai dengan harapan serta pencapaian kemakmuran material. Pola ini menjamin kemakmuran dan keberhasilan hidup, untuk individu dan masyarakat, secara material dan spiritual. (Siddiqi, 1991; 17-18)

Maksud tentang pandangan di atas adalah bahwa keberhasilan terletak pada umat yang baik. Lebih sesuai tingkah laku seseorang dengan standart-standart moral serta tingkatan yang lebih tinggi kebaikannya, maka akan lebih berhasillah dia. Di sini kita akan memperhatikan bahwa konsepsi Al Qur'an tentang kebaikan bersifat menyeluruh, dalam arti bahwa kebaikan itu bukan hanya ditujukan pada individu-individu, melainkan juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya apa hubungannya pemahaman ini dengan bidang ekonomi? Ada tiga hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan ini yaitu :

1. Adalah kebaikan dan kebajikan yang harus menjadi tujuan seseorang dalam tingkah laku ekonominya.
2. Pola hubungan ekonomi yang nyata dan diinginkan adalah kerjasama yang aktif.

3. Untuk memungkinkan kemajuan bersama ke arah kebaikan dan kebajikan, persediaan material yang diperlukan masyarakat harus tersedia setiap waktu.

Islam tidak membatasi usaha-usaha untuk kemajuan material yang pasti sebagai suatu kondisi yang sangat diperlukan bagi perkembangan sosial yang diperlukan, justru ia mendesak tiap individu untuk membuat semua usaha tercapai dan membentuk suatu masyarakat di mana tiap individu berusaha demikian.

Namun semua ada batasannya, karena bagi Islam, hidup ini memiliki aspek lain yang juga penting dan saling berhubungan secara menyeluruh, selain aspek ekonomi, dalam arti perhatian manusia pada usaha-usaha manusia untuk mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi tidak menjebak manusia untuk hanya memikirkan aspek ekonominya saja. Karena itu kehidupan yang seimbang menuntut kelayakan alokasi usaha-usaha manusia dan sumber-sumber daya alam secara lebih baik dan adil.

## 5.2. Sumber Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi yang saat ini berkembang di barat, dan menjadi kiblat di banyak negara berkembang, diderivasikan dengan pendekatan empiristik yang deduktif maupun induktif bahkan ada kecenderungan untuk menjadi positivis yang mengabaikan aspek normatif. Namun sebenarnya Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling normatif diantara ilmu-ilmu sosial lainnya. Dengan demikian sudah seharusnya sudah mengintegrasikan antara positivisme dan normativisme. (Iggi Haruman A, 2000:13)

Islam memberikan jalan tengah yang adil yang dengannya Allah menjadikan ciri khas umat. Antara dunia dan akhirat, antara akal dan ruhani, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat dan sebagainya.

Termasuk juga didalamnya Islam mengatur persoalan kehidupan yang bernama ekonomi itu. Adapun sumber – sumber ekonomi Islam adalah :

### **1. Al-Qur'an**

Al Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam yang didalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dan mengatur kegiatan ekonomi. Al Qur'an merupakan petunjuk yang lengkap dan sempurna yang terdiri dari bagian-bagian yang saling merangkum dan melengkapi. Ayat-ayatnya ada yang bersifat prinsipil yang sudah jelas (qathi) dan ada yang bersifat umum (Zanni). Bagi ayat yang sudah jelas tidak lagi memerlukan interpretasi. Namun ayat-ayat yang bersifat zanni masih memerlukan interpretasi-interpretasi lebih lanjut dan dibahas dengan suatu ilmu yang bernama tafsir.

Ilmu ekonomi moneter masuk ke dalam ibadah muamalah. Lingkup muamalah ini didominasi ayat-ayat yang sifatnya zanni daripada qathi, sehingga tafsir yang dibutuhkan sudah sewajarnya bersifat teoretis faktual, tanpa meninggalkan aspek normatifnya sebagai wujud keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi (Iggi, 2000).

### **2. As Sunnah**

As Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat kita jumpai aturan perekonomian Islam. Secara literal, sunnah berarti cara, kebiasaan (custom habit of life) yang merujuk pada perbuatan, ucapan dan ketetapan (taqrir) implisit dari Rasulullah SAW. Sunnah adalah penjelasan atau pengejawantahan Al Qur'an karena Rasulullah adalah orang pertama dan langsung menerima dan dibimbing secara ilahiah untuk memahaminya.

### **3. Ijma'**

Ijma' adalah kesepakatan dari para sahabat atau ahli hukum Islam (fuqaha, atau mufti) atas permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit

dalam Al Qur'an maupun As Sunah dengan tetap merujuk pada bimbingan keduanya. Ijma' sangat diperlukan dengan semakin berkembangnya masyarakat, sehingga timbul permasalahan-permasalahan baru yang lebih kompleks.

#### **4. Ijtihad dan Qiyas**

Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha secara sungguh-sungguh penuh keihlasan dengan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk sampai pada penilaian sendiri atas sesuatu hukum dengan bimbingan Al Qur'an dan As Sunah. Secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan alasan logika rasional dalam menginterpretasikan teks Qur'an dan Hadits yang bersifat umum (zanni). Qiyas adalah sebuah metode mencari hukum dengan logika deduktif analogis (perbandingan).

Penggunaan epistemologis keseluruhan dasar-dasar atau sumber – sumber tersebut diatas untuk mencapai suatu koherensi tentang sesuatu hal secara integral disebut sebagai “Shuratic Process” (Choudhury, 1997)<sup>15</sup>

#### **5.3. Penerapan Syariah Islam di bidang Ekonomi**

Perubahan budaya masyarakat dari suatu sistem nilai ke sistem nilai yang baru membutuhkan waktu yang cukup banyak. Demikian juga proses transformasi dari masyarakat ekonomi konvensional menjadi masyarakat ekonomi Islam tidak akan terjadi dalam waktu sekejap.

Menurut Ibnu Khaldun sebagaimana dijelaskan oleh Chapra (2000) masyarakat yang Islami terbentuk dari lima komponen yaitu pemerintah (Khilafah), syariat, umat, kekayaan, pembangunan dan hukum. Sedangkan

---

<sup>15</sup> Metode ini cukup populer dan sering digunakan untuk mencari bentuk konsepsi dari sesuatu yang lebih bersifat spesifik, misalnya konsep uang, bank dan lain-lain. Skema Shuratic Process ini dapat dilihat dalam lampiran 1. Lihat Masudul alam Choudhury, Money in Islam; A Study in Islamic Political Economy, hlm. 10-15.

Penegakan syariah Islam di bidang ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga level lapangan permainan yaitu:

Tabel 5.1. Komponen Masyarakat Islam

	Teori Ekonomi Islam	Sistem Ekonomi Islam	Perekonomian Umat Islam
Komponen Bahasan	Aqidah Adil Nubuwa Khilafah Ma'ad	Kepemilikan individu, Kepemilikan bersama, Kepemilikan negara Kebebasan bertransaksi dalam kerangka syariah Kesejahteraan sosial (pemenuhan kebutuhan dasar bagi si miskin dan penciptaan hubungan harmonis si kaya dan si miskin)	Pola laku Muslimin muslimat pelaku ekonomi
Wacana	Ilmu	Regulatory rule : apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan Constitution rule : definisi	Kinerja unit ekonomi umat Islam
Pelaku Utama	Ilmuwan	legislatif, Pemerintah	Ummat Islam
Dalil	Qur'an & Hadits	Kaidah Fiqih "Al-Aslu fil Asy-yaa' al-ibahah ma lam yamna'ha syara'un"	"Antum A'lamu bi Umuri Dunyakum**

Sumber : Adiwarman A. Karim : 2001

Keterangan : \* Artinya : Asal dari segala sesuatu adalah boleh selama belum ada hukum yang mengharamkannya

\*\* Artinya : Kamu lebih mengetahui urusan duniamu

Jadi untuk menegakkan syariah Islam di bidang ekonomi mencakup semua level seperti yang telah digambarkan di atas. Penegakan salah satu level saja tidak akan menghasilkan tegaknya syariah Islam dalam bidang ekonomi.

Seperti yang dijelaskan oleh Karim (2001), Berawal dari teori ekonomi Islam, dalam komponen bahasan (aqidah, 'adalah, nubuwah, khilafah dan ma'ad) selanjutnya perlu diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi Islam dengan konsep-konsep kepemilikan (individu, bersama, dan negara), kebebasan bertransaksi sesuai syariah, serta konsep kesejahteraan sosial. Dari sistem ekonomi Islam ini selanjutnya dibangun perekonomian umat Islam sebagai tindakan riil. Selanjutnya dari wacana ilmu dari teori ekonomi Islam perlu wujudkan ke dalam sistem dengan wujud pembentukan aturan-aturan seperti *regulatory rule*, untuk mengatur apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, serta *constitution rule*, untuk mendefinisikan kembali beberapa institusi dan transaksi agar sesuai dengan, dan mudah dimengerti oleh masyarakat yang pada akhirnya akan memperbaiki kinerja perekonomian umat Islam. Demikian juga dari segi pelaku utama. Jika dalam teori pelaku utamanya adalah para ilmuwan, harus diwujudkan dalam bentuk sistem sehingga perlu campur tangan kalangan legislatif dan eksekutif sebelum akhirnya dijalankan bersama oleh umat.

#### **5.4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Secara garis besar prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Dalam Ekonomi Islam, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin. Dalam hal produksi, maka hasil-hasilnya digunakan untuk memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang

terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti.

2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, apakah dia seorang pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT seperti yang tercantum dalam Al Qur'an :

*“Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu...”(QS 4 : 29).*

4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al Qur'an mengungkapkan bahwa:

*“ Apa yang diberikan Allah kepada rasulNya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu , adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu tak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS 57 : 7) .*

Oleh karena itu sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi Kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.

5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa ,

*“masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api” (Al Hadits).*

Rasulullah menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri, tidak boleh dikuasai oleh individu.

6. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhir oleh karena itu Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan. Orang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya, yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Menurut pendapat ulama dan fuqaha, zakat dikenakan 2,5% untuk semua kekayaan yang tidak produktif (idle assets), termasuk didalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (net earning from transaction), dan 10% dari pendapatan bersih investasi.
7. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman.

Sedangkan secara ringkas Zainul Arifin (1999)<sup>16</sup> merumuskan prinsip – prinsip ekonomi Islam sebagai berikut :

1. Kekayaan adalah dari Allah dan tidak dapat dimiliki secara mutlak
2. Manusia diberi kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syariah
3. Manusia merupakan khalifah dan pemakmur di muka bumi (QS.2:30)

---

<sup>16</sup> Zainul Arifin, 1999, *Memahami Bank Syariah-Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, edisi 1, Penerbit Alva Bet, Jakarta, hal.114



4. Di dalam harta seseorang terdapat bagian dari orang miskin , yang memintaminta atau tidak memintaminta (QS. 70: 24-25)
5. Dilarang memakan harta sesama secara batil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka (QS. 4: 29-30)
6. Penghapusan praktek riba (QS. 2:275)
7. Penolakan terhadap monopoli

Selanjutnya Arifin (1999) juga berpendapat bahwa dalam ekonomi Islam dibedakan antara money dan kapital, dimana money adalah *flow concept*, artinya semakin cepat uang beredar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat sehingga perekonomian akan semakin baik. Hal ini barangkali berdasarkan logika bahwa semakin cepat perputaran uang, menunjukkan suatu perekonomian yang semakin aktif. Oleh karena alasan inilah qard dan shodaqoh sangat dianjurkan dalam Islam, yang secara makro akan mempercepat perputaran uang. Sedangkan capital adalah *stock concept* yang bisa dimiliki siapapun.

Lebih jauh ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam Islam tidak dikenal uang untuk spekulasi (*money demand for speculation*). Dalam Islam, uang adalah *public good*, Artinya uang adalah milik masyarakat secara keseluruhan karenanya tidak boleh untuk ditimbun, apalagi diperjualbelikan. Sedangkan modal adalah *privat good* dimana tiap individu atau entitas yang memilikinya bisa menggunakannya. Islam tidak mengenal konsep *time value of money*, namun ada yang cenderung kepada konsep *economic value of time*. Perbedaan utama dari dua konsep tersebut adalah bahwa yang memiliki nilai waktu itu bukan uang (sebagaimana dalam konsep *time value of money*), namun waktu itu sendirilah yang memiliki nilai ekonomi. Perbedaan ini berimplikasi pada konsep transaksi yang berhubungan dengan jangka waktu.

Satu hal lagi yang sangat ditekankan adalah upaya mewujudkan suatu keadilan dalam masyarakat dan juga dalam kerangka menjaga kestabilan ekonomi dengan menekankan adanya keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Beberapa prinsip transaksi yang digunakan dalam ekonomi Islam menunjukkan hal ini. Sebagai contoh adalah kontrak mudharabah atau musyarakah dengan basis bagi hasil (*profit and loss sharing*) dimana antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) saling bertanggung jawab akan hasil yang dicapai. Dalam hal ini pihak yang terkait adalah pemilik dana (misalkan penyimpan dana di perbankan) dengan yang mengelola dana tersebut (misalkan bank itu sendiri), atau antara bank dengan pengusaha yang mengelola di sektor riil.

### 5.5. Transaksi Dalam Islam

Untuk melakukan kegiatan sosial (*muamalah*) banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam Islam. Barangkali penjelasan secara lebih rinci mengenai bentuk-bentuk transaksi tidak perlu dijelaskan di sini. Namun demikian beberapa prinsip dasar perlu dikemukakan disini dalam kerangka mendukung transaksi dalam sistem ekonomi dan sistem moneter Islam. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

#### 1. *Al Wadiah*

Yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) di mana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.

- *Al wadiah amanah*

Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.

- *Wadiah Dhamanah*

Pihak penyimpan dengan atau tanpa ijin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

- 2. *Al Mudharabah*

Perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (entrepreneur). Mudharabah merupakan hubungan berserikat antara dua pihak yaitu pemilik dana atau harta dan pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal., kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha. Beberapa varian dari kontrak ini adalah :

- *Mudharabah* Khusus, yaitu pemberian dana oleh seseorang ,sementara itu usaha mudharabah dilakukan oleh seorang, sebagai individu atau badan hukum.
- *Mudharabah* Berserikat, yaitu dalam hal ini bank-bank menerima dana dari berbagai sumber untuk kemudian dipergunakan dalam bentuk mudharabah.
- *Mudharabah* Mutlak, yaitu penerima dana (mudharib) memiliki kebebasan untuk mempergunakan dana yang diterimanya tanpa adanya

persyaratan-persyaratan tertentu dari pemilik dana, misalnya bentuk perdagangan atau usaha lainnya, waktu dan pelaksanaan kegiatan. Mudharib dalam hal ini tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya di samping untuk mendapatkan keuntungan. Jenis mudharabah inilah yang banyak dipraktekkan oleh bank Islam dalam penerimaan dana masyarakat mengingat sifatnya yang lebih fleksibel.

- *Mudharabah* Bersyarat, yaitu kebalikan dari mudharabah mutlak di mana pemilik dana menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh mudharib dalam pengelolaan dana yang diterimanya.

### 3. *Al Musyarakah*

Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing. Sistem ini merupakan konsep dasar dari bank syariah. Hubungan bank dengan nasabahnya adalah hubungan partner, bukan sebagai kreditur dan debitur.

### 4. *Al Murabahah*

Persetujuan jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan tersebut meliputi jangka waktu dan cara pembayaran sekaligus.

### 5. *Al Bai Bithaman Ajil (BBA)*

Persetujuan jual beli barang dengan harga pasar sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan tersebut mencakup jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.

#### 6. *Al Ijarah (Leasing)*

Perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut untuk membayar sewa dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

#### 7. *Al Ijarah al Muntahian Bit –tamlik (IMB)*

Yaitu perpaduan antara jual beli dan sewa. Yaitu sebagaimana al Ijarah biasa namun diakhiri dengan pembelian barang yang disewa.

#### 8. *Al Ta'jiri*

Perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dijual oleh pemiliknya kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.

#### 9. *Al Sharf*

Kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Apabila yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai uang tersebut haruslah sama, dan penyerahannya dilakukan pada waktu yang sama.

#### 10. *Al Qard ul Hasan*

Perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama, dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi. Atas kerelaannya, peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik uang/barang.

### *11. Al Bai Al Dayn*

Perjanjian jual beli secara diskonto atas piutang atau tagihan yang berasal dari jual beli barang dan jasa.

### *12. Al Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain di mana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi tertentu yang menjadi hak penerima jaminan.

### *13. Al Rahan*

Menjadikan barang berharga sebagai agunan untuk menjamin dipenuhinya suatu kewajiban.

### *14. Al Hiwalah*

Pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain.

### *15. Al Wakalah*

Perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas / kerja atas nama pemberi kuasa.

### *16. Al Muzara'ah*

Adalah perjanjian pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

### *17. Al Musaqah*

Adalah seperti muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

## 5.6. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Satu hal yang perlu dicatat dengan perkembangan ekonomi Islam yang pesat adalah terjadinya beberapa aliran pemikiran dalam ekonomi Islam kontemporer. Selain para ahli ekonomi yang lama, yang kebanyakan juga ahli dalam beberapa bidang kajian lain, ada juga ahli ekonomi yang secara khusus memang mendalami ekonomi Islam. Mereka ini yang memelopori perkembangan ekonomi Islam pada abad ini. Pada dasarnya pemikiran ekonomi Islam kontemporer dapat dibagi menjadi tiga aliran sebagai berikut : (Daniel Ilyas,2001)

### 1. *The First School* (Aliran Pemikiran Pertama)

Tokohnya-tokohnya diantaranya Baqir As Sadr dan Baqir Al Hasan yang mendefinisikan ekonomi adalah bagaimana memecahkan sumber daya yang terbatas dengan keinginan yang tidak terbatas (unlimited wants). Mereka juga membedakan antara keinginan-keinginan atau hasrat manusia (wants) dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan (needs). Mereka membagi Ilmu Ekonomi menjadi dua yaitu :

1. *Science of Economics*, yaitu ilmu ekonomi positif yang kita kenal dari barat.
2. *School of Economics (Phylosophy)*, yaitu Ilmu Ekonomi Normatif dimana Ilmu yang dipelajari tidak terpisahkan dari nilai-nilai normatif yang mendasarinya.

Menurut aliran ini, Ilmu Ekonomi Islam termasuk dalam *School of Economics*. Karena *Science of Economic* didapat dari penelitian sosial seperti ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan *School of Economic* - yang bukan hanya didapat dari penelitian sosial, namun juga ada unsur Syariahnya - dapat berbeda-beda dengan sistem pengajaran yang berbeda pula. Aliran pertama ini memiliki kontribusi dengan mencoba mendefinisikan dan merekonstruksi kembali ilmu ekonomi sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

## **2. *The Second School* (Aliran Pemikiran Kedua)**

Tokoh-tokohnya : Muhammad Abdul Manan, Muhammad Nejatullah Siddiqi dan lain-lain. Kebanyakan disebut sebagai ekonom mainstream yang diasosiasikan pada *Islamic Development Bank* (IDB). Sebagaimana diketahui dalam aliran mainstream, ekonomi adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan dari sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas (*unlimited wants*) dengan petunjuk syariah. Permasalahan itu diselesaikan dengan sendirinya lewat individu yang memaksimalkan kepuasan dan dengan tarik menarik antar kepentingan tersebut yang tercermin dari kekuatan pasar.

Menurut Aliran ini ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini yang tidak melanggar syariah yaitu dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan kekuatan pasar dan sekaligus dengan kekuatan non pasar.

Kontribusi : Aliran ini mencoba memformulasikan model ekonomi dari ekonomi Islam, yang mudah dipahami oleh ekonom-ekonom lain. Mereka membuat semacam sintesis dari perekonomian yang ada dengan petunjuk-petunjuk Al Qur'an.

## **3. *The Third School* (Aliran Pemikiran Ketiga)**

Mereka berpendapat bahwa para ekonom Islam harus meluaskan ilmu ekonomi Islam, seperti ilmuwan sosial sekuler lainnya. Menganalisa kasus kasus dengan logika, membentuk teori yang saintifik dan berdasarkan bukti empiris. Jadi mereka menganjurkan metode Induktif dan bukan hanya menjabarkannya secara generalisasi. Jadi proses review yang dilakukan secara rutin pada ilmu sosial juga harus diaplikasikan sehingga, sebagai suatu ilmu, Ekonomi Islam harus dibentuk dengan kritis. Hal-hal yang diperlukan adalah usaha pembentukan masyarakat ekonomi Islam, yang dimulai dengan



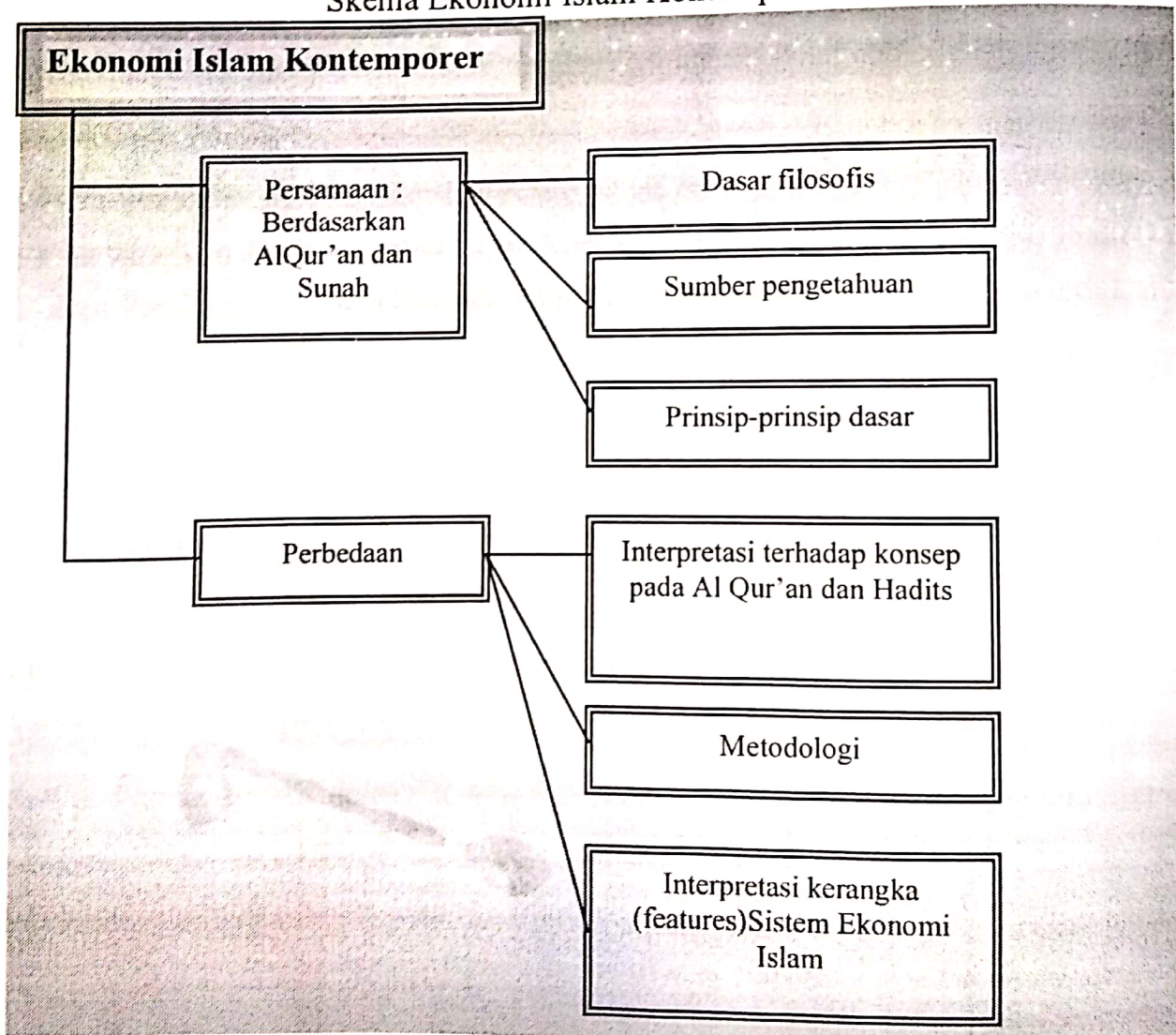
pembangunan institusi-institusi sehingga dalam jangka panjangnya diharapkan dapat digunakan sebagai data-data empiris.

Tokoh-tokohnya aliran ini diantaranya Timur Kuran, Jomo, M. Arief dan lain-lain. Jika dilihat dari visi dan misinya, aliran ketiga ini lebih menyukai suatu tindakan praktis dari penerapan ekonomi Islam.

Kontribusi aliran ini adalah mereka telah berusaha membuat ekonomi Islam secara ilmiah yang lebih saintifik yang diakui kebenarannya melalui usaha-usaha kritis yang dilakukan.

Secara sederhana berbagai Aliran pemikiran ekonomi Islam kontemporer dapat digambarkan dalam skema seperti dalam gambar 5.1.

Gambar 5.1.  
Skema Ekonomi Islam Kontemporer



Sumber : Daniel ( 2001), disampaikan dalam kuliah informal Ekonomi Islam, di Student Centre Universitas Indonesia.

# BAB 6

## Sistem Moneter Islam

\*\*\*\*\*

### 6.1. Peranan Uang Dalam Ekonomi Islam

Kebanyakan ahli ekonomi Islam sependapat bahwa uang bukanlah komoditi yang dapat diperjualbelikan dengan bebas, namun lebih kepada fungsi utamanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan pengukur nilai (*unit of account*).. Mengutip pendapat Imam Ghazali dalam kitabnya "*Ihya Ulumuddin*", Karim (2000) mengungkapkan bahwa uang bagaikan cermin yang tidak punya warna, namun dapat merefleksikan semua warna, sedangkan warna yang dimaksud di sini adalah harga<sup>17</sup>.

Taqyuddin An Nabhani mendefinisikan uang secara sederhana sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga (Nabhani,1996, hal.297).

Dalam bukunya "Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah", Islahi (1997)<sup>18</sup> menelusuri sejarah mata uang yang pernah digunakan umat muslim sebagai berikut :

"Selama Rasulullah menjadi kepala negara di Madinah, pemerintahan yang dipimpinnya belum memiliki mata uang sendiri, melainkan menggunakan mata uang Dinar (berupa emas) yang diimpor dari Romawi dan Dirham (berupa perak) dari Persia. Banyaknya uang yang masuk ke perekonomian Madinah tergantung pada volume komoditas barang yang diekspor ke kedua negeri

---

<sup>17</sup> Adiwarmam A. Karim, 2000, *Telaah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian*, dalam makalahnya yang disampaikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam di Undip Semarang, hlm. 3.

<sup>18</sup> A.A., Islahi, 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terjemahan, Anshari Thayib, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya.

tersebut dan wilayah bawahannya. Secara alamiah, jika permintaan terhadap uang meningkat di pasar lokal, maka uang diimpor. Sebaliknya, jika permintaan uang menurun maka komoditas yang diimpor.

Tujuh abad kemudian, menurut catatan Ibnu Taimiyah, Dinasti Mamluk yang berkuasa di Suriah dan Mesir sekitar abad ke-7 H, menggunakan tiga jenis mata uang, yaitu uang Dinar (emas), Dirham (perak) dan Fals (tembaga). Uang Dinar sangat langka di masyarakat, sehingga yang banyak digunakan adalah uang logam Fals atau fulus dari tembaga. Sirkulasi uang Dirham selalu berfluktuasi, bahkan kadang-kadang tidak ada di pasaran.

Para penguasa Mamluk, meski belum memiliki sistem moneter, telah mewarisi sistem mata uang dari pendahulunya, penguasa Ayyubiah (Shalahuddin al-Ayyubi dan keturunannya). Menurut Maqrizi, pada periode Ayyubiah, yang paling banyak beredar adalah uang Dirham, sementara uang Dinar tidak begitu dihargai, karena seluruh harga ditentukan dengan Dirham. Begitu pula pajak, upah, sewa dan sebagainya, semuanya dibayar dalam Dirham.

Pada zaman Mamluk inilah, dapat dikatakan bahwa dunia Islam mengalami masalah keuangan (moneter). Menurut Maqrizi, ketika itu terjadi kelangkaan mata uang, masyarakat mulai melakukan transaksi kecil-kecilan menggunakan sistem *barter*. Karena masyarakat sangat membutuhkan keberadaan mata uang untuk melaksanakan transaksi-transaksi kecil, sejak itu pula Sultan Kamil Ayyubi mengenalkan uang tembaga, yang disebut *fulus* (bentuk jamak dari *fals*). Karena itu, penerbitan uang receh dari tembaga (*fulus*) menjadi sangat menolong.

Tetapi kondisi ini memburuk ketika Sultan Kitbugha dan Zahir Barquq -karena ingin mengeksploitasi penduduk untuk meningkatkan kekayaannya-- mencetak mata uang tembaga dalam jumlah besar sehingga nilai nominal jauh lebih besar dari nilai intrinsiknya. Karenanya, penduduk cenderung enggan

menerima pembayaran dengan mata uang itu. Kemudian Sultan Kitbugha memproklamkan bahwa nilai *fulus* ditentukan oleh bobot timbangannya dan bukan angkanya. Untuk memulainya, dia menetapkan satu *ratl* atau *fulus*, nilainya sama dengan dua dirham.

Sultan Barduq tidak menyandarkan sumber bahan tembaga yang digunakan untuk penerbitan mata uang itu dari hasil tambang negerinya sendiri, dan mengimpor dari negara-negara Eropa. Ia membangun percetakan uang di Kairo dan Alexandria untuk mencetak *fulus* tembaga itu dalam jumlah besar. Konsekuensinya, uang dirham menghilang dari pasaran.

Ibnu Taimiyah mempunyai pengalaman beberapa kali turunnya nilai mata uang koin yang terjadi di Mesir, di bawah pemerintah sultan dari Dinasti Mamluk. Ia meminta sultan untuk memeriksa penyebab menurunnya nilai uang tersebut, yang menyebabkan terjadinya kekacauan ekonomi. Penurunan nilai mata uang sangat ditentang oleh Ibnu Taimiyah, demikian juga dengan pencetakan uang yang terlalu banyak. Dia mengatakan, "Otoritas pemerintah harus mencetak mata uang koin (emas maupun perak) sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya."

Pada pemerintahan Sultan Nasir, nilai satu *ratl* atau *fulus* bervariasi antara dua dan tiga dirham. Ketika nilai satu *ratl* atau *fulus* mencapai 3 dirham, seseorang yang membeli barang dengan fulus pada tingkat harga yang rendah menderita kesulitan bahkan ada yang harus menutup tokonya. Sultan Nasir berusaha memperbaiki keadaan itu, kemudian menerbitkan mata uang *fals* senilai 1 dirham, yang nilainya bisa diterima seperti harga sebenarnya. Situasi itu hanya berhasil baik tahun 1358, ketika cucu Sultan Nasir, yakni Nasir Hasan, membatalkan mata uang fulus yang ada dan menerbitkan uang logam baru.

Pada masa awal Dinasti Mamluk uang Dirham itu terdiri dari dua pertiga perak dan seperti tembaga. Tetapi karena perubahan waktu, proporsinya

kemudian dibalik. Nilai tukar dirham dan dinar juga berfluktuasi. Satu dinar di masa pemerintahan Sultan Zahir Baibar bernilai 28,5 dirham. Di masa pemerintahan Sultan Nasir, turun menjadi 25,5 dirham. Bahkan jatuh lagi menjadi 17 Dirham, ketika ia harus meningkatkan pengeluaran cukup besar untuk membiayai perang dan sejumlah uang dinar disuntikkan ke pasar mata uang.

Menjelang akhir masa pemerintahan Sultan Harun, ia mengeluarkan dekrit yang cukup mengejutkan rakyatnya. Kebijakan tersebut berupa dekrit yang isinya melarang penduduk menjual atau membeli emas. Seluruh penduduk harus menyerahkan emas mereka ke percetakan mata uang dan ditukar dengan Dirham. Maqrizi mencatat hal itu sebagai ketidakadilan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibat dari kebijakan itu, harga emas melejit tinggi. Di tahun 1336, Sultan Nasir membelanjakan uang untuk membebaskan orang Mamluk senilai 200.000 Dirham, setara dengan 4.000 Dinar. Berarti, nilai tukar satu Dinar sama dengan 50 Dirham. Secara umum, sistem mata uang selama periode itu memang tidak stabil. Peredaran sejumlah besar mata uang tembaga *fulus* dan peningkatan kepercayaan terhadap mata uang membuat nilainya merosot dan mendorong terjadinya situasi *inflatoir* yang terus menaik dan memburuk. Ibnu Taimiyah sangat mempertimbangkan pentingnya nilai intrinsik dari mata uang koin, sesuai dengan nilai logamnya, sehingga sesuai dengan kekuatan jual beli di pasar. Karena itu tak seorang pun (termasuk penguasa) mencari keuntungan dengan melebur koin itu atau menjualnya dalam bentuk logam atau mengubah metal itu menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang.

Perlu dicatat bahwa Sultan Mamluk terlibat dalam praktek yang disebutkan Ibnu Taimiyah sebagai 'perdagangan uang'. Ibnu Taimiyah meminta kepada penguasa agar tidak mengatakan, mata uang yang ada di tangan penduduk tidak berlaku lagi. Jika diperlukan, mencetak lebih banyak lagi mata

uang, tetap pada nilai (logam) sebenarnya, tanpa mengambil keuntungan sedikitpun darinya. Ia secara khusus menggambarkan bahwa setiap biaya pencetakan uang seperti itu bisa diambil dari Baitul Maal.

## 6.2. Konsep Dasar Keuangan Dalam Islam

Adanya suatu kenyataan bahwa perkembangan keuangan dalam Islam (*Islamic finance*) merupakan representasi masuknya hukum-hukum religius dalam

wilayah kehidupan komersial. *Islamic Finance* telah hadir menyusul hukum komersial sekuler yang dipresumsikan lebih efisien dan superior, dan mencoba melengkapi hukum komersial yang memisahkan dirinya dari pertimbangan religius dan kepatuhan atas ajarannya.

Keuangan Islam yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip komersial keuangan pada dasarnya memiliki dua pendekatan. Pertama, disiplin yang mengajukan alternatif-alternatif baru terhadap keuangan komersial konvensional. Kedua, melakukan revaluasi konsep dan praktek yang ada tersebut sejalan dengan fikih.

Konsep-konsep keuangan Islami secara umum dapat dibagi menjadi empat bagian besar yaitu :

1. Kepemilikan atau harta benda

Terkait dengan dasar manajemen harta dan kewajiban zakat.

2. Pelarangan riba

Membawa konsekuensi logis tentang penggunaan hutang (debt), penilaian kembali konsep *time value of money*, dan juga *cost of capital*.

3. Perjudian (*maysir/gambling*) dan resiko (*gharar/risk*)

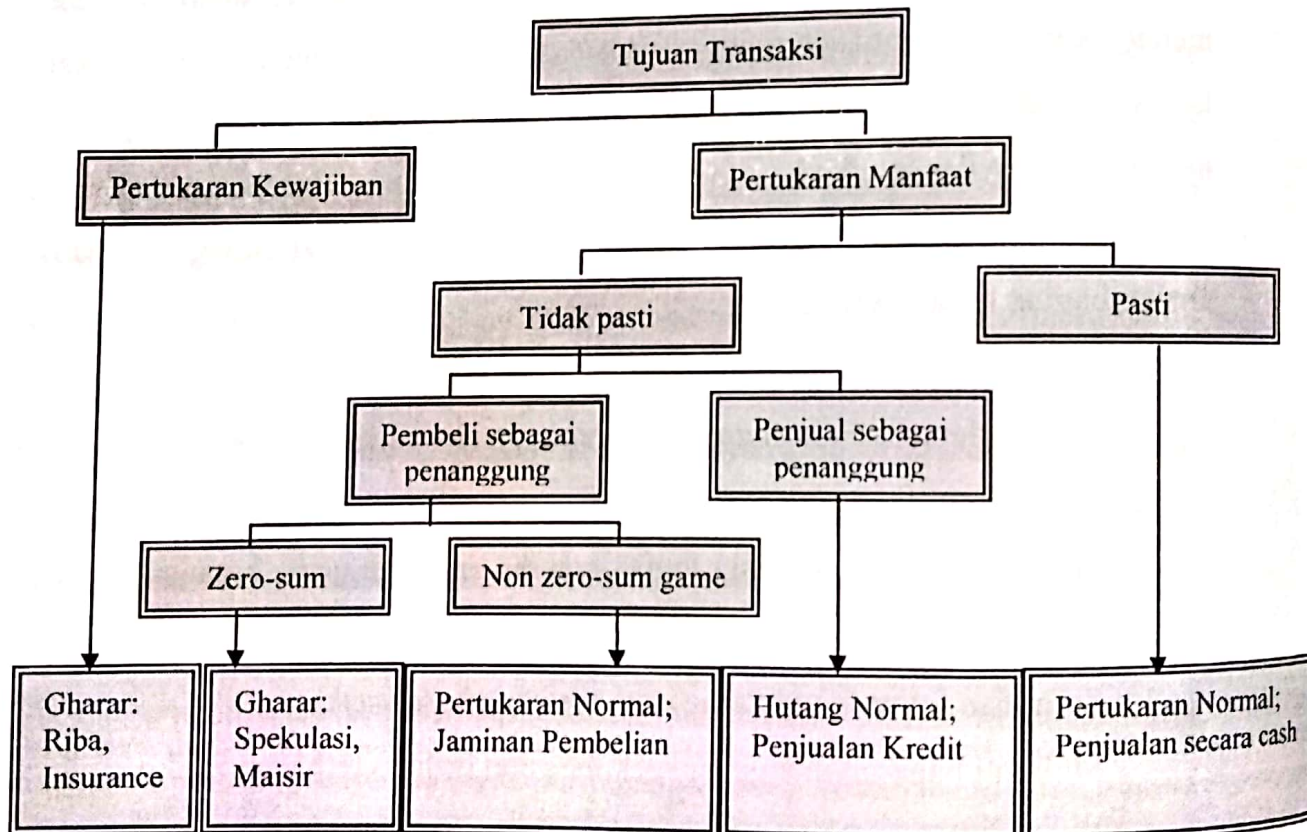
Meliputi bahasan mengenai spekulasi dan perilaku terhadap resiko

4. Kontrak komersial atau transaksi

Evaluasi terhadap institusi-institusi dan instrumen-instrumen yang boleh ataupun yang tidak boleh digunakan, berikut cara pengolahan yang dilakukan.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, Adi Warman (2001) memberikan sedikit penjelasan, terutama jika dikaitkan dengan konsep keadilan dalam Islam di mana Islam mendefinisikan keadilan sebagai 'tidak menzalimi dan tidak dizalimi' (*la tazhlimuuna wala tuzhlamuun*). Tidak seperti dalam konsep Kapitalisme, dalam hal ini Kapitalisme klasik yang mendefinisikan adil sebagai 'anda dapat apa yang anda upayakan' (*you get what you deserved*). Konsep ini tersusun dalam skema sebagai berikut :

Gambar 6.1  
Transaksi Dalam Islam



Sumber : Karim ( 2001)



Dari skema di atas dapat sedikit dijelaskan pada dasarnya tujuan transaksi dalam ekonomi terbagi menjadi dua macam yaitu untuk pertukaran manfaat dan pertukaran kewajiban. Dalam Islam pertukaran kewajiban jelas haram karena termasuk dalam kategori gharar. Sedangkan dalam pertukaran manfaat ada dua hal yaitu adanya kepastian dan ketidakpastian. Dalam kondisi pasti, tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan karena hal tersebut sebagai pertukaran normal. Sebagai contoh jenis pertukaran ini adalah penjualan dan atau pembelian secara langsung.

Dalam hal adanya ketidakpastian (*uncertainty*), ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jika penjual dalam posisi sebagai penanggung (resiko) maka hal ini sudah lazim dan diperbolehkan dalam Islam. Contoh dari transaksi ini adalah penjualan secara kredit. Kedua, Jika pembeli dalam posisi sebagai penanggung maka ada dua kemungkinan. Jika tidak terjadi *zero sum game*, artinya tidak ada pihak yang dirugikan maka transaksi tersebut tergolong sebagai pertukaran normal. Sebagai contoh hal ini adalah adanya jaminan pembelian. Hanya jika dalam suatu transaksi ketidakpastian ini ada pihak yang dirugikan

Konsep adil ini diterjemahkan menjadi empat batasan yang lazim digunakan dalam fikih muamalah :

1. Tidak boleh ada *mafsadah* atau dalam istilah ekonomi disebut *externalities* yaitu zalim terhadap lingkungan.
2. Tidak boleh ada *gharar* atau dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game* yaitu menzalimi partner transaksi.
3. Tidak boleh ada *maisir* atau dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game in utility exchange*, Yaitu salah satu bentuk gharar yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*).
4. Tidak boleh ada *riba* atau *exchange of liability* yaitu salah satu bentuk gharar yang timbul akibat pertukaran kewajiban (*liability*).

Dari skema tersebut dapat diketahui pula bahwa ketidakpastian (*uncertainty*) bukanlah atau belum tentu spekulasi. Begitu pula *game of chance* belum tentu termasuk perjudian. Namun bila suatu tindakan diambil berdasarkan atau bergantung dari hasil suatu *game of chance* maka bisa dikategorikan sebagai 'mengundi nasib dengan anak panah' (QS: 590) yang dilarang dalam Islam. Apalagi bila tindakan tersebut merugikan pihak lain maka bisa digolongkan dalam maisir.

### 6.3. Teori uang dalam Islam

Salah satu perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah dalam menerangkan nilai tambah uang. Sebagaimana yang dikutip oleh Anwar Iqbal dari Bohm Bawerk (1889)<sup>19</sup> : Para ekonom berpendapat bahwa dalam memandang akan kegunaan uang berlaku teori agio atau *time preference of money*. Teori ini mengemukakan bahwa bunga dianggap sebagai suatu gejala pertukaran.

Diterangkan di situ bahwa sebab-sebab terjadinya bunga uang adalah adanya kenyataan manusia lebih mementingkan barang-barang yang bisa diperoleh sekarang dari pada yang mungkin dapat diperolehnya di masa yang akan datang berapapun jumlah dan bentuknya. Oleh karena itu bunga dianggap sebagai kewajiban ekonomi. Dengan pandangan dasar inilah kemudian muncul konsep *time value of money*. Dalam menerangkan akan nilai waktu dari uang. Teori ini menyebutkan bahwa untuk menjaga nilai riil di masa mendatang maka diperlukan tambahan sejumlah uang (nominal) dengan menggunakan suku bunga sebagai diskon faktornya.

Islam tidak begitu saja menggunakan konsep ini dalam perekonomiannya. Meskipun demikian masih menjadi perdebatan mengenai penggunaan konsep *time preference*, karena dalam Islam juga diperbolehkan

---

<sup>19</sup> Bohm Bawerk, *The Theory Positif of Capital*, dikutip dari Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan teori pembunga uang*, 1985 hal 60. Sumber ini dikutip dari Shidiq Haryono (2001).

adanya kontrak yang melibatkan unsur waktu seperti kontrak dagang secara kredit (misalnya *bay' mu'ajjal* dan *bay'as salam*) dimana harga suatu komoditi dapat berbeda sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Kasus *bay' mu'ajjal*, sewa dan gaji adalah praktek dalam Islam yang nilainya ditetapkan (*fixed*) dan ditentukan di muka (*predetermined*), suatu sifat yang dimiliki tingkat bunga, namun Islam melarangnya. Namun para ahli berpendapat bahwa perbedaan nilai terhadap barang yang sama tersebut bukan hanya terkait masalah waktu tapi juga terkait dengan perubahan harga yang terjadi di pasar karena permintaan dan penawaran, sehingga harga di masa mendatang bisa positif (lebih tinggi), negatif atau sama sehingga time preference seseorang juga tidak harus positif. Selain itu dalam transaksi kredit, dibolehkannya kenaikan harga jika barang dilakukan di masa mendatang adalah karena beberapa alasan seperti misalnya ongkos sewa (penyimpanan dan perawatan) ditambah margin profit yang disepakati bersama.

Setelah sedikit diuraikan tentang konsep dasar keuangan dalam Islam, maka berikut akan dijelaskan teori permintaan uang dalam masyarakat Islam. Walaupun banyak teori yang diajukan, dalam tulisan ini penulis mengambil teori yang diajukan oleh Choudhury.

### 6.3.1. Permintaan uang dalam Islam<sup>20</sup>

Salah satu teori permintaan uang dalam Islam adalah sebagaimana yang diajukan oleh Choudhury (1997)<sup>21</sup> yang menuliskan formulasinya sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Beberapa teori permintaan uang dalam ekonomi Islam diantaranya seperti yang diajukan oleh MA.Choudury dan M. Umer Chapra. Menurut Chapra permintaan uang dalam sebuah perekonomian Islam adalah sama persis dengan teori Cambridge, yaitu  $M_d = kY$  yang diturunkan dari teori Keynes  $M_d = kY + L(i)$  dengan menghapuskan fungsi  $L(i)$  karena adanya asumsi bahwa permintaan uang untuk spekulasi  $[L(i)]$  dihapuskan, lihat M.U. Chapra, 2000, *Sistem Moneter Islam*, Terjemahan, Ikhwan Abidin B., Penerbit Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, Jakarta, hlm. 153. Dalam tulisan ini penulis menggunakan persamaan dari Choudury.

<sup>21</sup> Choudury, 1997, *Money in Islam*, hlm. 41.

$$M_d = M_s = M(X, Y, \emptyset),$$

Dimana  $M_d$  adalah permintaan uang yang merupakan representasi aktivitas ekonomi sebagai dampak dari kebijakan ekonomi Islam. Sedangkan kebijakan ekonomi Islam sendiri digambarkan sebagai stok uang beredar untuk menyeimbangkan dengan permintaan aktual. Jadi  $M_s$  merupakan biaya moneter yang sangat terkait dengan harga barang komoditi.  $M_s$  bukanlah variabel yang independen terhadap  $M_d$  dalam kebijakan ekonomi Islam.  $M_d$  akan menentukan tingkat  $M_s$  dan besarnya jumlah uang beredar merupakan reaksi atas perubahan-perubahan yang terjadi pada  $M_d$ . Konsekuensinya  $M_d$  dan  $M_s$  adalah satu fungsi  $M$ , artinya  $M_d$  akan selalu sama dengan  $M_s$  dan merupakan fungsi jumlah uang beredar.

Secara simultan jumlah dan nilai uang dipengaruhi oleh variable sosial ekonomi ( $X$ ), kebijakan pemerintah baik fiskal atau moneter ( $Y$ ), dan pengetahuan atau pemahaman masyarakat akan norma-norma ekonomi Islam ( $\emptyset$ ). Tingkat harga merupakan salah satu variabel sosial ekonomi, yang akan berhubungan dengan variabel sosial ekonomi yang lain. Choudhury<sup>22</sup> memformulasikan hubungan antar variabel ini dengan :

$$X = X(p) [\emptyset]$$

Di mana kedua variabel yaitu  $X$  dan  $p$  ikut dipengaruhi oleh  $\emptyset$ , yang merupakan indeks pelaksanaan ajaran Islam. Semakin tinggi nilai  $\emptyset$  atau semakin bagus pelaksanaan ajaran Islam, maka harga yang tercipta di masyarakat merupakan fungsi sosial ekonomi, dan bukan atau kurang dipengaruhi variabel pengganggu lain seperti penimbunan barang-barang, spekulasi di pasar uang, dan penerapan sistem bunga. Jika masyarakat cenderung melaksanakan ajaran Islam dengan

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 41. Sesuai dengan keterangan di bawahnya maka model yang ditulis :  $X = X(p) [\emptyset]$  bisa diterjemahkan sebagai berikut :

$$X = X(p, \emptyset)$$

$$p = p(\emptyset)$$

$$\Rightarrow X = X[p(\emptyset), \emptyset]$$

baik (sebagai contoh misalnya dengan ditinggalkannya riba, menimbun barang secara berlebihan, atau spekulasi di pasar uang dan modal dan lain sebagainya), maka indeks  $\emptyset$  akan semakin tinggi. Sebagai contoh hal ini bisa diterjemahkan bahwa  $\emptyset$  merupakan fungsi dari struktur pasar (apakah monopolis, oligopolis atau persaingan sempurna, di mana makin mendekati persaingan sempurna berarti makin sesuai dengan *syariah*), besarnya portofolio simpanan perbankan yang bebas bunga, sirkulasi uang sebagai indeks bentuk penolakan terhadap penimbunan barang dan lain-lain. Bentuk pasar yang makin mendekati persaingan sempurna, rendahnya peranan sistem bunga dalam perekonomian dan tingginya sirkulasi atau velocity uang karena rendahnya hoarding money merupakan kondisi perekonomian yang makin mendekati tuntunan ekonomi Islam.

Jika ketiga variabel ini saling berinteraksi maka akan menciptakan hubungan kausalitas antara  $M_s (=M_d)$  dengan  $X(p)[\emptyset]$ , dan  $Y(\emptyset)$ . Semua variabel ini akan berinteraksi, berintegrasi dan berevolusi secara bersama-sama menentukan besaran variabel  $X(p)[\emptyset]$ ,  $Y(\emptyset)$ ,  $M(\emptyset)$  dan pada akhirnya menentukan jumlah uang beredar sebagai reaksi permintaan aktual yang juga menentukan harga di pasar barang komoditas (tingkat inflasi). (Choudury, 1992).

### 6.3.2. Tentang Riba

Barangkali inilah salah satu bahasan yang cukup menarik berkaitan dengan ajaran Islam terutama jika dikaitkan dengan konsep keadilan dan salah satu inti sistem ekonomi Kapitalis yaitu bunga. Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil yang lebih dikenal sebagai riba. Riba secara bahasa bermakna  *ziyadah*  atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga

berarti *tumbuh* dan *membesar*. Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil (Antonio 1999, 59). Sedangkan Chapra (1997, 27) menyatakan bahwa dalam syariah, riba mengacu pada premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau penangguhan. Selanjutnya Chapra menyatakan bahwa :

- Sejalan dengan hal ini, riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga, sesuai dengan konsensus seluruh para *fuqaha* atau ahli hukum Islam ( Chapra 1997, 27).

Atas dasar hal tersebut, maka sistem bunga dalam Islam dianggap sebagai riba. Dalam Al Qur'an pelarangan riba terdapat dalam empat wahyu yang berlainan. Pertama, menekankan jika bunga mengurangi rizki yang berasal dari rahmat Allah, kedermawanan justru melipatgandakannya (QS. Ar rum : 39). *Kedua*, dalam Qur'an Surat An Nisaa : 161 - sangat mencela riba, yang sejalan dengan pelarangannya pada ayat sebelumnya. Ayat ini menggolongkan mereka yang memakan riba sama dengan mereka yang mencuri harta orang lain dan Allah mengancam kedua pelaku tersebut dengan siksa yang pedih. Ketiga, surat Ali Imran ayat 130-132 memerintahkan muslim untuk menjauhkan diri dari riba jika mereka menginginkan kebahagiaan bagi mereka sendiri (kebahagiaan dalam arti yang komprehensif yang Islami), dan keempat, Al Qur'an mengecam keras mereka yang melakukan riba, membuat pembedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, dan meminta kaum muslimin untuk membatalkan semua riba, memerintahkan mereka untuk mengambil uang pokok, dan meninggalkannya meskipun ini merupakan kerugian dan beban berat bagi yang meminjamkan (QS. Al Baqarah : 275-281). Berikut kutipan beberapa arti ayat Al Qur'an yang melarang riba :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. 3(Ali 'Imran) : 130).

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit jiwa. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala pada sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran padanya dan tidak pula mereka bersedih hati; Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman; maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (QS. 2 (Al Baqarah) : 275-279).

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang

yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (QS. 4 (An Nisaa') : 161).

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah pada sisi Allah. Dan jika apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mendapat keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (QS. 30 (Ar Ruum) : 39)

Untuk lebih memahami riba kaitannya dengan bunga, ada beberapa syarat utama, yaitu (Antonio 1999, 99-100) :

1. Menghindarkan diri dari “kemalasan ilmiah” yang cenderung pragmatis dan mengatakan bahwa praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan konvensional sudah sejalan dengan ruh dan semangat Islam.
2. Tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulullah dalam segala aspek, termasuk aspek ekonomi dan perbankan.
3. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah tidaklah sekali-kali melarang suatu mekanisme yang tidak adil dan menang sendiri kecuali ada kezhaliman di dalamnya.

Syarat-syarat tersebut diungkapkan karena dilandasi oleh berbagai alasan. Ada beberapa teori yang melandasi syarat tersebut, misalnya teori *abstinence*, yang menyatakan bahwa ketika kreditor menahan diri (*abstinence*), ia menanggukkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kenyataannya, kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian,



sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apapun. Tentu ia tidak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut.

Sementara itu dalam perekonomian Islam terdapat dua jenis riba, yaitu : *riba al nasi'ah* dan *riba al fadl*. *Riba al nasi'ah* mengacu pada bunga atas pinjaman. Dalam pengertian seperti itulah istilah riba digunakan Al Qur'an dalam ayat yang berbunyi : "Allah mengharamkan bunga" (QS. Al Baqarah : 275). Sedangkan *riba al fadl* merupakan pengertian kedua dari riba yang dapat dijumpai dalam pembayaran dari tangan ke tangan dan obral barang dagangan. Larangan *Riba al fadl* dimaksudkan untuk meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui tukar menukar barang yang 'tidak adil' serta menutup kemungkinan terjadinya riba.

Dari keterangan diatas jelas bahwa riba dan bunga sangat dilarang dalam Islam. Alasan pokok mengapa Al Qur'an menyampaikan penilaian keras terhadap bunga yaitu bahwa Islam ingin menegakkan suatu sistem ekonomi yang didalamnya semua bentuk eksploitasi dibatasi, dan khususnya, ketidakadilan yang terjadi dalam bentuk penyandang dana yang dijamin memperoleh keuntungan tanpa melakukan sesuatu atau ikut menanggung resiko, sementara pengusaha, meskipun sudah bekerja keras, tidak mempunyai jaminan serupa.

## 6.4 Perbankan Islam

Peranan Bank Islam atau bank Syariah bagi masyarakat muslim sangat besar, sebagaimana peranan bank umum konvensional dalam masyarakat lain. Barangkali tidak terlalu banyak perbedaan tentang peranan perbankan dalam setiap masyarakat dalam arti kegunaan dalam menunjang perekonomian suatu masyarakat. Namun bila ditinjau dari sudut prinsip yang pada akhirnya mempengaruhi mekanisme atau kegiatan teknis banyak terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank Islam atau bank syariah. Hal ini

disebabkan beberapa hal diantaranya perbedaan yang sangat mendasar yaitu ditiadaknya bunga (riba) dalam setiap transaksi di masyarakat. Karena bunga dikategorikan sebagai riba yang haram.

Untuk memberikan gambaran sederhana bagaimana bank Islam beroperasi maka berikut akan diberikan secara sederhana mekanisme operasi bank Islam. Pada dasarnya sesuai dalam neracanya, transaksi dalam perbankan dapat dibagi menjadi dua yaitu sisi aktiva (*asset*) dan *passiva* (modal dan kewajiban). (Zainul Arifin:2000)

### 1. Sisi Pasiva :

- RekeningKoran (*demand deposit*)

Bank menerima simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana mereka dengan secara bebas menarik sewaktu-waktu atas dasar prinsip *wadiah* (penitipan). Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama dana tersebut mengendap di bank, dan keuntungannya menjadi hak bank. Bank menyediakan cek dan jasa-jasa lain yang berkaitan dengan rekening koran tersebut.

- Rekening Tabungan (*saving deposit*)

Bank menerima simpanan dari nasabah yang dengan tingkat kebebasan tertentu untuk menariknya kembali dan nasabah memperoleh keuntungan berdasar prinsip *wadiah*. Meskipun keuntungan yang diperoleh selama penggunaan dana tersebut selama mengendap di bank adalah milik bank, namun bank dapat memberikan imbalan atas bentuk simpanan seperti ini.

- Rekening Investasi Umum/RIU (*time deposit*)

Simpanan ini menggunakan prinsip *mudharabah*. Simpanan ini diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1,3,6,12,24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahib al maal*. Dan ada kesepakatan pembagian laba bila ada yang dihasilkan dari penanaman modal tersebut dengan nisbah (rasio atau

prosentase) tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, maka nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.

- **Rekening Investasi Khusus**

Simpanan ini hampir sama dengan simapanan RIU, hanya bentuk investasi dan pembagian keuntungannya dinegosiasikan kasus perkasus. Rekening ini bisa dari pemerintah atau dari perusahaan perusahaan yang ingin berinvestasi dengan prinsip seperti ini.

## **2. Sisi Aktiva**

Selain berhubungan dengan nasabah yang menyimpan dananya di bank, bank Islam juga berhubungan dengan para pihak pengguna dana dengan berbagai bentuk pembiayaan, baik dalam bentuk *equity financing*, yaitu dengan prinsip-prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), maupun dalam bentuk *debt financing* yang berdasarkan prinsip jual beli (*ba'i*).

- ***Equity Financing***

Ada dua macam kontrak dalam jenis pembiayaan ini yaitu musyarakah (*joint venture profit sharing*) dan mudharabah (*trustee profit sharing*).

Melalui kontrak musyarakah, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (syarikah al-inan) sebagai *legal entity*. Pembagian keuntungan dibagi secara proporsional sesuai pangsa modal masing-masing atau sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan bila terjadi kerugian maka kerugian dibebankan secara proporsional terhadap pangsa modal masing-masing.

Jenis kontrak yang kedua adalah kontrak mudharabah, yaitu hubungan kerjasama antara pihak pemberi modal (*shahib al maal*) dengan enterpreneur atau pengusaha (dapat perorangan, perusahaan atau suatu unit ekonomi) dengan kesepakatan tertentu mengenai mekanisme bagi hasilnya, dan bila terjadi kerugian, maka seluruhnya ditanggung shahib al maal, kecuali apabila kerugian tersebut karena kurang-hati-hatinya pengelola.

- *Debt Financing*

Pembiayaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan teknik jual beli. Yaitu meliputi berbagai kontrak pertukaran barang dan jasa dalam jumlah tertentu dengan harga atau nilai tertentu atas barang dan jasa yang bersangkutan. Sedangkan tentang penyerahan jumlah atau harganya dapat dilakukan dengan segera (kontan) atau tertangguh (deferred).

Sementara itu Antonio (2001) memberikan beberapa penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar bank syariah yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1. Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah

No	Prinsip Dasar	Contoh/Jenis Produk
1	Titipan/Simpanan	○ <i>al Wadi'ah</i>
2	Bagi Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Partisipation)</i></li> <li>• <i>Al Mudharabah (Trust Financing, Trust Invesment)</i></li> <li>• <i>Al Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)</i></li> <li>• <i>Al Musaqah (Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield)</i></li> </ul>
3	Jual Beli	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Al Murabahah (Deferred Payment Sale)</i></li> <li>○ <i>Ba' I As-Salam (In-front Payment Sale)</i></li> <li>○ <i>Ba' I Al Istishna' (Purchase by Order or Manufacture)</i></li> </ul>
4	Sewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Al-Ijarah (Operational Lease)</i></li> <li>• <i>Al Ijarah al Muntahia bit Tamlik (Financial Lease With Purchase Option)</i></li> </ul>
5	Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Al Wakalah (Deputyship)</i></li> <li>○ <i>Al Kafalah (Guaranty)</i></li> <li>○ <i>Al Hawalah (Transfer Service)</i></li> <li>○ <i>Ar Rahn (Mortgage)</i></li> <li>○ <i>Al Qardh (Soft and Benevolent Loan)</i></li> </ul>

Sumber : Antonio, 2001, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek.

## 6.5. Bank Sentral Islam

Tentang bank sentral modern dalam perekonomian Kapitalis telah dibahas dalam bab di muka. Lalu bagaimana dengan bank sentral dalam ekonomi Islam? Manan (1992) memberikan beberapa uraian tentang bank

sentral Islam yang dimulai dengan konsep Baitul Ma'l. Karena itu sebelum menganalisa peranan bank sentral di suatu negara Islam, dapat dilakukan suatu upaya untuk membahas fungsi Baitul Ma'l seperti dalam sejarah Islam dini.

Ada bukti yang menunjukkan bahwa semua harta benda umat Islam merupakan sebagian dari Baitul Ma'l, terlepas dari lokasi fisiknya. Baitul Ma'l adalah suatu konsep yang sangat luas dan berdasarkan keyakinan bahwa semua kekuasaan, termasuk hak akan harta benda di semesta alam, adalah milik Allah, sedangkan manusia adalah khalifahnyanya di bumi, dan hanya memiliki benda-benda ini untuk sementara.

Ada tiga macam Baitul Ma'l:

- a) *Baitul Ma'l al Khas*
- b) *Baitul Ma'l*
- c) *Baitul Ma'l Islamin*

a) *Baitul Ma'l al Khas*

Ini adalah perbendaharaan kerajaan atau dana rahasia, dengan sumber pendapatan dan unsur pengeluaran sendiri. Pengeluaran-pengeluaran itu antara lain pengeluaran pribadi khalifah, istana pensiun anggota keluarga raja, pengawal istana dan hadiah para khalifah kepada pangeran asing.

b) *Baitul Ma'l Baitul Ma'l*

Adalah sejenis bank negara untuk kerajaan. Ini tidak berarti bahwa ia memiliki semua fungsi bank sentral dewasa ini, tetapi fungsi yang terdapat dalam bentuk primitif dilaksanakannya. Karena kerajaan Islam sangat terpusat, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat pusat, maka administrasi Baitul Ma'l selalu berada atau lebih banyak terpusat dalam tangan satu orang. Pada tingkat provinsi kepala tertinggi Baitul Ma'l adalah gubernur provinsi. Dia bertugas mengumpulkan dan mengelola pendapatan. Baitul Ma'l bertempat di kantor besar provinsi. Pusat Baitul Ma'l di ibukota kerajaan sehingga ia langsung di bawah pengawasan khalifah.

### c) *Baitul Ma'l Islamin*

Perbendaharaan negara yang kedua disebut *Baitul Ma'l Islamin* atau perbendaharaan semua kaum muslim. Sesungguhnya ia tidak hanya untuk kaum muslim saja, karena fungsi-fungsinya mencakup kesejahteraan warga kerajaan Islam tanpa memandang kasta, warna kulit, atau keyakinannya. Fungsi baitul ma'l ini diantaranya memelihara pekerjaan umum, jalan-jalan, mesjid, jembatan, gereja, dan kesejahteraan, serta persediaan untuk si miskin.

*Baitul ma'l* bertempat di mesjid utama dan pada tingkat pusat dikelola oleh *Qadi*, sedangkan di tingkat provinsi oleh rekan-rekan *Qadi*. Unsur pendapatan yang didepositokan dalam *baitul mal* adalah *shadaqah* atau pendapatan zakat, *Ghanimah*, yaitu rampasan perang, dan *fai*, yaitu *kharaj* dan *jiyah*. Tugas khalifah adalah menjaga agar semua penerimaan ini terpisah satu dengan lainnya dalam perbendaharaan, karena masing-masing hal ini mempunyai kekhususan dan harus dikelola menurut peraturannya sendiri.

Dua macam kewajiban perbendaharaan negara yaitu mengamalkan harta benda yang disimpan dalam perbendaharaan, dan mengurus penerimaan kekayaan perbendaharaan. Untuk kewajiban kedua ini terdiri dari dua hal yaitu mengurus nilai yang diterima (umpamanya dengan cara kompensasi untuk membayar para serdadu, harga senjata, dan kuda), dan mengurus kepentingan umum. Seperti telah kita ketahui *baitul mal* merupakan bank sentral Islam dalam bentuk yang sederhana. Selain dari itu, tidak ada bank dagang dalam arti modern. Kebanyakan perdagangan dilakukan oleh perorangan atau dengan mitra usaha, dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya perusahaan dagang yang besar.

Tampaknya *baitul mal* telah biasa membayar semua kebutuhan dan keperluan masyarakat, dan ia sudah melaksanakan fungsi yang hampir serupa dengan yang dilakukan oleh bank sentral dewasa ini, kecuali pengadaan kredit, dan pengawasan suku bunga. Soal mata uang merupakan sarana modern dan

mudah dicocokkan dalam fungsi *baitul mal* karena dalam fungsi ini suku bunga tidak memainkan peranan apapun. Dalam Islam juga terdapat pembiayaan perdagangan atau industri dengan kredit. Karena itu bank sentral Islam akan memberikan kredit pada bank-bank anggotanya dengan cara investasi untuk berbagi keuntungan atau kerugian, dan tidak dengan suku bunga yang tetap. Dapat disimpulkan bahwa *baitul mal* hampir sama dengan bank sentral dewasa ini, namun dalam bentuk yang masih sederhana.

Setelah kita ketahui sedikit tentang *baitul mal* dalam perekonomian Islam awal, berikut kita bahas keberadaan bank sentral Islam modern. Chapra (200)<sup>23</sup> memberikan pandangan dan konsepnya tentang keberadaan bank sentral Islam ini. Menurutnya, fungsi bank sentral Islam adalah sebagai berikut :

- ☐ mengeluarkan uang dengan koordinasi dengan pemerintah
- ☐ mengusahakan stabilitas internal dan eksternalnya
- ☐ sebagai *banker's bank and government*
- ☐ mediator kliring, cek, transfer dan *intermediary* lainnya
- ☐ sebagai *lenders of last resort*
- ☐ sebagai *regulator* dan *supervisor* bagi bank komersial serta lembaga keuangan lain
- ☐ mencegah konsentrasi kekayaan pada golongan tertentu saja dengan kewenangan alokasi kredit yang sesuai
- ☐ menjaga stabilitas nilai uang riil dengan memonitor keseimbangan sektor riil dan sektor moneter
- ☐ sebagai institusi primer pembuat kebijakan moneter

Dari pandangan tersebut sekilas tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank sentral Islam dengan bank sentral modern yang telah kita kenal. Namun perlu dicatat beberapa poin yang tidak terdapat dalam bank sentral modern. Salah satu poin yang penting adalah adanya kewenangan alokasi kredit

---

<sup>23</sup> Lihat M. Umer Chapra, 2000, *Sistem Moneter Islam*, hlm. 102-107.

yang sesuai dengan tujuan sosioekonomi Islam sehingga dapat mencegah konsentrasi kekayaan yang berlebihan pada segelintir *vested interest* melalui lembaga keuangan.<sup>24</sup> Meskipun dalam bank sentral modern juga ada semacam mekanisme alokasi kredit, misalnya di Indonesia ada yang disebut batas maksimum pemberian kredit atau *legal lending limit*, namun seringkali hal ini dilanggar karena kurangnya pengawasan bank sentral.

Hal penting yang lain adalah fungsinya untuk menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter sehingga stabilitas uang riil dapat tercapai. Hal ini dilakukan dengan memonitor sirkulasi uang, untuk mengaktualisasikan kesehatan dan pertumbuhan perekonomian Islam yang berkesinambungan dan menjamin keadilan sosioekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan sentral dengan sudut pandang Islam tentang masyarakat akan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah daripada selama ini, karena bank sentral Islam tidak perlu memberi terlalu banyak tekanan pada kontrol kredit dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga, ikut serta dalam operasi-operasi pasar terbuka dan mengubah-ubah rasio-rasio cadangan bank-bank anggota sebagaimana dalam perekonomian Kapitalis.

Bank sentral Islam tidak hanya memberi tekanan pada kontrol kredit kualitatif tapi juga pada bujukan moral. Tujuan bujukan moral yang dianggap sebagai metode kontrol kredit adalah untuk meredakan reaksi psikologis yang tidak menyenangkan pada metode kontrol langsung. Dengan cara ini bank sentral membangun hubungan yang akrab. Hubungan yang sehat antara bank sentral dengan bank lain, dan bank sentral dengan masyarakat, sangatlah mungkin, terutama jika dihubungkan dengan konsep Islam tentang masyarakat.

---

<sup>24</sup> Ibid, 105. Menurut pendapat para gubernur bank sentral dan otoritas moneter negara-negara muslim, bank sentral harus memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan bimbingan-bimbingan yang berkenaan dengan tujuan-tujuan pembiayaan yang akan dilakukan, jumlah maksimal pembiayaan ini, *cash margin* harus tetap dipertahankan, dan rasio kolateral harus dicapai sehubungan dengan pembiayaan semacam ini (Chapra;2000;105)



Dalam keadaan demikian bank sentral akan bertindak dengan sebaik-baiknya agar menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Suasana psikologis yang baik ini akan memberikan harapan yang cerah di masa mendatang untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan investasi yang sehat

Bank sentral Islam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama, kemitraan, dan kesejahteraan masyarakat yang maksimum, akan melaksanakan semua fungsi sebagaimana fungsi bank sentral dalam perekonomian modern, walau tanpa penerapan bunga. Hal ini sejalan dengan pemikiran Choudhury (1997) bahwa tidak ada sektor keuangan, baik swasta ataupun pemerintah dan bank sentral yang bebas dan berdiri sendiri.

Pada umumnya di negara modern, bank sentral bertindak sebagai bank para bankir. Semua bank lain dalam negara menyimpan sejumlah tertentu dari sisa uang mereka pada bank sentral berdasarkan undang-undang ataupun kebiasaan. Bank sentral adalah pemegang terakhir cadangan sistem perbankan. Bank sentral ini juga berfungsi sebagai pengawas kredit dan mata uang. Karena bank sentral memiliki banyak fungsi penting yang harus dilaksanakan, maka pada umumnya kontrol bank tetap di tangan negara atau dapat dilakukan oleh suatu dewan komisaris yang dipilih secara bersama-sama oleh pemerintah dan rakyat.

## **6.6. Kebijakan Moneter Dalam Perekonomian Islam**

Setelah sedikit mengetahui tentang bank sentral Islam maka berikut akan sedikit diuraikan kebijakan moneternya. Berbeda dengan bank sentral modern yang banyak menggunakan instrumen moneter dengan berdasarkan bunga, maka bank sentral Islam memiliki instrumen lain untuk mencapai tujuannya. Tujuan kebijakan moneter Islam juga digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi makronya seperti kestabilan harga, inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta mengurangi tingkat pengangguran yang

berlebih. Hanya saja, karena instrumen yang digunakan tidak berbasis bunga, maka instrumen dan bentuk kebijakan moneternya juga berbeda.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa kebijakan moneter ini juga dalam kerangka mewujudkan perekonomian masyarakat seperti yang menjadi tujuan Islam. Beberapa kebijakan yang bisa diambil antara lain dengan cara bank sentral Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga yang stabil dan tujuan-tujuan sosio-ekonomi Islam.

Dengan sistem bagi hasil diperkirakan tidak memungkinkan bagi bank-komersial untuk mengajukan pinjaman yang terlalu besar sebagaimana terjadi di beberapa negara. Meskipun demikian, sebagaimana dalam sistem perbankan konvensional, bank sentral Islam juga bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir (fungsi lender of last resort) guna menjamin likuiditas yang memadai dan menghindarkan bank-bank tersebut dari krisis likuiditas membayar hutang. Kemampuan bank ini juga akan tercermin dari cara menangani situasi-situasi krisis tanpa mengorbankan manajemen bank dengan tetap melindungi kepentingan deposan dan para pemegang saham di luar manajemen.

Dalam sistem Islam, krisis pembayaran semacam itu lebih kecil kemungkinannya, karena di dalam sistem tersebut ada landasan modal yang relatif besar sesuai dengan besarnya *mudharabah*. Deposit ini dapat diandalkan untuk melindungi penarikan uang oleh para deposan, sehingga likuiditas tetap terjaga. Meskipun demikian, jaminan bahwa para deposan dapat menarik kembali uang mereka harus dilembagakan guna mencegah kehabisan uang pada bank; dan bank sentral harus siap menjadi pemberi jaminan terakhir (*fungsi lenders of last resort*). Tujuannya, agar bank-bank tersebut tetap hidup dan memperkecil kemungkinan rugi pada para deposan *mudharabah* dan pemegang saham lainnya.

### **6.6.1. Kebijakan Kualitatif :**

#### **☐ Moral Suasion**

Sebagaimana dalam perekonomian Kapitalis, bank sentral Islam juga melakukan kebijakan moneter berupa anjuran moral kepada bank-bank komersial dan lembaga keuangan non bank yang lain. Kebijakan ini bisa berupa pertemuan-pertemuan antara pihak bank sentral dengan para pimpinan bank umum. Di sini dibicarakan berbagai hal yang perlu dilakukan terutama oleh bank-bank umum untuk mencapai kondisi perekonomian yang diinginkan. Kebijakan ini diharapkan semakin efektif dalam suasana psikologi Islam yang mengutamakan musyawarah.

#### **☐ Kontrol Kredit Selektif**

Kebijakan ini diambil untuk mempengaruhi lembaga keuangan agar dalam operasinya melakukan alokasi kredit atau pinjaman sesuai dengan nilai dan sasaran-sasaran Islam.

### **6.6.2. Kebijakan Kuantitatif**

#### **☐ Operasi pasar**

Kebijakan Operasi pasar yang dilakukan dalam sistem moneter Islam tidak sama dengan kebijakan dalam perekonomian Kapitalis yang menggunakan basis tingkat bunga sebagai alatnya.

#### **☐ Pinjaman/kredit Mudharabah**

Pinjaman Mudharabah dalam perekonomian Islam berasal dari uang yang dicetak oleh bank sentral dalam kerangka mempengaruhi sekaligus membantu likuiditas perbankan. Selain itu pinjaman ini juga diperuntukkan

bagi pemerintah. Pinjaman jenis ini terutama digunakan untuk tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat.

#### ⇒ Rasio Cadangan Wajib Resmi

Cadangan ini diwajibkan bagi bank-bank komersial yaitu dengan menahan suatu proporsi tertentu dari deposito unjuk mereka di bank sentral dan bank-bank komersial tersebut mendapatkan jasa penyimpanan ini. Cadangan ini sebagian akan digunakan sebagai persiapan likuiditas dalam kerangka fungsi bank sentral sebagai lender of last resort atau yang sering disebut sebagai “pengumpulan umum”. Dalam sistem moneter Islam bisa didapat misalnya dengan mengadakan perjanjian kooperatif antara bank-bank dalam naungan bank sentral dalam rangka mengatasi masalah likuiditas. Sedangkan sebagian yang lain dapat diinvestasikan dalam berbagai bentuk, dengan tidak sampai mengganggu kebijakan moneter.

#### ⇒ Pergeseran Deposito Pemerintah

Bank sentral diberi kewenangan untuk menggeser deposito pemerintah dari dan ke bank-bank komersial. Menggeser sebagian deposito pemerintah ke dan dari bank komersial untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter terbukti menjadi instrumen yang efektif pada kebijakan moneter di Arab Saudi dan mirip fungsinya dengan operasi pasar terbuka namun memiliki dampak secara langsung.

#### ⇒ Penukaran Devisa

Bagi negara-negara yang tidak memiliki kontrol devisa dapat dilakukan suatu perjanjian penukaran devisa dalam-batas-batas tertentu oleh bank sentral kepada bank-bank komersial yang menghadapi masalah likuiditas. Pembelian devisa oleh bank sentral ini diharapkan akan mampu mengatasi kekurangan

dana segar berupa mata uang lokal, dengan tetap mengusahakan bahwa bank tersebut akan kembali membeli valuta tersebut dalam suatu periode tertentu.

Berbicara mengenai kebijakan moneter tidak akan lepas dari jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Bagaimana dengan jumlah uang beredar dalam perekonomian Islam? Kita kembali pada model permintaan uang dalam perekonomian Islam

$$Md=Ms=M(X,Y,\emptyset),$$

Dimana  $Md$  adalah permintaan uang dan sebagai representasi aktivitas ekonomi sebagai dampak dari kebijakan ekonomi Islam, dalam hal ini digambarkan sebagai stok uang beredar untuk menyeimbangkan dengan permintaan aktual. Jadi  $Ms$  merupakan biaya moneter yang sangat terkait dengan harga barang komoditi.  $Ms$  bukanlah variabel yang independen terhadap  $Md$  dalam kebijakan ekonomi Islam.  $Md$  akan menentukan tingkat  $Ms$  dan besarnya jumlah uang beredar merupakan reaksi atas perubahan-perubahan yang terjadi pada  $Md$ . Konsekuensinya  $Md$  dan  $Ms$  adalah satu fungsi  $M$ .  $X$  adalah variable sosial ekonomi,  $Y$  adalah kebijakan pemerintah baik fiskal atau moneter, dan  $\emptyset$  adalah pengetahuan atau pemahaman masyarakat akan norma-norma ekonomi Islam. Bagaimana cara mengukur besaran besaran  $X$ ,  $Y$  dan  $\emptyset$  dan apakah penentuan besaran tersebut dapat dikuantifikasi ataukah dengan cara penilaian kualitatif sangat menarik perhatian. Tetapi hal tersebut diluar konteks penulisan ini.

## *BAB 7*

# *Beberapa Pandangan dan Kritik*

\*\*\*\*\*

Pandangan dan kritik perlu dibicarakan dalam bab tersendiri karena buku ini -yang bersifat uraian filosofik dan teoretik- dalam mengkaji epistemologi suatu sistem memang perlu diuraikan latar belakang dari mana sistem tersebut dibentuk. Dalam beberapa hal pandangan ini lebih bernuansa kebudayaan daripada warna ekonominya, dan pandangan serta kritik ini lebih banyak ditujukan pada Kapitalisme sebagai sistem yang telah mapan. Sebaik apapun pemikiran atau sistem tentu akan mendapatkan kritikan dari pihak lain. Dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap sistem yang ada, maka perlu bagi kita untuk melihat sistem moneter atau sistem yang mendasarinya dari sudut pandang lain. Pandangan dan kritik ini memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu demi perbaikan dan kepentingan peradaban masyarakat.

Karena sistem yang ada sekarang didominasi oleh sistem Kapitalisme barat, maka pandangan dan kritik yang bersifat epistemologis di sini lebih banyak ditujukan kepada konsep dan sistem ekonomi serta sistem moneter Kapitalis. Sedangkan kritik terhadap Islam difokuskan pada pendapat para ahli ekonomi Islam terutama jika dikaitkan dengan aplikasi dan realitas di masyarakat.

### **7.1. Kritik Terhadap Kapitalisme**

Kendatipun telah menjadi pandangan yang besar dan mendominasi pemikiran dunia, Kapitalisme ternyata dipenuhi oleh berbagai macam kritik yang tidak jarang juga sangat pedas. Namun begitu salah satu kelebihan Kapitalisme adalah kemampuannya menyesuaikan dan menyerap kritik yang menghantamnya yang justru digunakan untuk mengadakan berbagai

penyempurnaan, yang walaupun dengan demikian konsep ideal Kapitalisme sendiri menjadi semakin kabur. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertanyakan kembali mengenai konsep Kapitalisme ini. Seperti apa yang diuraikan Hussain Heriyanto (1999)<sup>25</sup>. Mengacu kepada asumsi-asumsi dasar Kapitalisme, klaim-klaim pendukung Kapitalisme dan praktek Kapitalisme, terdapat beberapa kelemahan mendasar Kapitalisme.

Pertama, pandangan epistemologinya yang positivistik mekanistik. Positivisme memisahkan fakta dan nilai sehingga hanya terpaku pada apa yang disebut fenomena fakta dan mengabaikan nilai. Hal ini membuat Kapitalisme tidak dapat menjelaskan perkembangan sains modern dan kritikan dari fenomenologi hermeneutik (*human sciences*). Pola pikir positivistik hanya satu dimensi, yaitu dialektika positif, yang pada gilirannya mereduksi kemampuan refleksi kritis manusia untuk mencari makna-makna tersembunyi di balik fenomena-fenomena.

Herbert Marcuse dengan *One Dimensional Man* (1991) dalam Medhy (2000) berkata:

"... Kapitalisme, yang didorong oleh teknologi, telah mengembang untuk mengisi semua ruang sosial kita; telah menjadi suatu semesta politis selain psikologis. Kekuasaan totalitarian ini mempertahankan hegemoninya dengan merampas fungsi kritisnya dari semua oposisi, yaitu kemampuannya berpikir negatif mengenai sistem, dan dengan memaksakan kebutuhan-kebutuhan palsu melalui iklan, kendali pasar, dan media. Maka, kebebasan itu sendiri menjadi alat dominasi, dan akal menyembunyikan sisi gelap irasionalitas..."

---

<sup>25</sup> Makalah sesi kedua Short-Course kajian Ideologi, Peradaban dan Agama - HMI Cabang Depok dan FIKI-UI di PKTTI-UI Depok, 21 Des. 1999. Lihat Hussain Heriyanto, 1999, *Kapitalisme: Sebuah Modus Eksistensi*, <http://clik.go2net.com>.

Kedua, berkaitan dengan yang pertama, asumsi antropologis yang dianut Kapitalisme adalah pandangan reduksionis satu dimensi manusia yang berasal dari rasionalisme *Aufklärung*. Temuan alam bawah sadar psikoanalisis menunjukkan bahwa banyak perilaku manusia tidak didorong oleh kesadaran atau rasionalitas, melainkan oleh ketidaksadaran dan irasionalitas. Asumsi Kapitalisme yang mengandaikan bahwa distribusi kekayaan akan terjadi dengan sendirinya bila masyarakat telah makmur (contoh: konsep *trickle down effect*) melupakan aspek irasionalitas manusia yang serakah dan keji. Dorongan yang tidak pernah puas menumpukkan kapital sebagai watak khas Kapitalisme merupakan bentuk patologis megalomania dan narsisisme.

Ketiga, keserakahan mengakumulasi kapital berakibat pada eksploitasi yang berlebihan terhadap alam dan sesama manusia, yang pada gilirannya masing-masing menimbulkan krisis ekologis dan dehumanisasi. Habermas (1988) dalam Hussain Heriyanto (2000) menyebutkan Kapitalisme lanjut menimbulkan ketidakseimbangan ekologis, ketidakseimbangan antropologis (gangguan sistem personaliti), dan ketidakseimbangan internasional.

Keempat, problem moral. Bernard Murchland (1992, dalam Medhy, 2000) seorang pembela gigih Kapitalisme, mengakui bahwa masalah yang paling serius yang dihadapi Kapitalisme demokratis adalah pengikisan basis moral. Ia lalu menoleh ke negara-negara timur yang kaya dengan komponen moral kultural. Namun ide ini juga mendapat banyak sanggahan diantaranya dari Mangunwijaya (1998)<sup>26</sup>, dengan argumen bahwa bagaimanapun Kapitalisme sudah diperbaiki dan disempurnakan, masih saja tetap mengorbankan rakyat kecil.

---

<sup>26</sup> Atas dasar problem etis inilah, Mangunwijaya (1998) dengan lantang berkata: "... ternyatalah, bahwa sistem liberal Kapitalis, biar sudah direvisi, diadaptasi baru dan diperlunak sekalipun, dibolak-balik diargumentasi dengan fasih ilmiah seribu kepala botak, ternyata hanya dapat berfungsi dengan tumbal-tumbal sekian milyar rakyat dina lemah miskin di seluruh dunia, termasuk dan teristimewa Indonesia...." Hussain Heriyanto, 1999, Op.Cit.



Kelima, implikasi dari praktek mengkomoditikan segenap ide-ide dan kegiatan-kegiatan sosial budaya, maka terjadilah krisis makna yang pada gilirannya menimbulkan krisis motivasi. Habermas (1988) mengatakan bahwa pada tataran sistem politik, krisis motivasi ini menimbulkan krisis legitimasi, atau menurut istilah Heilbroner (1991) dengan krisis intervensi (Hussain Heriyanto, 2000)

## 7.2. Kritik Terhadap Modernisme<sup>27</sup>

Konsep '*modernisme*' pada umumnya selalu dikaitkan dengan fenomena dan kategori kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan estetika atau gaya. Konsep '*modern*' sering dikaitkan dengan penggal sejarah atau periodisasi. Sementara, konsep '*modernitas*' digunakan untuk menjelaskan totalitas kehidupan (Alfathri Adlin & Iwan Suryolaksono; 2001).

Awal dari dunia modern seringkali dinisbatkan kepada *renaissance* yang dianggap sebagai awal dari perkembangan sains dan teknologi, perluasan dan ekspansi perdagangan. Perkembangan wawasan modern tentang '*humanisme*', sebagai tantangan terhadap kepercayaan keagamaan Abad Pertengahan juga sebagai satu bentuk pendewaan rasionalitas dalam pemecahan masalah-masalah manusia. Semangat *renaissance* salah satunya dapat diwakili oleh pemikiran Descartes, dan melalui wawasan '*humanisme*'nya menjadikan manusia—dengan segala kemampuan rasionalnya—sebagai 'aku' (subyek) yang sentral dalam pemecahan masalah dunia.

Wawasan humanisme Cartesian, dalam hal ini, bersifat sangat mekanistik, dalam pengertian rasionalitas dijadikan sebagai ukuran tunggal 'kebenaran', dan 'mesin' dijadikan sebagai paradigma, dalam mewujudkan

---

<sup>27</sup> Sub bab ini berisi kritikan terhadap Modernisme sebagai salah satu manifestasi paham Kapitalisme dalam kehidupan sosial budaya.

mimpi-mimpi utopis manusia modern akan kekuasaan. Pengertian 'subyek' dalam wawasan humanisme-rasional Cartesian ini, menurut David Michel Levin dalam Alfathri Adlin & Iwan Suryolaksono (2001), sebenarnya penuh dengan kekaburan dan paradoks oleh karena di satu pihak banyak mengagungkan kemampuan akal budi manusia, yang menjadikan manusia sebagai subyek yang merdeka, *self-determination* dan *self-affirmation*; merupakan awal dari keterputusan manusia dari Tuhan. Di lain pihak, konsep rasional ini justru diandalkan oleh Descartes sebagai perangkat untuk membuktikan eksistensi Tuhan itu sendiri. (Alfathri Adlin & Iwan Suryolaksono, 2001)

Pencerahan (*Aufklärung*) dalam diskursus filsafat modern, sebenarnya adalah sebuah proses penyempurnaan secara kumulatif kualitas subyektivitas dengan segala kemampuan obyektif akal budinya dalam mencapai satu tingkatan sosial yang disebut dengan 'kemajuan'. Keterputusan dari nilai-nilai mitos, spirit ketuhanan, telah memungkinkan manusia modern untuk 'mengukir sejarahnya sendiri' di dunia—suatu proses *self-determination*, dimana manusia menciptakan kriteria-kriteria dan nilai-nilai untuk perkembangan diri mereka sendiri sebagai subyek yang merdeka. Keterputusan dari nilai-nilai dan spirit yang lama, telah memungkinkan manusia modern untuk hidup di dunia baru, dunia modern.

Hegel menyatakan bahwa telah lahir sebuah jaman kelahiran dan peralihan menuju satu era baru yang memutus spirit dari dunia yang sebelumnya dihuni dan diimajinasikannya, dari pikiran yang telah menenggelamkannya di masa lalu, dan ia dalam proses transformasi, tidak pernah diam di tempat dan selalu dalam proses bergerak ke depan. Jelas sekali di sini bahwa pengertian spirit telah di materialisasikan menjadi sebuah kualitas di mana pada awalnya di era pramodern spirit adalah sebuah entitas.

Mengutip pendapat Alfathri Adlin & Iwan Suryolaksono (2001), Hegel melihat modern sebagai satu perioda, di mana manusia sebagai subyek, menentukan sendiri landasan nilai dan kriteria-kriteria dalam kehidupannya di dunia. Manusia modern tidak memerlukan landasan nilai, kebenaran, atau legitimasi selain dari dalam dan untuk dirinya sendiri—manusia modern bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Bagi Hegel, tidak ada landasan lain yang dapat menopangi subyek yang merdeka selain dari ‘akal budi’ sang subyek itu sendiri—akal budi yang mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Baginya adalah ilmu pengetahuan yang menjadi mahkota dari apa yang disebutnya *Kebenaran Ideal* (spirit), menggantikan mitos, legenda, atau wahyu. Konsep ‘Spirit’ (*Geist*) yang digunakan Hegel, menjelaskan satu konsep orde universal yang diidentifikasi sebagai ‘kehendak Tuhan yang menjelma di dunia’. Ilmu pengetahuan itu sendiri—sebagaimana subyek yang mencarinya—tidaklah sempurna dari awalnya. Spirit dan subyek selalu berada dalam proses ‘menjadi’.

Dunia modern memunculkan pemahaman-pemahaman tertentu tentang moralitas, tetapi juga menghancurkan dasar-dasar untuk menganggap serius pemahaman tertentu. Sampai sejauh ini perdebatan seputar permasalahan tersebut masih menjadi bahan pembicaraan.

Masyarakat yang atomistik, impersonal, dan penuh persaingan dalam dunia pasar dan Kapitalisme, membuat orang tidak lagi menemukan jati dirinya dalam jati-diri-sosial. Dalam masyarakat tersebut jati diri individual seseorang menjadi abstrak dan berdasarkan pilihan bebasnya sendiri. Moralitas publik tidak lagi dapat didasarkan atas kesadaran untuk mengejar keutamaan hidup sebagai manusia, karena mengenai mana yang disebut keutamaan dan mana yang disebut cacat semakin sulit diperoleh kata sepakat. Apa yang secara tradisional dijadikan dasar material, objektif dan rasional untuk hidup bermoral,

yakni kodrat kemanusiaan yang secara ontologis terarah pada *yang baik*, kini rupanya dipertanyakan, karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan kebebasan eksistensial manusia. Dapat dipandang bahwa eksistensi manusia adalah segala-galanya yang dapat menembus batas-batas nilai moral yang selama kurun waktu sebelumnya menjadi landasan berpikir dan bertindak manusia. Moralitas dalam masyarakat modern tidak lagi dilihat dan dihayati sebagai wujud pemenuhan diri, tetapi sebagai pemberi batas-batas yang menjamin kebebasan individu dalam hubungan kontraknya dengan individu lain.

### 7.3. Kritik Kaum Posmodernisme<sup>28</sup>

Dari segi filosofinya sendiri Kapitalisme - yang berhubungan erat dengan filsafat materialisme dan berbagai filsafat yang lain sehingga membentuk wajah kehidupan modern sekarang ini - juga mendapatkan banyak kritikan tajam. Salah satu gerakan kontemporer yang rajin mengkritik seluruh aspek Kapitalisme sampai ke dasar-dasarnya adalah posmodernisme. Gerakan ini telah bergerak dalam berbagai bidang kehidupan untuk mencoba mempertanyakan kembali konsep kehidupan modern yang ternyata meninggalkan banyak penindasan terhadap martabat kemanusiaan.

Postmodernisme adalah wacana kesadaran yang mencoba mempertanyakan kembali batas-batas, implikasi dan realisasi asumsi-asumsi modernisme; kegairahan untuk memperluas cakrawala estetika, tanda dan kode seni modern; wacana kebudayaan yang ditandai dengan kejayaan Kapitalisme, penyebaran informasi dan teknologi secara masif, meledaknya konsumerisme, lahirnya realitas semu, dunia hiperrealitas dan simulasi, serta tumbangny nilai-

---

<sup>28</sup> Sub bab ini berisi kritikan kaum posmodernisme terhadap modernisme yang dianggap telah meyimpang dari tujuan pencerahan. Kebanyakan isi diambil dari karya Medhy Aginta Hidayat 2000, *Kebudayaan Postmodern Menurut Jean Baudrillard*, Sumber yang tertulis dalam sub bab ini yang tidak tercantum di daftar pustaka diambil dalam karya ini.

guna dan nilai-tukar oleh nilai-tanda dan nilai-simbol. Sebagai sebuah pemikiran, postmodernisme pada awalnya lahir sebagai reaksi kritis dan reflektif terhadap paradigma modernisme yang dipandang gagal menuntaskan proyek pencerahan yang dan menyebabkan munculnya berbagai patologi modernitas.

Pauline M. Rosenau, dalam kajiannya mengenai postmodernisme dan ilmu-ilmu sosial, mencatat setidaknya lima alasan penting gugatan postmodernisme terhadap modernisme (Rosenau, 1992: 10) dalam Medhy (2000).

1. Pertama, modernisme dipandang gagal mewujudkan perbaikan-perbaikan ke arah masa depan kehidupan yang lebih baik sebagaimana diharapkan oleh para pendukungnya.
2. Kedua, ilmu pengetahuan modern tidak mampu melepaskan diri dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan otoritas keilmuan demi kepentingan kekuasaan.
3. Ketiga, terdapat banyak kontradiksi antara teori dan fakta dalam perkembangan ilmu-ilmu modern.
4. Keempat, ada semacam keyakinan bahwa ilmu pengetahuan modern mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi manusia. Namun ternyata keyakinan ini keliru dengan munculnya berbagai patologi sosial.
5. Kelima, ilmu-ilmu modern kurang memperhatikan dimensi-dimensi mistis dan metafisis manusia karena terlalu menekankan atribut fisik individu. Modernisme yang dulu diagung-agungkan sebagai pembebas manusia dari belenggu mitos dan berhala kebudayaan abad pertengahan yang menindas, kini terbukti justru membelenggu manusia dengan mitos-mitos dan berhala-berhala baru yang bahkan lebih menindas dan memperbudak.

Pada titik inilah pemikiran tentang kebudayaan postmodern memiliki arti penting. Perubahan watak dan karakter modernisme dalam tampilannya yang paling kontemporer, telah mendorong lahirnya tanggapan kritis terhadap kebudayaan dewasa ini. Diskursus kebudayaan postmodern mendapatkan legitimasi sosio-kultural-filosofisnya justru dari kegamangan era modern dalam menuntaskan proyek pencerahan. Modernisme yang dihidupi oleh semangat pencerahan ini – dengan keyakinan akan prinsip kemajuan sejarah yang linear, kebenaran ilmiah yang mutlak, keampuhan rekayasa bagi suatu masyarakat yang diidealkan, serta pembakuan tata pengetahuan dan sistem produksi yang keras – saat ini tengah menghadapi ujian besar dengan menyebarnya berbagai patologi modernitas.

Baudrillard menyatakan bahwa realitas kebudayaan dewasa ini menunjukkan adanya karakter khas yang membedakannya dengan realitas kebudayaan modern masyarakat Barat. Inilah kebudayaan postmodern yang memiliki ciri-ciri hiperrealitas, dan simulasi, serta didominasi oleh nilai-tanda dan nilai-simbol. Wacana ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk mulai memperhatikan sisi lain realitas masyarakat.

Secara historis, semangat dan jiwa modernisme sendiri sebenarnya bisa ditelusuri semenjak era Renaisans abad ke-16 M dan Aufklarung abad ke-18 M. Bahkan Arnold Toynbee, seorang filsuf sejarawan, melalui bukunya *A Study of History* (1947), menyatakan bahwa awal “Era Modern dalam Sejarah Kebudayaan Masyarakat Barat” terjadi pada paruh kedua abad ke-15 M di daratan Eropa, dimana saat itu muncul fenomena “pharisaisme budaya” dan teknologi penguasaan samudera secara ekstensif (Smart, 1990: 16 dalam Medhy ;2000)

Kedua fenomena sejarah tersebut, menurut Toynbee, merupakan titik awal kedewasaan dan kematangan manusia untuk mulai berani menguasai alam dan melepaskan diri dari dogma-dogma institusi agama. Dengan keberanian

inilah manusia menyatakan telah memasuki era baru, era pasca abad pertengahan, yakni era modern. Di sisi lain, Marshall Berman, dalam kajiannya tentang modernisme, menyatakan bahwa era modern telah dimulai sejak era Renaisans abad ke-16 M dan berkembang dalam tiga fase sejarah modernisme. (Smart, 1990: 16 dalam Medhy ;2000)

- ⇒ Fase pertama, adalah modernisme yang berkembang semenjak awal abad ke-16 M hingga akhir abad ke-18 M, dimana orang baru mulai merasakan pengalaman kehidupan modern. Modernisme pada tahap ini ditandai oleh mulai diyakininya rasio, keberanian menghadapi kehidupan secara nyata, memudarnya religiusitas dalam berbagai segi kehidupan, serta lahirnya pemberontakan kreatif dalam dunia seni.
- ⇒ Fase kedua, adalah modernisme yang ditandai dengan Revolusi Perancis dan kekacauan sosial, politik dan ekonomi yang seringkali dihubungkan dengan momentum “Gelombang Revolusi Besar 1790”. Inilah wajah modernisme yang mulai diwarnai oleh benih-benih konflik, perbedaan dan anomali. Lenturnya ikatan sosial, runtuhnya keyakinan tradisional dan agama, serta pesatnya perkembangan sosial, telah mendorong munculnya berbagai masalah yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
- ⇒ Fase ketiga, adalah modernisme yang dimulai ketika terjadi proses modernisasi global dan pembentukan “kebudayaan dunia modern” secara massal dimana semakin banyak terjadi kekacauan sosial dan politik, ketidakpastian dan ancaman terhadap realitas dunia yang baru terbentuk

Istilah modern sendiri, yang berarti “zaman baru”, berasal dari bahasa Latin *modernus*, yang telah digunakan pada abad ke-5 M untuk menunjuk batas antara era kekuasaan agama Kristen dan era Paganisme Romawi (Smart, 1990: 15 dalam Medhy ;2000). Istilah ini kemudian berkembang menjadi beberapa istilah turunan yang kesemuanya menunjuk pada suatu kurun sejarah setelah era Abad Pertengahan. Beberapa istilah tersebut adalah modernitas, modernisasi

dan modernisme. Dalam penggunaannya, seringkali terjadi tumpang tindih dan simplifikasi pengertian diantara berbagai istilah ini. Meskipun demikian, diterima suatu kenyataan bahwa yang diacu oleh istilah-istilah ini adalah suatu era kebudayaan baru yang ditegakkan oleh rasio, subjek dan wacana antropomorfisme.

Rasionalitas modernisme yang berkembang semenjak era Renaisans abad ke-16 M ini memiliki dua karakter mendasar. Pertama, sebagai rasionalitas tujuan (*Zweckrationalitat*). Kedua, sebagai rasionalitas nilai (*Wertrationalitat*). Merujuk Max Weber, sosiolog Jerman yang mengkaji modernisme secara mendalam.

- ⇒ karakter pertama rasionalitas modernisme mengacu pada pengertian perhitungan yang masuk akal untuk mencapai sasaran berdasarkan pilihan-pilihan yang masuk akal dan dengan sarana-sarana yang efisien serta mengacu pada perumusan nilai-nilai tertinggi yang mengarahkan tindakan dan orientasi-orientasi yang terencana secara konsisten dari pencapaian nilai-nilai tersebut. Rasionalitas ini berwatak formal, karena hanya mementingkan cara-cara mencapai tujuan dan tidak mengindahkan nilai-nilai yang dihayati sebagai intisari kesadaran.
- ⇒ Karakter kedua rasionalitas modernisme mengacu pada kesadaran akan nilai-nilai etis, estetis dan religius. Rasionalitas ini berwatak substantif, karena lebih mementingkan komitmen rasional terhadap nilai-nilai yang dihayati secara pribadi. Namun, diantara kedua bentuk rasionalitas ini yang sangat dominan dalam realitas dunia modern adalah “rasionalitas tujuan”.

Dalam kajian pentingnya tentang modernisme tersebut, selanjutnya Weber menyatakan bahwa pada dasarnya modernitas adalah gagasan yang menyangkut persoalan pemisahan bidang-bidang nilai dan tatanan kehidupan. Ia berpendapat bahwa wilayah-wilayah nilai ekonomi, etika, hukum dan estetika,



yang sebelumnya terstruktur dengan satu prinsip kesatuan dalam wilayah religius Abad Pertengahan, kemudian mulai dipisahkan oleh rasionalisme Pencerahan. Landasan utama argumen Weber ini adalah adanya fenomena otonomisasi wilayah-wilayah nilai terutama wilayah nilai estetis. Dengan merosotnya agama, lapangan estetika seolah menjadi satu-satunya tempat pelarian dalam dunia yang sarat beban mencapai rasionalitas tujuan (Lash, 1990: 157) dalam Medhy (2000)

Modernitas, menurut Weber merupakan konsekuensi proses modernisasi, dimana realitas sosial berada di bawah bayang-bayang dan dominasi sekularisasi, klaim universalistik tentang rasionalitas instrumental, diferensiasi bidang-bidang kehidupan, birokratisasi ekonomi, praktek-praktek politik dan militer, serta tumbuhnya moneterisasi nilai-nilai.

Menurut Turner (1990) dalam Medhy (2000), modernitas lahir bersamaan dengan menyebarnya imperialisme Barat abad ke-16 M; dominasi Kapitalisme Eropa Utara, khususnya di Inggris dan Belanda; pengakuan dan penerapan metode ilmiah Francis Bacon dan Issac Newton; institusionalisasi keyakinan dan praktek-praktek Calvinisme di Eropa Utara; pemisahan konsep keluarga dari kelompok kekerabatan yang umum; serta pembentukan konsep negara-bangsa (nation-state) abad ke-19 M Modernitas juga menunjuk pada perubahan sosial budaya secara massif, pemutusan hubungan secara radikal terhadap tradisi dan kemapanan sosial peradaban yang mandeg. Dengan kata lain, modernitas adalah sejarah penaklukan nilai-nilai lama Abad Pertengahan oleh nilai-nilai baru Modernisme.

Secara epistemologis, modernitas meliputi empat unsur pokok.

- ⇒ Pertama, *subjektivitas yang reflektif*, yakni pengakuan akan kekuatan-kekuatan rasional dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan.

- ⇒ Kedua, *subjektivitas yang berkaitan dengan kritik atau refleksi*, yakni kemampuan untuk menyingkirkan kendala-kendala kebebasan dari tradisi dan sejarah.
- ⇒ Ketiga, *kesadaran historis yang dimunculkan oleh subjek*, bahwa waktu berlangsung secara linear, unik, tak terulangi dengan titik berat pada kekinian sebagai sumber sejarah. Oleh sebab itu, modernisme memiliki kata-kata kunci: revolusi, evolusi, transformasi serta progresi. Dengan kata lain, modernitas mendukung rasio (di atas wahyu), kemajuan (di atas kemapanan) dan kebaruan (di atas kelampauan).
- ⇒ Keempat, *universalisme yang mendasari ketiga unsur sebelumnya*. Dengan universalisme dimaksudkan bahwa elemen-elemen modernitas bersifat normatif untuk masyarakat yang akan melangsungkan modernisasi. Secara historis, sifat normatif ini diaktualisasikan dalam gerakan Renaisans abad ke-16 M dan Pencerahan abad ke-18 M. Dengan modernisasi, kebenaran wahyu diuji di hadapan rasio, legitimasi kekuasaan digugat melalui kritik dan kesahihan tradisi dipertanyakan berdasarkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dengan kata lain, semenjak suatu masyarakat menyatakan diri melaksanakan proses modernisasi, maka masyarakat tersebut harus siap meninggalkan sikap-sikap naif, dogmatis dan anti-perubahan, untuk kemudian meleburkan diri dalam suatu proyek sejarah umat manusia mencapai tujuan tertentu di masa depan.

Sementara itu dalam diskursus filsafat, modernisme mulai dibicarakan dan menemukan kematangannya melalui filsuf-filsuf Descartes, Immanuel Kant dan Hegel. Melalui pemikiran tokoh-tokoh inilah modernisme mulai memperkokoh diri dengan kebenaran-kebenaran ontologis, etis dan epistemologis. Perkembangan modernisme dalam berbagai wilayah kehidupan lainnya tidak dapat dipungkiri merupakan implementasi pemikiran filosofis ketiga tokoh ini.

Rene Descarteslah yang menyadarkan manusia akan kedudukan rasio sebagai determinan pengetahuan dan pembacaan realitas dengan diktumnya *Cogito ergo sum*: aku berpikir maka aku ada. Melalui Kant, hasrat emansipasi ini selanjutnya dibawa kepada *kritisism* yang menyarankan kategori-kategori sebagai batas-batas realitas “yang terberi”. Dengan kategori-kategori ini setiap ide, gagasan, pengalaman bahkan khayalan direkonstruksi dalam sebuah ruang pembacaan baku. Dengannya setiap realitas tidak dapat lolos dari mekanisme pembacaan ini. Kualitas, kuantitas, ruang, waktu, modalitas, substansi, kausalitas dan lain-lain, seolah-olah telah ditentukan batas dan nilainya. Selanjutnya melalui Hegel, realitas modernisme disempurnakan dengan ide gerak sejarah dialektis yang berpuncak pada rasio. Idealisme absolut, yang merangkul tese dan antitese ke dalam konsepsi *Aufgehoben* – suatu filsafat identitas – menjadi sebuah narasi utama modernisme.

Gerakan Renaisans, yang mendapat ilham dari semangat Humanisme Italia pada abad ke-16 M, selanjutnya semakin memperkokoh keyakinan akan segera lahirnya era baru menggantikan era Abad Pertengahan yang dipandang telah jenuh, dogmatis dan beku. Sementara Pencerahan (*Aufklarung*) abad ke-18 M menjadi landasan tegaknya era baru, yakni era modern. Modernisme yang rasional, ketat, serius, sistematis dan tertib inilah wacana dominan yang mengisi diskursus sejarah filsafat Barat abad ke-18 M hingga sekarang. Semangat emansipasi, optimisme dan heroisme menghadapi situasi zaman seolah merupakan satu-satunya tanggapan terhadap proyek sejarah modernisme.

Padahal, sebagaimana diungkap Michel Foucault, pada waktu itu terdapat pula tanggapan menyimpang – terutama dari kalangan seniman – yang bernada ironi terhadap modernisme. Ironi adalah semacam keberanian, yang disertai kegetiran, untuk terlibat secara aktif dalam dunia kini dan disini (lokal-historis) tanpa harus menggantungkan diri pada kebenaran-kebenaran di luar diri manusia. Ironi juga berarti menjalani hidup tanpa dibebani oleh prinsip-

prinsip baku dan tidak berpretensi untuk menjadi juru selamat. Membaca modernisme dengan sikap ironi ini berarti menolak anggapan bahwa modernitas membawa nilai-nilai universal (Ahmad Sahal, 1994: 16) dalam Medhy (2000). Terdapat pelbagai nilai, keyakinan, realitas dan praktek-praktek sosial yang ternyata menyimpang dari rasionalitas era modern. Penyair Perancis Charles Baudelaire misalnya, adalah salah seorang pembaca modernisme dengan cara demikian.

Cara membaca seperti diwakili Baudelaire inilah yang kini mulai menyingkap paradoks modernitas. Suara-suara minoritas modernisme : subkultur, hippies, punk, skin head, masyarakat terasing, dunia ketiga, kaum gay, gerakan lingkungan hidup, kaum feminis, budaya tanding – mulai menggugat kesombongan modernisme yang dianggap gagal merampungkan proyek “heroisme” Pencerahan untuk membangun sebuah masa depan yang lebih baik. Setidaknya terdapat enam alasan eksese negatif proyek modernisme yang kini sedang digugat dan dipertanyakan.

Pertama, lantaran pandangan dualistiknya yang membagi seluruh kenyataan menjadi subjek-objek, spiritual-material, manusia-dunia, dan lain-lain, telah mengakibatkan objektivasi alam secara berlebihan dan eksploitasi alam secara semena-mena. Kedua, pandangan modern yang cenderung objektivistik dan instrumentalis-positivistik akhirnya jatuh pada “pembendaan” (reifikasi) manusia dan masyarakat. Sebagai akibatnya modernisme yang dahulu emansipatif kini justru bersifat dehuman. Ketiga, dominasi ilmu-ilmu empiris-positivistik terhadap nilai moral dan religi menyebabkan meningkatnya tindak kekerasan – fisik maupun kesadaran – keterasingan dan pelbagai bentuk depresi mental. Keempat, merebaknya pandangan materialisme, yakni prinsip hidup yang memandang materi dan segala strategi pemuasannya sebagai satu-satunya tujuan. Kelima, berkembangnya militerisme karena moral dan agama tidak lagi memiliki kekuatan disiplin dan regulasi. Keenam, bangkitnya kembali

tribalisme, semangat rasisme dan diskriminasi, yang merupakan konsekuensi logis hukum “:survival of the fittest” dari Charles Darwin (Bambang Sugiharto, 1996: 29-30 dalam Medhy, 2000). Dampak negatif modernisme ini sekaligus menjadi senjata para seniman dan kelompok marjinal lainnya untuk menyerang dan mendesak dipikirkannya kembali proyek modernisme.

Pauline M. Rosenau, dalam kajiannya mengenai postmodernisme dan ilmu-ilmu sosial, mencatat setidaknya lima alasan penting terjadinya krisis modernisme (Rosenau, 1992: 10) dalam Medhy (2000)

1. Pertama, modernisme dipandang gagal mewujudkan perbaikan-perbaikan ke arah masa depan kehidupan yang lebih baik sebagaimana diharapkan oleh para pendukungnya.
2. Kedua, ilmu pengetahuan modern tidak mampu melepaskan diri dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan otoritas keilmuan demi kepentingan kekuasaan.
3. Ketiga, terdapat banyak kontradiksi antara teori dan fakta dalam perkembangan ilmu-ilmu modern.
4. Keempat, ada semacam keyakinan bahwa ilmu pengetahuan modern mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi manusia. Namun ternyata keyakinan ini keliru dengan munculnya berbagai patologi sosial.
5. Kelima, ilmu-ilmu modern kurang memperhatikan dimensi-dimensi mistis dan metafisis manusia karena terlalu menekankan atribut fisik individu.

Ditambah oleh perkembangan Kapitalisme lanjut yang luar biasa dahsyat, sebagaimana diungkap Fredric Jameson dalam bukunya *Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism* (1984), maka menjadi wajarlah gugatan, kejenuhan dan kekecewaan terhadap semangat modernisme (Medhy;2000).

#### 7.4. Kritik Terhadap Landasan Ekonomi Kapitalis

Setelah beberapa kritik ditujukan kepada Kapitalisme dan modernisme- sebagai paham yang melahirkan sistem ekonomi- berikut beberapa kritik terhadap landasan sistem ekonomi Kapitalisme.

Chapra (2000) memberikan beberapa kritik terhadap landasan sistem ekonomi Kapitalisme sebagai berikut :

##### ⇒ Hukum –Hukum Ekonomi

Pandangan fisika Newtonian yang telah diadopsi dalam sistem ekonomi membuat masyarakat seperti sebuah mesin besar yang bisa digerakkan. Hal ini bisa menimbulkan persepsi bahwa manusia, sebagai materi juga bersifat mekanis.

##### ⇒ Konsep Homoeconomicus yang Rasional

Konsep mementingkan kepentingan pribadi ini bisa tak terkendali dan merupakan noda sosial dan agama bagi suatu masyarakat yang masih memiliki hati nurani. Kebanyakan ilmuwan tidak mempertentangkan antara teori murni dan asumsi bahwa perilaku ekonomi pada umumnya rasional. Namun pengertian rasionalitas masih bisa diperdebatkan. Demikian juga perhitungan nilai-nilai dan moral (yang sebetulnya menjadi asumsi dasar Adam Smith) tidak dapat diukur maka tidak dapat dimasukkan dalam epistemologi Kapitalisme.

##### ⇒ Positivisme yang Imoral

Positivisme yang dapat diartikan bebas etika dan normatif membuat ekonomi menjadi tidak terikat dengan etika.

##### ⇒ Hukum Say

Hukum Say mengenai "*Supply Creates Its Own Demand*" telah menyesatkan banyak orang yang terlalu percaya pada kekuatan pasar. Hal ini pernah terbukti pada jaman Malaise yang melanda dunia (Eropa) ketika banyak pemerintah seakan-akan membiarkan kondisi perekonomian berlarut-larut. Hal

ini seiring pendapat Keynes yang mengkritik Hukum Say dan mengusulkan tindakan proaktif pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian.

### ☞ Darwinisme Sosial

Konsep Darwinisme sosial telah menghancurkan sendi-sendi moral dan kepedulian sosial terhadap pihak-pihak yang sejak awal terlahir dalam keadaan lemah sebagai bentuk legitimasi orang-orang “mampu” untuk tidak melakukan apa-apa atau membenarkan penindasannya. Walaupun pada dasarnya setiap orang memiliki rasa kemanusiaan, namun batas ini menjadi semakin kabur oleh konsep hukum rimba dari Darwinisme Sosial. Hal ini menyebabkan konflik antara tujuan dan paradigma serta strategi yang digunakan. Tujuan-tujuan kemanusiaannya didasarkan pada suatu fondasi moral, sedangkan paradigma dan strategi yang digunakan adalah Darwinisme Sosial.

### ☞ Asumsi-asumsi yang Tidak Realistis

#### *a. Preferensi Individu Mencerminkan Prioritas Sosial*

Asumsi bahwa konsumen yang berkuasa akan membatasi pemakaian sumber daya yang langka hanya untuk memenuhi kebutuhan. Asumsi ini ternyata banyak kepalsuan dengan tiga alasan sebagai berikut :

1. Tidak ada alasan mengapa dalam ketiadaan nilai-nilai moral setiap individu yang memiliki kebebasan mutlak akan mengerem keinginannya selama ia masih mempunyai uang. Justru rasional sekali memperkirakan bahwa ia akan membeli apapun sesuai dengan skala prefensinya dengan mengabaikan dampak pada ketersediaan sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan hidup orang miskin.
2. Membedakan antara “kebutuhan” (*need*) dan “keinginan” (*want*) atau yang penting dan yang tidak penting tidak dapat dilakukan tanpa adanya mekanisme filter yang secara sosial disepakati.

3. Dalam usaha memperoleh keuntungan maksimal, dunia bisnis telah menjebak konsumen yang berdaulat dengan berbagai sarana promosi melalui pos dan media masa. Semuanya menjanjikan daya tarik yang menggairahkan dan penuh dengan kesombongan, yang menimbulkan kecemburuan sosial baik terang-terangan atau tidak.

#### *b. Distribusi yang Merata*

Adalah mustahil untuk mewujudkan pemerataan pendapatan tanpa adanya suatu mekanisme filter, sebab ketidakmerataan yang tinggi dalam warisan kekayaan ditambah akses yang tidak merata terhadap fasilitas (pendidikan, kredit usaha, latar belakang sosial, bakat dan sebagainya) memungkinkan kelompok strata berpendapatan tinggi untuk berbuat curang.

1. Harga sebagai Cermin Tiap Kepentingan

Preferensi orang memang bisa berbeda. Tetapi ketimpangan pendapatan akan membuat apa yang ada di pasar memihak kepada konsumen berpendapatan tinggi, dengan simbol-simbol statusnya.

2. Pasar Persaingan Sempurna

Asumsi pasar persaingan sempurna tidak pernah terwujud dalam perekonomian, apalagi dalam lingkup masyarakat yang masing-masing individunya adalah manusia ekonomi sehingga segala teori yang berdasar padanya juga sulit terwujud.

3. Adanya Penyimpangan Prioritas

Dengan ketimpangan pendapatan dan tiadanya nilai-nilai yang disepakati, cenderung mengarah kepada pemanfaatan yang tidak efisien dan tidak adil atas sumber daya, sehingga kurang diperhatikan masalah prioritas dalam distribusinya.



### 7.5. Kritik Terhadap Sistem Ekonomi dan Moneter Islam

Tidak seperti dalam sistem moneter Kapitalis yang sudah mapan dalam tata ekonomi dunia sehingga dapat dengan mudah diteliti kelebihan dan sekaligus kelemahannya, tentu saja karena dukungan data-data empiris dan juga literatur-literatur yang memadai, dalam sistem moneter Islam agak sulit ditemukan hal-hal tersebut. Hal ini bukan berarti bahwa dalam sistem moneter Islam tidak terdapat kekurangan-kekurangan yang bisa dikritik. Kurangnya data empirik membuat sistem ini masih memerlukan waktu untuk banyak dikritik kekurangannya. Namun demikian kritik yang bersifat teoretis juga sangat diperlukan dalam perkembangannya. Kritik ini tentu saja bukan mengkritik Islam sebagai agama, namun lebih melihatnya dari sudut pandang epistemologi suatu sistem moneter, bagian dari sistem ekonomi, dimana pendapat yang ada di sana juga masih pendapat para pakar ekonomi Islam yang bersifat tentatif.

Pada umumnya sistem ekonomi yang ditawarkan oleh para ahli ekonomi Islam memang tidak memisahkan hal-hal yang bersifat positif dan normatif, seperti tradisi selama ini dalam keilmuan barat. Di satu sisi hal ini justru memperkaya khasanah pengetahuan dan suatu usaha menciptakan pemikiran dan perilaku manusia yang holistik, tapi di sisi lain menjadi salah satu penyebab kesulitan orang non muslim dalam mempelajari apalagi mengaplikasi perekonomian Islam. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Humayon A. Dar dan John R. Presley (1999) :

*The theoretical treatment of Islamic finance offers much support for its introduction (Presley and Sessions, 1994); however it has proven extremely difficult to implement in practice*

Setidaknya pandangan di atas mengisyaratkan bahwa betapapun baiknya ekonomi Islam, masih terlalu sulit untuk dilaksanakan. Bahkan hal ini bukan

ditinjau berdasarkan pertimbangan syariahnya, namun lebih melihat pada tataran praktisnya.

Kritik dari Barat selanjutnya seperti yang dikutip Chapra (2000), mengatakan bahwa, perekonomian Islam kurang praktis dan fleksibel karena berdasarkan pandangan mereka selama ini bahwa suku bunga yang berbentuk uang telah menjadi suatu mekanisme yang baik dalam alokasi sumber-sumber daya secara efisien dan bahwa keuntungan tidak dapat melakukan fungsi secara efisien. Mengutip pendapat Mill and Presley (1999)<sup>29</sup> :

*"Western societies have been stripped of the ethical presuppositions conducive to the proscription of interest"*

Pandangan altruistik Islam di satu sisi merupakan hal yang sangat baik karena hidup bersama orang lain dalam suasana kepedulian sosial merupakan satu dari kebutuhan manusia yang mendasar. Namun demikian pandangan ini dapat dianggap sebagai penghalang manusia untuk maju. Orang yang terbiasa dibantu dan tidak terbiasa untuk bersaing akan dapat mengurangi motivasinya untuk maju, demikian bunyi kritik yang sering terdengar. Satu hal lagi yang perlu dicatat adalah adanya kesan eksklusif pada istilah ekonomi Islam atau berbagai atribut sistem berlabel Islam. Hal ini bukan berarti bahwa penyebutan kata "Islam" kurang tepat, sama sekali bukan. Tetapi jika kita bisa sedikit melihat dari kacamata orang non muslim, maka kata ini bisa sedikit banyak menjadi tirai orang lain untuk bisa dekat dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini tampak pada banyak istilah dalam sistem moneter seperti riba (usury), mudharabah, musyarakah, murabahah dan masih banyak lagi sebagaimana telah

---

<sup>29</sup> Paul s. Mill and John Presley, 1999, *Islamic Finance: Theory and Practice*, Macmillan, London hlm. 113 dalam M. Umer Chapra, 2000, *Alternative Visions of International Monetary Reform*, Paper Presented at The fourth International Conference On Islamic Economics and Banking, Loughborough University, UK. hlm. 446.

disebutkan di awal karya tulis ini. Tetapi untuk menggantinya barangkali kita juga akan mengalami kendala karena ada beberapa kata yang memang lebih tepat jika ditulis dalam kata aslinya.

Selanjutnya Chapra (2000) mencatat beberapa kritikan terhadap sistem ekonomi atau sistem moneter Islam sebagai berikut <sup>30</sup>:

#### 1. Alokasi Sumber Daya yang Tidak Optimal

Menurut pendapat ini, bunga adalah harga dan sebagaimana harga-harga yang lain, ia berfungsi mengalokasikan dana-dana pinjaman yang langka diantara para pengguna yang jumlahnya tidak terbatas. Jika permintaan atau penawaran dana-dana yang dipinjamkan berubah, sebuah ekuilibrium baru akan dicapai pada tingkat suku bunga yang berbeda. Selanjutnya dikatakan bahwa, tidak sebagaimana sistem bunga, keuntungan tidak dapat melakukan fungsi secara efisien.

#### 2. Tabungan dan Formasi Modal yang Kecil

Hal ini berdasarkan argumen bahwa dalam perekonomian Islam di mana terdapat laju preferensi waktu sosial yang positif ditambah adanya efek inflasi yang menggerogoti nilai uang, akan terbentuk tabungan dan formasi modal positif yang kecil<sup>31</sup>. Dalam bahasa yang sederhana perekonomian Islam akan kekurangan modal.

#### 3. Kurangnya Stabilitas

Disebutkan bahwa perekonomian berdasarkan penyertaan modal (dengan bagi hasil) tidak stabil tanpa alasan yang logis dan bukti empiris. Barangkali yang menjadi alasan mereka adalah karena sistem bagi hasil mengandung resiko yang tidak pasti akan membuat perekonomian secara

---

<sup>30</sup> Chapra memberikan pandangannya terhadap kritik-kritik ini. Beberapa kritikan yang disebutkan di sini diambil dari Chapra, 2000, *Sistem Moneter Islam*, hlm. 67-94.

<sup>31</sup> N.H. Naqvi, 1991, *Ethics and Economic: An Islamic Synthesis*, The Islamic Foundation, Leicester, UK hlm. 119-121 dalam M. Umer Chapra, 2000, *Sistem Moneter Islam*, Terjemahan, Ikhwan Abidin B., Penerbit Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, Jakarta hlm. 69-75.

umum tidak stabil. Tidak seperti dalam sistem bunga yang menjanjikan pendapatan bunga atau beban bunga yang pasti dalam suatu usaha.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi yang Rendah

Kritik ini menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah sesudah penghapusan bunga<sup>32</sup>. Hal ini terbukti dari adanya kenyataan bahwa negara-negara muslim pada umumnya mengalami laju pertumbuhan yang rendah selama beberapa kurun waktu.

#### 5. Kerugian-kerugian Pada Deposito dalam Sistem Islam

Alasan pendapat ini adalah bahwa para penabung akan merasa khawatir pada deposito mereka di bank-bank Islam, karena tidak adanya kepastian return yang mereka dapatkan sebagaimana dalam bank konvensional. Sebagaimana diketahui dalam *prinsip profit and loss sharing* para pemilik deposito (deposito *mudharabah*) juga menghadapi resiko resiko rugi.

#### 6. Kesulitan Pinjaman Jangka Pendek

Ada yang berpendapat bahwa dalam perekonomian Islam tidak semua pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan bagi hasil, contohnya *call loans*, *overnight loans*, *day loans* dan lain sebagainya. Tidak dimungkinkan persiapan bagi hasil karena sulitnya menentukan keuntungan dalam waktu sependek itu.

#### 7. Sulitnya Mendapatkan Kredit Angsuran

Persoalan selanjutnya dalam perekonomian Islam adalah sulitnya mendapatkan kredit konsumsi dan pinjaman untuk pembangunan proyek-proyek seperti rumah dan industri perumahan.

#### 8. Kebutuhan Pinjaman Pemerintah

Para pengkritik sistem moneter Islam ini berpendapat bahwa dalam perekonomian bebas bunga, tidak mungkin bagi pemerintah untuk membiayai defisit anggaran dengan melakukan pinjaman dari sektor swasta. Defisit

---

<sup>32</sup> M. Umer Chapra, 2000, *Sistem Moneter Islam*, hlm. 79-82

anggaran, seperti yang mereka katakan, adalah cara penting untuk pertumbuhan dan meningkatkan standar kehidupan.

Itulah beberapa Argumen yang ditujukan pada sistem ekonomi dan atau sistem moneter Islam. Kritik-kritik tersebut berasal baik dari kalangan intelektual non Islam maupun oleh para ekonom Islam sendiri.

## *BAB 8*

### *Tinjauan Komparatif Sistem Moneter*

\*\*\*\*\*

Bab ini akan mencoba membandingkan sistem moneter dari pandangan Kapitalis dan Islam. Dalam bab-bab terdahulu telah diuraikan pandangan epistemologi Masing-masing sistem, dilanjutkan dengan uraian sistem ekonomi dan dilanjutkan sistem moneter. Sebagaimana yang menjadi tujuan penulisan ini maka perbandingan ini lebih difokuskan pada sudut epistemologi serta implikasinya terhadap perekonomian. Untuk lebih menyederhanakan dan memudahkan perbandingan tersebut maka akan diberi beberapa ringkasan dari bab-bab terdahulu.

Jika kita melihat segala sesuatu dengan berangkat dari paradigma yang berbeda kitapun akan melihat sesuatu tersebut menjadi berbeda. Namun bukan berarti segala sesuatunya harus berbeda. Banyak hal di dunia ini yang saling tumpang tindih dan saling berimpitan antara satu dengan yang lain. Sistem Moneter Kapitalis dan Islam berangkat dari epistemologi yang berbeda sehingga banyak hal yang bersifat mendasar berbeda satu dengan yang lain bahkan bertentangan, namun ada juga beberapa hal yang memiliki benang merah yang sama. Berikut akan kita komparasikan sistem moneter dengan melihat persamaan atau perbedaannya. Pembahasan akan dimulai dari konsep uang, masalah perbankan, bunga dan bagi hasil, bank sentral serta kebijakan moneter. Untuk lebih memudahkan kita dalam membandingkan kedua sistem tersebut maka masing-masing sub sistem moneter tersebut disajikan dalam bentuk table

### 8.1. Konsep, Permintaan, dan Penawaran Uang

Dari sedikit uraian dalam bab terdahulu dapat kita uraikan perbedaan masing-masing sistem dalam kaitannya dengan uang, karena itu tidak perlu dijelaskan lagi konsep tersebut di sini.

Tabel 8.1.  
Perbandingan Konsep Uang Antara Kapitalis dan Islam

NO	Ruang Lingkup	Kapitalis	Islam
1	Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tukar</li> <li>2. Penyimpan daya beli</li> <li>3. Satuan hitung</li> <li>4. Satuan ukuran masa depan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tukar</li> <li>2. Penyimpan daya beli</li> <li>3. Satuan hitung</li> <li>4 Fungsi sosial religious</li> </ol>
2	Motif Permintaan Uang oleh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk transaksi</li> <li>• Untuk berjaga-jaga</li> <li>• Untuk spekulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk transaksi</li> <li>• Untuk berjaga-jaga</li> <li>• Untuk Ibadah</li> </ul>
3	Konsep	<i>Public and Private good</i>	<i>Public Good</i>
4	Sifat dalam Perekonomian	Eksogen, dengan standar tingkat bunga	Endogen, dengan standar rate of profit
5	Faktor Determinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pendapatan</li> <li>• Tingkat bunga</li> </ul>	Tingkat Pendapatan

Dari gambaran sederhana di atas dapat dijelaskan bahwa mengenai fungsi uang sebenarnya tidak terlalu ada perbedaan baik dalam sistem ekonomi Islam maupun sistem ekonomi Kapitalis.

Satu hal yang perlu diperhatikan menurut Chapra (2000) adalah bahwa dalam Islam, uang juga memiliki fungsi sosial dan religius. Fungsi ini tampak dalam wujud penyaluran daya beli untuk pembayaran transfer kepada pihak yang miskin sebagai wujud amal ibadah. Selain itu juga memiliki fungsi sosial bisa menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam suatu kondisi tawar menawar tanpa akhir. Walaupun kedua fungsi tersebut sudah bisa tercakup dalam fungsi uang sebagai penyimpan daya beli dan satuan hitung, namun demikian perlu diingat dalam epistemologi Islam bahwa peranan nilai akan tetap dimasukkan dalam suatu model untuk menghindari pemikiran dikotomis manusia dalam aplikasi teori.

Tetapi untuk teori permintaan uang ada perbedaan yang cukup mendasar yaitu pada permintaan uang untuk spekulasi. Untuk permintaan uang pada sistem moneter Kapitalis yang dalam hal ini seperti yang dirumuskan oleh Keynes, ada motif spekulasi. Hal ini disebabkan oleh fungsi uang sebagai penyimpan daya beli yang berarti pula sebagai penyimpan kekayaan (aset) sehingga bisa pula dianggap fungsinya sebagaimana aset-aset lain dalam portofolionya. Dalam hal ini, karena di dalam perekonomian tersebut ada variabel bunga sebagai salah satu harga (selain harga umum dan upah) penggunaan aset maka permintaan uang juga merupakan fungsi dari tingkat bunga, selain dari fungsi pendapatan. Sedangkan dalam perekonomian Islam tidak ada bunga, karena bunga adalah salah satu riba yang dilarang. Sehingga dengan sendirinya tidak ada motif permintaan uang untuk tujuan spekulasi dalam kerangka memaksimalkan pendapatan sebagaimana dalam masyarakat Kapitalis.

Kesimpulan ini diperkuat oleh pendapat Metwally (1995) bahwa pada perekonomian Islam, tingkat pendapatan adalah determinan yang penting dalam menentukan permintaan uang dalam ekonomi Islam. Implikasi dari fenomena ini adalah bahwa dalam perekonomian Islam tidak terlalu menjadi masalah bila tidak ada faktor bunga karena faktor ini tidak memiliki arti yang signifikan dalam perekonomian. Sebaliknya dalam perekonomian non Islam (Kapitalis) Tingkat pendapatan dan tingkat bunga merupakan determinan yang penting dalam menentukan permintaan uang oleh masyarakat. Meskipun Kedua penelitian tersebut menggunakan model ekonometri yang sama dan negara yang menjadi obyek penelitian memiliki struktur ekonomi yang sama dan tingkat kemajuan yang sebanding.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>. Tingkat bunga bukan faktor yang penting dalam menentukan permintaan uang di negara non Islam yang maju dan berkembang. Lihat Metwally, 1995, Teori dan Model Ekonomi Islam, PT Bangkit Daya Insana, Jakarta, hal. 116-140.



Faktor lain yang mempengaruhi permintaan uang oleh masyarakat Islam yang bersifat normatif namun nyata terjadi yaitu untuk tujuan ibadah, seperti untuk sedekah, infak dan membayar zakat. Dari sini jelas terlihat bahwa selain dari persamaan-persamaan yang telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan yang jelas pada motif seseorang memegang uang. Motif ini tentu saja membawa implikasi yang luas dalam perekonomian. Meskipun faktor ibadah ini kemungkinan dapat dipersamakan dengan tujuan sosial dalam masyarakat Kapitalis dan mempengaruhi permintaan uang, tetapi pengaruh ini kurang signifikan. Terbukti dengan tidak dimasukkannya faktor ini dalam teori-teori motif memegang uang.

Di antara implikasi yang jelas dari perbedaan tersebut adalah pada perlakuan uang. Dalam masyarakat Islam, uang adalah barang publik dan sebagai alat tukar, tentu saja ia sendiri bukanlah komoditi yang bisa diperdagangkan sebagaimana dalam perekonomian Kapitalis. Karena itu pula akan mengurangi tingkat kegiatan spekulasi. Dalam masyarakat Kapitalis, karena uang adalah juga dapat dianggap sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan akan menimbulkan gejolak yang lebih besar dalam sektor moneter. Gejala inilah barangkali yang mendasari terjadinya *bubble economic*, dimana uang sebagai aset berharga yang memiliki tingkat likuiditas tertinggi, sebagaimana aset berharga yang lain dapat diperdagangkan dan berdampak transaksi di sektor moneter jauh lebih besar dibanding transaksi di sektor riil.

Meskipun dalam Islam dianjurkan untuk hidup hemat dan sederhana, namun bukan berarti uang yang ia pegang tidak digunakan sama sekali. Uang yang menganggur akan dikenakan zakat, sehingga, selain nilai nominalnya menurun karena dikikis inflasi, juga akan semakin habis dikenai zakat (tentu saja apabila sudah mencapai nishab). Karena itu sangat dianjurkan untuk menggunakan uang untuk kegiatan yang produktif. Misalnya untuk menjalankan usaha, atau dipinjamkan sesuai dengan syariah.

Berbeda dengan perekonomian Kapitalis, di mana uang bisa bertambah dengan hanya menabungnya di bank, tanpa mempedulikan apakah uang tersebut disalurkan untuk kegiatan yang produktif yang terkait dengan sektor riil atau digunakan untuk spekulasi dengan menukarnya pada surat-surat berharga. Hal inilah yang menyebabkan mengapa nilai transaksi di sektor riil jauh tertinggal dibanding sektor moneter.

Mengenai teori permintaan yang terbentuk dalam model maka akan jelas sangat berbeda asumsi yang digunakan. Perekonomian Kapitalis baik Klasik, Keynesian maupun Moneteris menggunakan data empiris dalam merumuskan model persamaannya. Data tersebut lebih banyak didapat dari studi empiris masyarakat di mana para pencetusnya tinggal. Kebanyakan para pemikir barat menggunakan aliran positivisme, yang menggunakan “metode ilmiah” sebelum mencetuskan teori. Hampir dapat dipastikan bahwa pemikiran mereka yang rasional akan memisahkan hal-hal yang normatif dari yang positif yang dapat diamati. Sementara model permintaan uang dalam perekonomian seperti yang diajukan oleh Choudhury (1997) dalam bab sebelumnya berawal dari asumsi yang positif sekaligus normatif.

Penawaran uang dalam kedua sistem tersebut hampir sama, bedanya adalah dalam ekonomi Kapitalis, Penawaran uang lebih ditentukan mekanisme pasar, kecuali kalau ada kebijakan khusus dari pemerintah. Sedangkan dalam masyarakat Islam, penawaran uang sama dengan permintaannya dalam kerangka mencapai tujuan sosio ekonomi Islam dan menjaga keseimbangan sektor riil dan moneter.

## **8.2. Bunga dan Riba**

Dari bahasan yang telah diuraikan sebelumnya disimpulkan bahwa bunga termasuk riba dan haram dalam ekonomi Islam. Karena itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan bunga jelas dilarang dalam Islam. Yang menjadi

permasalahan lebih rumit lagi adalah bahwa yang termasuk riba itu bukan hanya bunga saja, namun juga praktek-praktek lain yang dikategorikan dalam riba. Karena itu banyak hal dalam transaksi ekonomi, di mana di satu pihak, dalam hal ini perekonomian Kapitalis menggunakan bunga sebagai basis operasionalnya dan hal ini dilarang dalam masyarakat Islam.

Jadi perbandingan yang dimaksud disini adalah bagaimana kelebihan sistem perekonomian yang menggunakan basis bunga dan bagaimana pula kelebihan dengan menggunakan basis syariah, misalnya profit and loss sharing. Perbandingan tersebut adalah perbandingan ekonomis atau perbandingan berdasarkan besarnya manfaat ekonomis, termasuk perekonomian makro atau masyarakat secara keseluruhan. Satu hal yang tidak boleh lepas sebenarnya adalah implikasi masing-masing sistem terhadap keadilan dalam distribusi pendapatan.

### **8.2.1. Perbandingan Antara Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil**

Meskipun diharapkan sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun sistem bunga dan sistem bagi hasil mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Tabel 8.2. meringkas perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil.

**Tabel 8.2.**  
**Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil**

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang 'booming'	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2001, hlm.60).

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya antara sistem bunga dan sistem bagi hasil merupakan dua hal yang berbeda, baik dari segi esensi maupun teknisnya. Syariah Islam mensyaratkan bahwa kemitraan dan nisbah bagi hasil harus *sharing the risk and profit* secara bersama-sama. Hal ini merupakan realisasi penghargaan Islam terhadap waktu, yang diwujudkan dengan sistem bagi hasil, mengingat faktor ketidakpastian usaha dimasa yang akan datang. Islam mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan dari persentase tertentu dari kekayaan itu sendiri. Di sinilah penghargaan manusia terhadap perjuangan pihak yang menghadapi resiko.

Sementara itu, dalam perekonomian Kapitalis, bunga dianggap sebagai harga yang adil dan universal dalam penilaian seluruh usaha-usaha pengelolaan sumber daya, karena bunga adalah sesuatu variabel yang dianggap natural.

### 8.3. Masalah Perbankan

Banyak masalah perbankan yang akan dibahas disini, karena masalah perbankan cukup kompleks peranannya dalam masyarakat. Perbedaan bank Islam dan bank konvensional bukan hanya terletak pada dihapuskannya riba atau bunga pada perbankan Islam, namun mencakup banyak hal yang lebih kompleks dari itu. Perbankan Islam beroperasi sesuai dengan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam dan sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi selain dengan mengganti sistem bunga dengan sistem yang sesuai dengan syariah, misalnya bagi hasil, juga ada aturan-aturan tersendiri bagi bank Islam.

Secara sederhana Antonio (2001) membandingkan konsep bank Islam dan bank konvensional sebagaimana tampak dalam tabel 8.3.

Tabel 8.3.  
Perbandingan Antara Bank Islam (Syariah) Dan Bank Konvensional

NO	BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1	Melakukan investasi-investasi yang halal	Investasi yang halal dan haram
2	Berdasar prinsip bagi hasil, jual beli dan atau sewa	Memakai perangkat bunga
3	Profit dan <i>falah oriented</i>	<i>Profit Oriented</i>
4	Hubungan dengan Nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasah dalam bentuk debitor kreditor
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber : M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, GIP Jakarta, 2001

Dari beberapa perbedaan konsep tersebut bisa ditarik hal-hal yang cukup penting, bagaimana hal ini bisa mempengaruhi atau bagaimana implikasi perbedaan ini terhadap perekonomian.

Pertama, berkaitan dengan masalah Investasi. Karena Islam memiliki seperangkat nilai tersendiri, dalam hal investasipun mereka tidak akan lepas dari ikatan nilai tersebut, artinya, nilai normatif juga digunakan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan mengapa dalam bank Islam, investasi ataupun penyaluran kredit hanya diarahkan pada kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariah, baik dari mekanisme teknis keuangan itu sendiri maupun yang berkaitan dengan sektor-sektor yang diinvestasikan, harus bebas dari apa yang diharamkan oleh Islam. Tidak demikian halnya dalam bank konvensional yang bebas untuk menginvestasikannya untuk berbagai sektor, asal tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Kedua, tentang mekanisme transaksi yang digunakan, terdapat perbedaan yang sangat jelas diantara keduanya. Bank konvensional banyak menggunakan model transaksi berbasis tingkat bunga, baik untuk sisi aktivitya maupun pasivanya. Tentu saja di samping banyak hal yang sama, misalkan sistem fee, sewa, dan lain-lain. Sedangkan bank Islam menghindari transaksi yang berbasis tingkat bunga dengan menawarkan sistem jual beli, sewa dan bagi hasil.

Ketiga, berhubungan dengan tujuan tujuannya. Bank konvensional akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan atau profit yang didapat karena itulah konsep dalam Kapitalisme, sebagaimana konsep memaksimalkan kepuasan pada tiap individu. Untuk itu berbagai upaya dilakukan agar laba perbankan menjadi semakin besar, misalnya dengan konsep efisiensi, meskipun efisiensi mungkin juga dapat dicapai tanpa motivasi maksimalisasi keuntungan. Dengan keyakinan apabila semua pihak telah

melakukan efisiensi maka kesejahteraan umum akan tercapai dengan sendirinya. Hal ini sesuai dengan prinsip Adam Smith bahwa pada dasarnya setiap individu akan memiliki pertimbangan sendiri dan dialah yang lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan dan interaksi antar berbagai kepentingan individu untuk memaksimalkan kepuasannya ini akan menciptakan keseimbangan pasar pada umumnya. Berbeda dengan tujuan utama bank Islam yang selain berorientasikan laba, juga untuk menuju falah atau kesejahteraan masyarakat dunia akhirat

Keempat, menyangkut hubungan yang dibangun. Dalam bank konvensional, hubungan bank dan nasabah adalah sekedar hubungan debitur kreditur atau penghutang dan pemberi hutang. Sedangkan dalam bank Islam, hubungan yang dibangun adalah hubungan kemitraan atau partner. Barangkali ada yang berpendapat bahwa bentuk hubungan ini tidaklah terlalu penting, karena yang lebih penting dari itu adalah tersedianya dana bagi yang membutuhkan, dan saling menguntungkan. Pendapat tersebut tidak selalu salah, mengingat dalam lingkungan bisnis sekarang ini menyangkut prinsip bisnis modern. Namun bila kita bersedia sedikit untuk mengerti perbedaan tersebut adalah pada nilai hubungan yang dibangun. Mungkin dalam hal satu ini agak sulit diperdebatkan tetapi dapat dirasakan dalam analogi kehidupan sehari-hari menyangkut hubungan yang kita bangun dengan orang lain.

Yang kelima menyangkut proses pengambilan keputusan. Dalam bank konvensional, berbagai keputusan yang diambil, baik yang menyangkut hubungan dengan pihak lain maupun yang berkaitan dengan teknis transaksi atau mekanisme transfer dana berdasarkan hukum positif dan etika bisnis yang ada. Sedangkan dalam bank Islam ada suatu dewan yang mengawasi apakah kinerja perbankan tersebut sesuai dengan hukum syariah atau tidak. Dewan inilah yang membantu memutuskan apakah suatu produk yang ditawarkan bank halal atau haram.

Sementara itu Chapra (2000) membedakan bank konvensional dan Bank Islam sebagaimana tercantum dalam tabel 8.4.

Tabel 8.4.

Perbandingan Antara Bank Islam (Syariah) Dan Bank Konvensional

No.	BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1	Tanpa riba (bunga)	Dengan sistem bunga
2	Lebih Berorientasi pada tujuan	Lebih berorientasi memaksimalkan keuntungan
3	Operasi bersifat universal dengan tujuan ganda komersial dan investasi	Lebih ditekankan aspek komersialnya
4	Sistem Profit and loss sharing membuat evaluasi yang lebih berhati-hati pada penyertaan modal	Sistem bunga dapat mengurangi kehati-hatian dalam evaluasinya
5	Hubungan kemitraan yang erat antara bank dan nasabah	Sebatas hubungan bisnis
6	Akses likuiditas lebih sulit karena tergantung pada kepercayaan antar bank membuat bank lebih berhati-hati	Akses likuiditas yang lebih mudah pada pasar uang dan bank sentral dapat membuat ketergantungan yang berlebihan

Sumber : disarikan dari Umar Chapra (2000).

Dalam poin satu maka jelas yang dimaksud riba di sini adalah bunga di mana dalam bank Islam bunga diharamkan, sedangkan dalam perbankan modern banyak sekali transaksi yang berdasarkan prinsip bunga. Selanjutnya menurut Chapra (2000) menekankan bank Islam yang lebih berorientasi pada tujuan sosioekonomi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi Islam. Tujuan ganda komersial dan Investasi membuat jasa perbankan menjadi lebih luas bank-bank yang beroperasi seperti ini sering disebut perbankan universal.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Perbankan universal telah diterima secara luas di Eropa. Di antara negara-negara industri utama, hanya Amerika Serikat dan Inggris yang memberi batasan-batasan yang ketat antara bank-bank komersial, bank investasi dan bank perdagangan. (Chapra, 2000, Sistem Moneter Islam, hal 131).



Perbedaan keempat yaitu dalam evaluasi terhadap pembiayaan penyertaan modal. Bank Islam dinilai lebih berhati-hati, dalam hal ini karena adanya prinsip profit and loss sharing. Sedangkan dalam perbankan modern, meskipun juga mengevaluasi permohonan, adanya jaminan dan karena ketidakikutsertaan dalam mengambil resiko membuat mereka kurang teliti dibanding bank Islam.

Perbedaan selanjutnya berhubungan dengan hubungan antara bank dan nasabah. Hubungan bisnis berdasar bagi hasil akan lebih mempererat hubungan kemitraan antara bank dan nasabahnya. Evaluasi yang lebih berhati-hati dan adanya hubungan kemitraan yang baik antara bank dan nasabah (dalam hal ini pengusaha ) akan mengurangi kasus-kasus yang tidak diinginkan seperti kasus likuiditas.

Dalam hal perolehan likuiditas, Chapra (2000) berpendapat bahwa Bank-bank Islam tidak semudah bank-bank konvensional dalam mendapatkan dana cair dalam jangka pendek. Alternatif perolehan dana bisa didapat dari kesepakatan antar bank Islam dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam bank konvensional dapat dengan mudah memperoleh likuiditas jangka pendek karena adanya fasilitas *overnight, call loan* dan sebagainya. Secara sederhana hal ini bisa berarti bahwa perolehan likuiditas jangka pendek bank Islam tidak semudah dalam perbankan konvensional. Namun demikian hal ini justru membuat bank Islam lebih berhati-hati dalam pengelolaan sumber dayanya sehingga tidak sampai mengalami ketergantungan yang tinggi pada pinjaman jangka pendek seperti yang dialami bank konvensional.

Setelah melihat perbandingan antara bank Islam dan bank konvensional dari segi teoretis, sekarang bagaimana kinerja kedua perbankan tersebut di

masyarakat? Munawar Iqbal(2000)<sup>35</sup> telah melakukan penelitian tentang hal ini. Dengan mengambil 12 bank Islam yang cukup besar dan representatif sebagai sample dan mengadakan seleksi kinerja bank yang baik. Dari empat bank terpilih kemudian dilakukan komparasi dengan bank konvensional. Variabel yang diteliti adalah : *total equity, deposits, investment, dan assets*, serta rasio-rasio keuangan. Hasilnya ternyata menunjukkan rata-rata bank Islam memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Untuk rasio likuiditas, bank Islam dibawah bank konvensional.

#### **8.4. Bank Sentral**

Ditinjau dari segi fungsinya, dapat dikatakan tidak terlalu banyak perbedaan antara bank sentral dalam perekonomian Kapitalis dengan bank sentral Islam. Karena pada intinya semua bank sentral tersebut sama-sama ingin mewujudkan tujuan makroekonominya yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang wajar, inflasi yang rendah, neraca pembayaran yang seimbang serta tingkat pengangguran yang rendah. Tetapi karena tujuan sosioekonominya berbeda serta adanya aspek etika yang berbeda maka dalam tataran praktisnya juga menghasilkan kebijakan berbeda. Hal ini mulai terlihat jelas pada perbedaan instrumen yang digunakan, baik untuk bertransaksi maupun untuk tujuan kebijakan moneternya. Perbedaan yang paling jelas terlihat adalah dengan ditiadakannya sistem bunga dalam perbankan Islam.

Selain itu ada beberapa hal yang cukup membedakan antara bank sentral Islam dan bank sentral biasa. Karena segala hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas moneternya haruslah sesuai dengan syariah, maka kebijakan yang diambilpun juga harus sesuai dengan ketentuan syariah. Secara

---

<sup>35</sup> Iqbal, Munawar, 2000, *Islamic and Conventional Banking in the Nineties: A Comparative Study*, Paper Presented at The fourth International Conference On Islamic Economics and Banking, Loughborough University, UK.

sederhana dapat digambarkan perbedaan antara bank sentral Islam dan bank sentral modern sebagai berikut :

Tabel 8.5. Perbedaan Bank Sentral Islam dan Bank Sentral Modern

No.	Bank Sentral Islam	Bank Sentral Modern
1	Berdasar Syariah	Berdasar teori modern
2	Instrumen kebanyakan berbasis <i>profit and loss sharing</i>	Instrumen kebanyakan berbasis tingkat bunga
3	Jumlah uang beredar ditetapkan dalam kerangka menjaga keseimbangan sektor riil dan moneter	Diserahkan pada mekanisme pasar

### 8.5. Kebijakan Moneter

Perbedaan dalam cara pandang perekonomian juga membuat sistem yang digunakan berbeda. Kebijakan moneter dalam perekonomian Kapitalis terkait dengan konsep mereka tentang uang, proses intermediasi, serta instrumen yang digunakan. Demikian halnya dengan kebijakan moneter dalam perekonomian Islam, juga tidak lepas dari konsep dan hukum-hukum yang melandasi proses serta instrumen yang digunakan.

Kebijakan moneter dengan basis instrumen tingkat bunga banyak digunakan dalam perekonomian Kapitalis. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, tingkat inflasi dan tingkat kegiatan ekonomi. Sampai saat ini instrumen tingkat bunga dianggap sebagai alat yang ampuh dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian Kapitalis. Sementara itu dalam perekonomian Islam yang mengharamkan bunga, juga memiliki instrumen sendiri dalam menjalankan kebijakan moneternya.

Dari uraian masing-masing sistem dalam bab terdahulu dapat kita ringkas perbandingan Kebijakan moneter dalam perekonomian Kapitalis dengan kebijakan moneter dalam perekonomian Islam menjadi beberapa bagian

secara sederhana. Tabel 8.6. Menggambarkan secara sederhana perbandingan kebijakan moneter dalam ekonomi Kapitalis dan Islam.

Tabel 8.6. Perbandingan Kebijakan Moneter Dalam Sistem Moneter Islam dan Modern

No	Kriteria	Sistem Moneter Islam	Sistem Moneter Kapitalis
1	Tujuan*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Meningkatkan dan menjaga pertumbuhan ekonomi</li> <li>☐ Memelihara stabilitas ekonomi dalam negeri</li> <li>☐ Memelihara Stabilitas nilai uang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Meningkatkan dan menjaga pertumbuhan ekonomi</li> <li>☐ Memelihara stabilitas ekonomi dalam negeri</li> <li>☐ Memelihara Stabilitas nilai uang</li> </ul>
2	Instrumen yang Digunakan	<p>Kebijakan Kualitatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Bujukan Moral</li> <li>☐ Kontrol kredit selektif</li> </ul> <p>Kebijakan Kuantitatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Operasi pasar**)</li> <li>☐ Pinjaman mudharabah</li> <li>☐ Cadangan wajib resmi</li> <li>☐ pergeseran deposito pemerintah</li> <li>☐ persetujuan penukaran devisa oleh bank sentral pada bank komersial</li> </ul>	<p>Kebijakan Kualitatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Bujukan Moral</li> <li>☐ Pengawasan pinjaman secara selektif</li> </ul> <p>Kebijakan Kuantitatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Open Market Operation</li> <li>☐ Minimum Reserve Requirement</li> <li>☐ Margin Requirement</li> </ul>
3	Basis Instrumen Kuantitatif	-Rate of Profit Sharing	Tingkat Bunga
4	Sasaran antara	Jumlah uang beredar	Jumlah Uang beredar Tingkat bunga

Keterangan :

\*) Pada umumnya tujuan kebijakan moneter setiap negara hampir sama terkait dengan tujuan makroekonominya, tujuan makroekonomi yang lain misalnya menjaga toleransi tingkat inflasi, peningkatan kesempatan kerja dan keseimbangan neraca pembayaran.

\*\*\*) Membeli dan menjual saham dan sertifikat bagi hasil, untuk menggantikan obligasi pemerintah yang berbasis bunga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfathri Adlin & Iwan Suryolaksono, 2001, *Tinjauan Umum pada EraPramodernisme, Modernisme, dan Posmodernisme*, <http://www.paramartha.org>
- Amin, Muhammad Miska, 1983, *Epistemologis Islam; Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, Cetakan Pertama, Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Ariff, Mohammad (ed), 1976, *Monetary and Fiskal Policy Economics of Islam*, Paper Presented at The first International conference On Islamic Economics, Jeddah.
- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah-Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, edisi 1, Penerbit Alva Bet, Jakarta.
- Arrison. 2000, *Catatan Kespuluh Kuliah Informal Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Boediono, 1996, *Ekonomi Moneter*, edisi ketiga-cet. ke-9, BPFE, Yogyakarta.
- Chapra, M. Umer, 1999, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Terjemahan, Nur Hadi Ihsan, dan Rifki Amar, Penerbit Risalah Gusti, Surabaya.
- 2000, *Sistem Moneter Islam*, Terjemahan, Ikhwan Abidin B., Penerbit Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, Jakarta.
- 2000, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terjemahan, Ikhwan Abidin Basri, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta.
- 2000, *Alternative Visions of International Monetary Reform*, Paper Presented at The fourth International Conference On Islamic Economics and Banking, Loughborough University, UK.
- Choudhury, Masudul Alam, 1997, *Money In Islam: A Study in Islamic Political Economy*, TJ International Ltd, Padstow, Cornwall.
- Dahlan Siamat, 1995, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Penerbit Intermedia, Jakarta.

- Danil Ilyas, 2001, *Sejarah Awal Kemunculan Ekonomi Islam Kontemporer*, Makalah Dalam Kuliah Informal Ekonomi Islam, Student Centre - Unibraw, Malang
- Dar, Humayon A. and John R. Presley, 1999, *Islamic Finance: A Western Perspective*, International Journal of Islamic Financial Services, Vol.1, No.1, April-June 1999, Department of Economics, Loughborough University, UK, IBF Net: The Islamic Banking and Finance Network
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an. Jakarta.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1991, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Edisi pertama, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Djoko Suharjanto, 2000, *Aktualisasi Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Dan Arah Pengembangan Ilmu Ekonomi: Epistemologi dan Perkembangan Teori Akuntansi*, Perspektif; Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol.5, No.2, Desember 2000, Penerbit FE-UNS, Surakarta.
- Dornbusch, Rudiger dan Stanley Fischer, 1995, *Makroekonomi*, ed. ke-4, Terjemahan, J. Mulyadi, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gallagher, Kenneth T., 1994, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, Terjemahan, P. Hardono Hadi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Harun Hadiwiyono, 1980, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Hussain Heriyanto, 1999, *Kapitalisme: Sebuah Modus Eksistensi*, <http://klik.go2net.com>.
- Iqbal, Munawar, 2000, *Islamic and Conventional Banking in the Nineties: A Comparative Study*, Paper Presented at The fourth International Conference On Islamic Economics and Banking, Loughborough University, UK.
- Islahi, A.A., 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terjemahan, Anshari Thayib, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya.

- \_\_\_\_\_, 2000, *Telaah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam di Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Issu Kritis Terhadap Keuangan Islami dan Prakteknya dalam Dunia Perbankan*, Makalah Disampaikan Pada Respons of The Fourth Forum on Islamic Finance, Seconds 2001, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2001, *Penerapan Syariah Islam di Bidang Ekonomi*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam, Syariah Economic Days 2001, Jakarta
- Mannan, Muhammad Abdul, 1992, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, Terjemahan, Potan Arif Harahap, Penerbit PT Intermasa, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ketujuh, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhaimin, Tadjab, Abd. Mudjib, 1994, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, Penerbit Karya Abditama, Surabaya
- Mukharor Jalil, 1997, *Bank Sentral, Central Bank*, <http://www.infobank-online.com/kamus>
- Mulkan, Abdul Munir, 1986, *Seri Percikan Pemikiran Islam; Sebuah Tinjauan dan Perspektif Tentang Ajaran Islam*, Penerbit PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Mustafa Kamal (ed), 1997, *Wawasan Islam dan Ekonomi*, Penerbit Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Nabahan, M. Faruq An, 2000, *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Terjemahan, Muhadi Zainuddin, dan A. Bahauddin Noersalim, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Nabhani, Taqyuddin An, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, Terjemahan, Moh. Maghfur Wachid, Penerbit Risalah Gusti, Surabaya.
- Noeng Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Nopirin, 1993, *Ekonomi Moneter*, Edisi keempat cetakan kedua, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

- \_\_\_\_\_, 1996, *Ekonomi Moneter*, cetakan kedua, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 1995, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terjemahan, Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, Penerbit Robbani Press, Jakarta.
- Rahardjo, M. Dawam (ed), 1987, *Kapitalisme dulu dan sekarang*, LP3ES, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Penerbit Syariah Wacana, Yogyakarta
- Rapar, Jan Hendrik, 1996, *Pengantar Filsafat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 1985, *Ekonomi*, ed. ke-12, Terjemahan, Jaka Wasana, Penerbit Erlangga, Surabaya.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1991, *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*, Terjemahan, Dewi P. Restiana, Penerbit CV. Ramadhani, Solo
- Schnitzer, Martin C., 1991, *Comparatif Economic System*, 5<sup>th</sup> ed., South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio.
- Triyuwono, Iwan, 2000, *Akuntansi dan Organisasi Syari'ah*, LkiS, Yogyakarta.
- Yuslam Fauzi, 2001, *Manajemen Bank Islam*, Makalah Disampaikan Pada Shari'ah Economic Days 2001, Jakarta.
- Verhaak, C. dan R. Haryono Imam, 1989, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-ilmu*, Penerbit Gramedia, Jakarta.





## TENTANG PENULIS

**Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE. M.Si** Adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Program S2 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon Lulus Sarjana Ekonomi (1996) dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Unwama Yogyakarta, Menyelesaikan pendidikan Pascasarjana (S2) bidang Ilmu Ekonomi, dengan Konsentrasi *Banking and Finance* di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) tahun 2003. Dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi dengan spesialisasi pada bidang Moneter dan Perbankan di Universitas Padjadjaran Bandung (2011).

Aktif menulis diberbagai jurnal ilmiah dan seminar, baik di bidang ekonomi maupun bidang perbankan syariah. Ketua Baitul Maal Wa Tamwill (BMT) Artha Mandiri Kuningan tahun 2008 sampai sekarang. Selain itu, Penulis juga Aktif di organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Wilayah III Cirebon sebagai Anggota Dewan Pakar dan Aktif di Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) sebagai Ketua Komisariat IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Beberapa penelitian juga pernah dilaksanakan penulis diantaranya adalah :

- Pola Keberagaman Pramuniaga Toserba di Kota Cirebon penyelenggara P3M STAIN Cirebon,2003.
- Kompetensi Profesi Lulusan dalam Perspektif Customer Value, P3M STAIN Cirebon,2006.
- Survey Aspek Ekonomi Jalan Tembus Daerah Transmigrasi Lokal Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan, 2007 bekerja sama dengan Bank Indonesia.
- Survey Profil Usaha Mikro dan Kecil Potensial di Wilayah Cirebon, 2008 bekerja sama antara UNIKU dan Bank Indonesia, dan lain-lain.
- Implementasi Model Pencatatan Cash Basis dan Accrual Basis di Perbankan Syariah, 2012
- Survey Profil Potensi Investasi Sektor Pariwisata di Kabupaten Kuningan, 2012.


- Implementasi Cash dan Accruel Basis Pada Transaksi-Transaksi di Perbankan Syariah,2012
- Profil Koperasi di Kabupaten Cirebon, 2012
- Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensi Kewirausahaan Mahasiswa,2013
- Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.,2014

Buku yang pernah ditulis berjudul **Manajemen Perbankan Syariah dan Mikro Ekonomi** serta beberapa buku lain sedang dalam proses penyelesaian antara lain :

1. Ekonomi Makro Pendekatan Matematik
2. Ekonomi Makro Perspektif Islam
3. Metodologi Penelitian Bidang Ekonomi, dan
4. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.

CV.  
**ELSI pro**  
PENERBIT

ISBN 978-602-1091-17-3



9 786021 091173